

AKSELERASI JAWA TIMUR
Menuju 2029 dengan Semangat *Zero Mission*
dan Militansi Tanpa Batas

Bagus Prasetia Lelana

Ketua DPW PKS Jatim

AKSELERASI JAWA TIMUR

Menuju 2029 dengan Semangat *Zero Mission* dan Militansi Tanpa Batas

Penulis:

Bagus Prasetya Lelana
Ketua DPW PKS Jatim

Copyright © Januari 2026
All right reserved

ISBN:

978-634-274-043-9

Layout :

Nimas Brantandari

Penerbit:

PT. Pustaka Saga Jawadwipa
Jl. Kedinding lor Gang Delima No.4A Surabaya
Nomor Kontak: 085655396657

Anggota IKAPI:

No. 367/JTI/2023

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.



Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan Semesta Alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, teladan terbaik bagi kita semua.

Saya menyambut baik dan mengapresiasi terbitnya buku berjudul “AKSELERASI JAWA TIMUR: Menuju 2029 dengan Semangat *Zero*

Mission dan Militansi Tanpa Batas”.¹

Buku ini menjadi catatan sejarah atas perjuangan dan kiprah nyata DPW PKS Jawa Timur di bawah kepemimpinan Saudara Bagus Prasetya Lelana dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk masyarakat.

Jawa adalah kunci. Termasuk di dalamnya Jawa Timur adalah wilayah yang sangat strategis dalam peta politik nasional. Sebagai lumbung suara dan pusat peradaban pesantren, apa yang terjadi di Jawa Timur akan memberikan resonansi yang kuat bagi pergerakan PKS secara nasional.

Oleh karena itu, DPP PKS memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan seluruh DPW di Jawa sebagai DPW Mandiri. Optimisme dan harapan besar hadir di Jawa Timur saat kepemimpinan

¹ Secara harfiah, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai "Misi Nol". Namun, dalam konteks manajemen strategis yang dirujuk dokumen, istilah ini merupakan derivasi kreatif dari konsep *Zero-Based Budgeting* (ZBB) atau *Zero-Based Thinking*.

baru periode 2025-2030 yang baru dilantik Agustus 2025 telah menunjukkan kinerja yang progresif.

Tepat setelah pelantikan, mesin partai di Jawa Timur tidak menunggu waktu lama untuk "panas"; ia langsung bergerak cepat, menyisir setiap sudut wilayah, dan menyapa setiap lapisan masyarakat. Dengan berbagai dokumentasi gerak cepat DPW PKS Jawa Timur yang tersaji dalam buku ini dari Agustus hingga Desember 2025 ini, saya merasa optimis insya Allah kemenangan yang berkah dan bermartabat akan hadir di 2029 mendatang.

Setiap bab dalam buku ini adalah cermin dari militansi kader yang tidak pernah luntur. Saya teringat saat kunjungan saya ke Jawa Timur, di mana alhamdulillah saya bisa hadir dua kali dalam waktu yang relatif singkat. Pertama, pada momen Rakerwil yang penuh energi, dan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2025 dalam agenda Kembara (Kemah Bela Negara) untuk anggota Madya dan Sapu Jagat sekaligus pelantikan Satgas Bencana yang dihadiri oleh 1300 peserta.

Di sana, saya menyaksikan sendiri bagaimana Jawa Timur memiliki kekompakan antar kader yang luar biasa, soliditas yang kokoh, dan keseriusan yang tak tergoyahkan dalam bergerak melakukan pelayanan publik dan berjuang menyongsong kemenangan di tahun 2029. Saya melihat wajah-wajah yang penuh semangat, tangan-tangan yang siap bekerja, dan hati yang ikhlas dalam melayani rakyat. Oleh karenanya, saya berpesan kepada seluruh pembaca, khususnya struktur dan kader di Jawa Timur: jadikan buku ini sebagai pedoman praktis, sebuah blue print² perjuangan, bukan sekadar teori atau hiasan di rak buku semata.

Istilah "*Zero Mission* " yang diusung dalam judul buku ini memiliki makna filosofis dan teknis yang sangat dalam. Dalam konteks perjuangan kita menuju 2029, *Zero Mission* harus dimaknai sebagai kerja cerdas, ikhlas, dan tuntas. Ini adalah standar mutu (Ihsan)³ dalam

² Cetak biru. Rancangan detail teknis arsitektur/teknik. Dalam manajemen, berarti rencana kerja terperinci

³ Tingkatan tertinggi dalam agama setelah Iman dan Islam. Nabi mendefinisikannya sebagai "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya". Dalam konteks

berorganisasi. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan standar "yang penting terlaksana". Setiap program kerja harus memiliki dampak yang terukur, efisiensi yang tinggi, dan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

Apa yang tertulis dalam buku ini adalah sebuah peta jalan atau roadmap⁴. Pengalaman yang tertuang dari bulan-bulan awal kepengurusan ini adalah bekal yang sangat berharga untuk mengakselerasi pencapaian target-target jangka pendek di tahun 2026. Kita sedang membangun fondasi yang berlandaskan pada politik kebijakan K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik) dalam bingkai "Lima Rumah Perjuangan" yang dimulai dari Rumah Tangga, Rumah Ibadah, Rumah PKS, Rumah Kebangsaan, dan Rumah Kemanusiaan. Insya Allah, ketika fondasi yang kita bangun di awal kepengurusan ini sudah kokoh, maka langkah kita menuju kemenangan besar di tahun 2029 akan semakin ringan dan terarah.

Saya juga ingin memberikan apresiasi khusus atas inisiatif menuangkan kerja-kerja lapangan ke dalam bentuk tulisan. Di era disrupsi informasi seperti sekarang, membangun budaya literasi di kalangan anggota organisasi adalah hal yang sangat vital. Kita seringkali lihai dalam bekerja di lapangan, namun seringkali lalai dalam mendokumentasikannya.

Dakwah ini membutuhkan narasi yang kuat. Narasi yang mampu menyentuh hati rakyat dan memberikan solusi atas persoalan bangsa hanya lahir dari tradisi membaca dan menulis yang kuat pula. Dengan mendokumentasikan langkah strategis seperti ini, kita sebenarnya sedang melakukan transfer pengetahuan. Kita sedang mewariskan ilmu dan pengalaman bagi generasi pelanjut, para pemuda, Gen Z, dan milenial, agar mereka tidak perlu memulai dari nol. Mereka bisa belajar dari keberhasilan kita, dan mengambil pelajaran dari tantangan yang kita hadapi.

muamalah, bermakna profesionalisme, *excellence*, atau melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik/sempurna

⁴ Peta jalan. Dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan langkah-langkah mencapai tujuan jangka panjang

Perjalanan menuju 2029 memang masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan semangat "Akselerasi Jawa Timur" yang dibungkus dengan militansi tanpa batas, saya yakin PKS Jawa Timur akan menjadi motor penggerak utama bagi kemenangan dakwah di tingkat nasional. Kita ingin menghadirkan PKS sebagai partai Islam Rahmatan Lil'alamin⁵ yang modern, terbuka, namun tetap teguh memegang nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Transformasi digital yang tengah kita galakkan, penguatan struktur hingga ke tingkat desa, serta pelibatan aktif kaum muda harus menjadi prioritas yang terintegrasi dengan semangat yang tertuang dalam buku ini. Jangan biarkan satu detik pun berlalu tanpa memberikan manfaat bagi rakyat. Jadikan setiap gerak kita sebagai ibadah, dan setiap capaian kita sebagai sarana untuk meraih ridha Allah SWT.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi setiap langkah perjuangan kita dalam membangun umat, bangsa, dan negara. Semoga setiap huruf yang tertulis dalam buku ini dicatat sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya bagi para penulis dan pejuang di baliknya. Saya berharap PKS Jawa Timur benar-benar menjadi salah satu lumbung kemenangan dakwah yang paling membanggakan di masa depan.

Selamat membaca bagi para kader dan simpatisan. Selamat bergerak kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan selamat berjuang demi mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Allahu Akbar! Merdeka!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2025

Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

⁵ Berasal dari QS. Al-Anbiya: 107. "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Maknanya adalah Islam yang membawa kasih sayang, kedamaian, dan kemanfaatan bagi seluruh makhluk, bukan hanya bagi Muslim

PENGANTAR

KETUA DPW PKS JAWA TIMUR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam, Yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Atas Rahmat dan izin-Nya, kita bisa bergerak bersama untuk menjadi bagian dari penyeru kebaikan dan melayani umat melalui wasilah Partai Keadilan Sejahtera.

Teriring Sholawat dan salam kepada Rasulullah junjungan, yang telah memberikan suri teladan yang nyata, memberikan contoh yang paripurna bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi pelopor dalam kebaikan serta memberikan pelayanan.

Mari kita doakan juga para pendahulu kita, karena capaian dan apa yang kita nikmati sekarang tak lepas dari jasa dan perjuangan mereka yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa agar kebaikan bisa sampai kepada kita dan generasi berikutnya.

Alhamdulillah, sejak dilantik menjadi Ketua DPW PKS Jawa Timur di pertengahan bulan Agustus lalu, atas pertolongan Allah SWT kita sudah melewati beberapa agenda besar mulai Munas, Muswil, Musda, Rakernas, Rakerwil, dan juga Rakerda terakhir di tanggal 28 Desember. Selain itu Alhamdulillah kami berkesempatan menghadiri beberapa undangan dari Forkompimda Jawa Timur, Parpol lain, serta melakukan shilaturrahim kebangsaan ke Gubernur dan organisasi ke-Islaman seperti PWNU, PWM, MUI. Alhamdulillah di tutup di penghujung tahun terlaksana juga Kemah Bela Negara (Kembara) sekaligus pengukuhan Satgas Penanggulangan Bencana Jawa Timur yang dihadiri langsung oleh Presiden PKS, Ustadz Dr. Al Muzzammil Yusuf

Saya bertekad dan berikhtiar di awal kepengurusan ini bisa bershilaturrahim ke Kantor DPTD seluruh Jawa Timur, untuk curah ide

dan curah gagasan dengan jajaran DPTD. Membahas hambatan sekaligus peluang dalam menjalankan amanah dan pencapaian target ke depan. Kami yakin akan pentingnya konsolidasi struktural dalam pencapaian target yang sudah dicanangkan. Jajaran pimpinan juga sudah bersepakat akan memberikan perhatian dan dukungan khusus kepada DPD yang belum memiliki kursi di DPRD Kabupaten /kota dalam pemilu 2024 dimana tercatat di Jawa Timur terdapat 5 Kabupaten/kota.

Menutup agenda akhir tahun 2025 terealisasi ide untuk menerbitkan Buku Refleksi Akhir Tahun DPW PKS Jawa Timur dimana latar belakang dari penerbitan buku ini yaitu, kami ingin agar setiap anggota bisa menerapkan disiplin organisasi yang baik, karena tanpa disiplin yang tinggi kita akan sulit untuk bisa melakukan akselerasi dalam mengejar ketertinggalan dan mencapai target yang di canangkan.

Dalam menjalankan amanah kepengurusan ini, saya menekankan pentingnya paradigma *Zero Mission* keberanian melakukan *fresh start*,⁶ membangun fondasi yang lebih kokoh, memperbarui peta untuk mencapai tujuan baru. Selain itu, saya juga menekankan agar setiap anggota memiliki karakter *siaga-berani-setia* dalam rangka membentuk militansi anggota PKS di Jawa Timur.

Buku ini diharapkan menjadi langkah yang nyata DPW PKS Jawa Timur untuk mengejawantahkan 3 modal utama yang dimiliki PKS yaitu Kader yang militan, struktur yang solid dan kecerdasan kolektif sekaligus penguatan kerangka kerja Kader-Kaderisasi dan Pemenangan Pemilu di tahapan tahun 2026.

Buku ini bukan semata berisi apa saja yang sudah dilakukan Jajaran BPH dan Pengurus DPW PKS Jawa Timur selama menjalankan Kepengurusan dari awal dilantik sampai dengan akhir tahun 2025 ini, tapi juga merupakan panduan, penyemangat bagi Kader PKS

⁶ Istilah ini merujuk pada *The Fresh Start Effect*, sebuah fenomena psikologis yang diteliti oleh Katherine Milkman dari Wharton School. Riset ini menunjukkan bahwa manusia memiliki lonjakan motivasi untuk mengejar tujuan baru ketika mereka merasa telah melewati sebuah *temporal landmark* (penanda waktu) yang memisahkan "diri lama" yang gagal dari "diri baru" yang penuh potensi.

khususnya di Jawa Timur dalam menyatukan pemahaman dan pola gerak dalam mencapai target di tahun 2026.

Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk dibaca oleh Pengurus, Pembimbing, Pembina, dan anggota pelopor khususnya di Jawa Timur agar punya kesamaan suhu dan pemahaman apa yang ingin dicapai bersama di tahun 2026. Insya Allah untuk tahun mendatang kita juga akan menerbitkan buku refleksi seri berikutnya agar semua anggota juga mempunyai semangat yang sama dalam mencapai target di tahun berikutnya

Terimakasih saya sampaikan kepada Presiden PKS, Ust Dr. Al Muzammil Yusuf yang sudah meluangkan waktu beliau untuk menghadiri dua agenda besar di Jawa Timur. Pertama menghadiri acara Rakerwil DPW PKS Jawa Timur yang dihadiri oleh pengurus DPTW dan DPTD se-Jawa Timur dan yang ke-dua, di penghujung tahun 2025 beliau hadir dalam acara Kemah Bela Negara (Kembara) anggota Madya sekaligus pengukuhan Satgas Penanggulangan Bencana DPW PKS Jawa Timur yang diikuti oleh lebih dari 1,300 peserta.

Menjalankan amanah kepemimpinan tentunya butuh kesertaan dari semua pihak dan sumberdaya yang cukup, untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Anggota Legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten yang sudah berkolaborasi menguatkan kerangka kerja K2P2 dengan mensinergikan kegiatan kedewanan dan secara khusus berkenan untuk memberikan supporting program dan advokasi di luar Dapil, sehingga kemanfaatan bisa dirasakan dan berdampak lebih lebih luas.

Terimakasih kepada DPTW khususnya Ketua dan Sekretaris MPW, Ketua dan Sekretaaris DSW dan jajarannya yang sudah kebersamai, memberikan masukan dan pertimbangan, bersama-sama memberikan supportnya dalam menjalankan amanah ini di Jawa Timur

Terimakasih kepada seluruh pengurus DPW, Ketua Bidang dan Tim yang sudah *menerima amanah tanpa tapi*, kebersamai saya menjalankan amanah selama lima tahun ke depan. Semogaa Allah menguatkan barisan dan langkah kita semua. Tentunya pilihan Bidang-

bidang yang ada merupakan kebutuhan nyata di masyarakat untuk maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terimakasih kepada DPTD dan seluruh jajaran se-Jawa Timur, yang sudah menjadi pembelajar cepat, luar biasa menerima banyak turunan dan tugas struktural yang harus dilakukan setelah diumumkan menjadi bagian DPTD sampai dengan akhir tahun 2025. Tentunya semua berangkat dari kesadaran bahwa struktur yang kuat adalah bagian yang terpisahkan dari upaya menjemput kemenangan.

Terimakasih dan penghargaan saya sampaikan khususnya kepada Mas Sekretaris dan seluruh jajaran, tim editor dan tim penyusun buku ini yang sudah memberikan dedikasi yang luar biasa, bahkan sebagian harus mengorbankan waktu liburan akhir tahunnya. hingga terbitnya buku ini.

Terakhir, tak lupa terimakasih yang tulus saya sampaikan kepada istri dan keluarga tercinta yang sudah memberikan support penuh, merelakan waktu kebersamaan bersama keluarga, selalu memberikan semangat agar saya bisa menjalankan amah dengan sebaik-baiknya

Semoga Allah SWT menguatkan langkah kita dalam mewujudkan Visi *“Partai Islam Rahmatan Lil Alamin yang kokoh dan terdepan menuju Indonesia Madani yang Adil, Sejahtera dan bermartabat”*, Menguatkan Kader dan Kaderisasi serta Pelayanan Publik dalam ikhtiar Pemenangan Pemilu ke depan.

Bagus Prasetia Lelana
Ketua DPW PKS Jatim 2025-
2030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS).....	iii
PENGANTAR	
KETUA DPW PKS JAWA TIMUR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I TRANSISI AKSELERASI DI JAWA TIMUR	1
• Doktrin “ <i>Zero Mission</i> ”	4
• Filosofi Kepemimpinan Dan Kepatuhan Sadar (<i>Conscious Compliance</i>)	9
• Tiga Mesin Strategis (<i>The Three Strategic Engines</i>)	11
• Operasionalisasi Strategi Delapan Program Unggulan 2026	14
• Peta Jalan Menuju 2029	17
BAB II FILOSOFI GERAKAN (KADER & STRUKTUR).....	23
• Siaga, Berani, Setia Tri-Dharma Karakter Anggota PKS Jawa Timur.....	24
• Strategi Akselerasi Perangkat Pendidikan Anggota Jawa Timur	28
BAB III STRATEGI “ <i>ZERO MISSION</i> ” & DIGITALISASI	33
• Turbulensi Politik dan Urgensi Transformasi Ontologis	34
• Landasan Filosofis dan Operasional: <i>Zero-Based Transformation (ZBT)</i>	36
• Rekam Jejak Kinerja Pasca Pelantikan (<i>The Track Record</i>)	42
• Evaluasi Kritis Berbasis Data (<i>Critical Evaluation</i>).....	51
• Proyeksi dan Peta Jalan Kemenangan 2026 (<i>Projection 2026</i>)	57

BAB IV PORTFOLIO KINERJA & ROADMAP 2026-2029	67
• Bidang Kaderisasi	66
• Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BIPEKA).....	71
• Bidang Koperasi dan Desa	74
• Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (POLHUKAM)	77
• Bidang Seni dan Budaya	80
• Bidang Ketenagakerjaan	83
• Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai (BPPKP).....	86
• Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga (BINAPORA).....	89
• Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPDKPMRD)	92
• Bidang Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (BPPM)	95
• Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3)	98
• Bidang Pertanian, Peternakan, dan Nelayan	101
• Bidang Advokasi Partai.....	103
• Bidang Relawan dan Saksi.....	105
• Bidang Kepanduan dan Bela Negara (BKBN).....	108
• Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Lingkungan Hidup (EKUIN LH)	111
• Bidang Pembangunan Ummat dan Kerukunan Beragama (BPUKB).....	114
• Bidang Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)	118
• Bidang Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif (BUMKraf).....	121
BAB V REFLEKSI & PENUTUP	125
PROFIL KETUA DPW PKS JAWA TIMUR	129

BAB I
TRANSISI AKSELERASI
DI JAWA TIMUR

Dalam konstelasi politik nasional Indonesia, Provinsi Jawa Timur memegang peranan yang sangat sentral, tidak hanya sebagai lumbung suara terbesar kedua secara demografis, tetapi juga sebagai barometer stabilitas sosiopolitik nasional. Dinamika yang terjadi di provinsi ini kerap menjadi penentu arah angin politik di tingkat pusat. Dalam konteks inilah buku ini hadir sebagai sebuah manifesto transformasi fundamental bagi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur[1].

Buku ini menandai sebuah titik balik krusial—sebuah *tipping point*—dalam evolusi organisasi partai. PKS Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bagus Prasetia Lelana, sedang melakukan manuver strategis untuk beralih dari fase pertumbuhan organik menuju fase akselerasi eksponensial. Narasi yang dibangun tidak lagi berkuat pada bagaimana bertahan hidup di tengah kerasnya kompetisi elektoral, melainkan pada bagaimana mendominasi arena politik dan mengambil peran kepemimpinan eksekutif yang signifikan[1].

Konteks Geopolitik: Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara

PKS Jawa Timur tengah membangun citra sebagai partai yang berorientasi negara (*state-oriented*)⁷ dan berwawasan teknokratis, melampaui stigma lama sebagai partai kader yang semata-mata bergerak pada isu moralitas. Transformasi ini merupakan upaya sadar untuk menyelaraskan frekuensi perjuangan partai dengan agenda pembangunan nasional, sehingga PKS Jawa Timur mampu berbicara dalam bahasa tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan solusi kebijakan yang konkret.

Melalui reposisi ini, PKS Jawa Timur diharapkan dapat diterima oleh spektrum pemilih yang lebih luas, termasuk kalangan teknokrat, pelaku bisnis, serta masyarakat urban yang rasional dan pragmatis. Dengan demikian, perubahan citra ini bukan sekadar

⁷ Berorientasi pada negara/pemerintahan. Partai yang fokus pada pengelolaan isu-isu publik dan kenegaraan, bukan sekadar isu ideologis atau sektarian

penyesuaian kosmetik, melainkan langkah strategis dalam menghadapi kontestasi politik menuju 2029.

Urgensi Transformasi Struktural

Analisis mendalam terhadap kondisi geopolitik di Jawa Timur mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di tingkat pimpinan wilayah (DPTW) bahwa metode-metode lama tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan politik tahun 2029. Tantangan tersebut meliputi perubahan demografi pemilih yang kini didominasi oleh generasi Z dan milenial, disrupsi teknologi informasi yang mengubah cara kerja politik, serta meningkatnya volatilitas perilaku pemilih akibat membesarnya kelompok pemilih mengambang (*floating mass*)⁸.

Oleh karena itu, buku ini merumuskan sebuah arsitektur pemenangan yang komprehensif. Transformasi tidak hanya diarahkan pada aspek teknis elektoral, tetapi dimulai dari pembenahan mentalitas kader melalui doktrin *Zero Mission*, dilanjutkan dengan redefinisi pola kepatuhan melalui konsep *Kepatuhan Sadar*, hingga perumusan taktik elektoral presisi yang memanfaatkan celah hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk merebut kemenangan Pilkada. Laporan ini membedah secara granular setiap elemen strategi tersebut, sekaligus memberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme, implikasi, dan proyeksi keberhasilannya.

⁸ Istilah "Massa Mengambang" diperkenalkan pada masa Orde Baru untuk mendeskripsikan strategi depolitisasi masyarakat desa. Masyarakat dibiarkan "mengambang" tanpa ikatan partai politik yang jelas di antara masa pemilu

DOKTRIN “ZERO MISSION”

Dekonstruksi Mentalitas dan Rekonstruksi Kinerja

Jantung transformasi PKS Jawa Timur terletak pada sebuah doktrin psikologis sekaligus operasional yang disebut *Zero Mission*. Konsep ini ditempatkan sebagai fondasi awal sebelum seluruh strategi teknis dijalankan, menegaskan bahwa kemenangan politik harus diawali dari kemenangan mentalitas.

Filosofi “Titik Nol”: Mengapa Harus *Fresh Start*?

Dalam siklus kehidupan organisasi politik, kerap muncul fenomena *incumbency trap*⁹ atau jebakan petahana. Keberhasilan masa lalu—baik berupa capaian kursi legislatif maupun kemenangan di daerah tertentu—sering melahirkan rasa puas diri (*complacency*)¹⁰ yang perlahan mematikan militansi. Sebaliknya, kegagalan di masa lalu tidak jarang meninggalkan trauma yang membuat struktur ragu untuk melangkah lebih berani.



ARAHAN: Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana, Memberikan arahan dalam agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PKS Jawa Timur.

⁹ Jebakan petahana. Situasi paradoksal di mana keuntungan sebagai pemegang jabatan (petahana) justru menjadi kelemahan karena menyebabkan rasa aman palsu, arogansi, atau resistensi terhadap perubahan

¹⁰ Rasa puas diri berlebihan terhadap pencapaian sendiri, yang sering disertai ketidaksadaran akan bahaya atau kekurangan yang ada

Doktrin *Zero Mission* hadir untuk memutus kedua belenggu psikologis tersebut. Filosofinya bertumpu pada keberanian melakukan *fresh start*[1]. Doktrin ini mengajarkan bahwa seluruh atribut kenyamanan lama harus dilepaskan agar organisasi dapat membangun fondasi yang lebih kokoh, relevan, dan adaptif terhadap tantangan 2029. Sebuah adagium kuat yang termaktub dalam buku ini menyatakan: “*Kita tidak bisa mencapai tujuan baru dengan menggunakan peta lama. Zero Mission adalah cara kita memperbarui peta dan memperkuat langkah.*”¹ Pernyataan ini menegaskan bahwa PKS Jawa Timur sedang melakukan *reboot* terhadap sistem operasi kepartaiannya.

Empat Pilar Utama *Zero Mission*

Implementasi *Zero Mission* tidak dibiarkan mengawang sebagai konsep abstrak, melainkan diturunkan menjadi empat prinsip kerja operasional yang wajib dipegang oleh seluruh struktur organisasi, mulai dari DPW hingga DPRa.

Tabel 1. Matriks Operasional Empat Pilar *Zero Mission*

Pilar	Prinsip Utama	Definisi Operasional & Mandat Eksekusi	Implikasi Strategis & Analisis Dampak
I	Breaking the Habit (Meninggalkan Kebiasaan Lama)	Menghentikan pola kerja yang bersifat seremonial, rutinitas tanpa evaluasi, dan kegiatan yang hanya menggugurkan kewajiban program kerja.	Efisiensi Radikal: Memaksa struktur untuk melakukan audit kegiatan. Jika sebuah program tidak berkorelasi positif dengan elektabilitas atau penguatan struktur, program tersebut harus diamputasi. ¹
II	Cutting the Noise (Efisiensi & Efektivitas)	Fokus pada program <i>high impact</i> . ¹¹ Menghindari jebakan "kesibukan semu" di mana energi habis	Fokus Sumber Daya: Mengarahkan anggaran dan tenaga pada "sedikit gerakan besar" yang mampu

¹¹ Berdampak tinggi; pengaruh besar.

Pilar	Prinsip Utama	Definisi Operasional & Mandat Eksekusi	Implikasi Strategis & Analisis Dampak
		untuk banyak kegiatan kecil yang tidak mengubah peta politik.	menciptakan momentum politik (political wave) daripada ribuan riak kecil yang tidak terasa. ¹
III	Boosting Result (Meningkatkan Produktivitas)	Pergeseran orientasi dari "berbasis proses" (<i>activity-based</i>) menjadi "berbasis hasil" (<i>output-based</i>). Ukuran kinerja bukan "apa yang sudah dikerjakan", tapi "apa yang dicapai".	Meritokrasi Kinerja: Menciptakan budaya pertanggungjawaban yang ketat. Laporan kegiatan tidak lagi cukup; yang diminta adalah data konversi suara, jumlah rekrutmen, dan perluasan teritori. ¹
IV	Mapping Potential (Menata Kursi Berpotensi)	Pemetaan ulang daerah "putih" (belum tergarap) dan penataan tokoh potensial untuk eksekutif/legislatif sejak dini (early deployment).	Ekspansi Teritorial: Mencegah terjadinya penumpukan kader di basis gemuk dan kekosongan di daerah kering. Menyiapkan kandidat jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. ¹

Analisis terhadap keempat pilar ini menunjukkan bahwa PKS Jawa Timur sedang mencoba mengadopsi prinsip-prinsip manajemen korporasi modern (*lean management*) ke dalam tubuh partai politik. Penekanan pada "*Cutting the Noise*" dan "*Boosting Result*" adalah antitesis dari budaya birokrasi partai yang seringkali lamban dan terjebak formalitas.

Kendali Berbasis Data: Sistem DASHBOARD (TOTAL)

Salah satu aspek paling revolusioner dari doktrin *Zero Mission* adalah penolakannya terhadap intuisi yang tidak ditopang oleh data. Doktrin ini secara tegas menegaskan bahwa "*Zero Mission* tidak dijalankan dengan perasaan, melainkan dengan data."¹ Pernyataan ini

menandai pergeseran paradigma penting: dari politik berbasis asumsi menuju politik berbasis evidensi.

Sebagai instrumen pengendali utama, PKS Jawa Timur mengembangkan Sistem Dashboard TOTAL (*Transformasi Digital*).¹² Sistem ini dirancang sebagai sebuah *menara pengawas (watchtower)* organisasi yang memungkinkan pimpinan wilayah membaca denyut nadi struktur secara presisi. Melalui Dashboard TOTAL, pergerakan struktur di setiap sudut Jawa Timur dapat dipantau secara *real time*¹³, sehingga daerah-daerah yang mengalami stagnasi dapat segera terdeteksi, sementara wilayah yang progresif dapat dijadikan model replikasi.

Selain fungsi pemantauan, sistem ini juga menghadirkan transparansi kinerja yang belum pernah ada sebelumnya. Klaim sepihak tidak lagi memiliki ruang. Capaian setiap bidang dan wilayah tersaji secara terbuka, menciptakan iklim kompetisi yang sehat—*fastabiqul khairat*¹⁴—sekaligus memudahkan pimpinan memberikan intervensi strategis bagi daerah yang tertinggal[1]. Dengan demikian, TOTAL bukan sekadar alat digital, melainkan tulang punggung manajemen kinerja partai berbasis data.

Dimensi Personal *Zero Mission*

Pada level individu kader, *Zero Mission* diterjemahkan sebagai panggilan jiwa seorang pejuang. Doktrin ini tidak berhenti pada sistem dan struktur, tetapi menuntut transformasi personal yang tercermin dalam tiga sikap mental utama.

Pertama, *amanah tanpa menolak*. Setiap kader dituntut memiliki kesiapan penuh untuk ditempatkan di posisi apa pun—baik di wilayah basah maupun kering, di medan strategis maupun taktis—tanpa syarat dan tanpa seleksi kenyamanan.

¹² Dalam sistem manajemen informasi, *dashboard* adalah antarmuka visual yang menampilkan metrik kinerja utama (*Key Performance Indicators - KPI*) secara ringkas dan *real-time* untuk membantu pengambilan keputusan cepat.

¹³ Waktu nyata. Pemrosesan data yang terjadi seketika saat data dimasukkan, tanpa penundaan signifikan

¹⁴ Berlomba-lomba dalam kebaikan (QS. Al-Baqarah: 148).

Kedua, *disiplin tanpa tapi*. Kepatuhan terhadap agenda struktur dan *wasail tarbiyah* (sarana pembinaan) tidak dinegosiasikan, karena disiplin dipahami sebagai fondasi militansi kolektif.

Ketiga, *kesetiaan tanpa syarat*. Kader diikat oleh prinsip *amal jama'i* (kerja kolektif) dan soliditas barisan, menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan personal.¹

Ketiga sikap ini membentuk profil kader *Zero Mission* : militan, adaptif, dan siap berkorban.



KONSOLIDASI AKSELERASI: Suasana Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PKS Jawa Timur. Menyongsong kemenangan 2029 dengan strategi *Zero Mission*.

FILOSOFI KEPEMIMPINAN DAN KEPATUHAN SADAR (*Conscious Compliance*)¹⁵

Transformasi organisasi yang besar membutuhkan perekat yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam Buku Refleksi ini, PKS Jawa Timur memperkenalkan konsep *Kepatuhan Sadar* sebagai evolusi dari model ketaatan tradisional yang selama ini dikenal dalam partai kader.

Konstruksi Kepatuhan Sadar (*Conscious Compliance*)

Dalam partai kader berbasis ideologi, loyalitas adalah mata uang utama. Namun Bagus Prasetia Lelana menyadari bahwa di era keterbukaan informasi, loyalitas buta (*blind obedience*)¹⁶ memiliki batas kedaluwarsa. Kader yang terdidik, kritis, dan melek informasi membutuhkan rasionalisasi atas setiap instruksi yang diterima.

Kepatuhan Sadar didefinisikan sebagai disiplin organisasi yang lahir bukan dari koersi atau ketakutan struktural, melainkan dari internalisasi visi perjuangan. Konsep ini mensyaratkan dua prasyarat utama dari pimpinan: transparansi tujuan dan kejelasan strategi[1].

Buku ini memberikan ilustrasi yang sangat kontekstual. Ketika seorang Ketua DPC di pelosok desa diberi amanah merekrut anggota baru, ia tidak boleh memaknainya semata sebagai beban target angka. Ia harus memahami *big picture*: bagaimana rekrutmen di tingkat desa berkontribusi pada agregasi suara provinsi, yang kemudian dikonversi menjadi kursi parlemen, dan akhirnya digunakan untuk memperjuangkan kebijakan pro-rakyat. Ketika rantai sebab-akibat ini dipahami—*know the why*—maka pelaksanaan di lapangan—*the how*—akan dijalankan dengan presisi tinggi dan semangat misi suci, bukan sekadar menggugurkan kewajiban[1].

¹⁵ Kepatuhan yang didasari kesadaran dan pemahaman internal (*intrinsic motivation*), bukan karena paksaan eksternal (*coercion*) atau kepatuhan buta (*blind obedience*).

¹⁶ Kepatuhan buta. Mengerjakan perintah tanpa bertanya atau berpikir kritis.

Penyelarasan Frekuensi (*Frequency Alignment*)

Teori organisasi modern menegaskan bahwa organisasi yang lincah (*agile*) namun solid hanya dapat tumbuh jika seluruh elemennya berada pada frekuensi yang sama. Buku Refleksi ini menekankan pentingnya penyelarasan getaran visi antara seluruh struktur—dari DPTW hingga anak ranting—dengan Ketua DPW.

Tanpa frekuensi yang seragam, instruksi strategis dari tingkat wilayah berpotensi mengalami distorsi saat diturunkan ke bawah, yang pada akhirnya menciptakan inefisiensi fatal[1]. Dalam konteks ini, Buku Refleksi *Akselerasi Jawa Timur* berfungsi sebagai instrumen penyelaras frekuensi, memastikan keseragaman bahasa, nada, dan arah gerak seluruh kader.

Otoritas yang Melayani (*Servant Leadership*)

Otoritas kepemimpinan di era Bagus Prasetia Lelana tidak dibangun di atas hierarki feodal, melainkan di atas fondasi *servant leadership*¹⁷. Doktrin “*Pelayanan sebagai Panglima*” menjadi mantra utama dalam mendefinisikan ulang kekuasaan. Jabatan publik dan posisi struktural tidak dipandang sebagai simbol status, melainkan sebagai instrumen pelayanan.

Pendekatan ini memiliki implikasi sosiologis yang kuat di Jawa Timur. Budaya masyarakat Jawa Timur yang egaliter namun menghargai ketokohan (*nguwongke*)¹⁸ lebih merespons pemimpin yang hadir melayani (*caring leadership*) dibandingkan pemimpin yang memerintah dari kejauhan. Dengan menempatkan pelayanan sebagai panglima, PKS Jawa Timur sedang merebut hati rakyat melalui jalur kultural yang paling efektif dan berkelanjutan.

¹⁷ Teori Robert K. Greenleaf (1970). Pemimpin pelayan adalah pemimpin yang tujuan utamanya adalah melayani orang lain, bukan mengakumulasi kekuasaan.

¹⁸ Berasal dari kata dasar "uwong" (orang/manusia). *Nguwongke* secara harfiah berarti "mendorong orang" atau memanusiakan manusia. Ini adalah konsep etika Jawa yang tinggi tentang memberikan penghormatan penuh kepada eksistensi dan martabat orang lain, tanpa memandang status sosialnya

TIGA MESIN STRATEGIS (*The Three Strategic Engines*)

Untuk menerjemahkan visi besar menjadi kemenangan nyata, PKS Jawa Timur menetapkan tiga pilar utama yang disebut sebagai *Tiga Mesin Strategis*. Ketiga mesin ini dirancang untuk bekerja secara simultan dan saling terintegrasi. Ketimpangan pada salah satu mesin akan menghambat laju akselerasi partai secara keseluruhan[1]. Dalam kerangka ini, kemenangan politik dipahami bukan sebagai hasil kerja satu sektor semata, melainkan sebagai orkestrasi menyeluruh antara jiwa, tubuh, dan suara kekuasaan.



LAUTAN PATRIOT: Ribuan anggota Madya dan Sapu Jagat memadati arena Kemah Bela Negara (Kembara) PKS Jatim, 25 Agustus 2025. Militansi tanpa batas untuk menjaga NKRI dan melayani rakyat.

Mesin Pertama: Kader Militan (*The Soul*)

Kader adalah nyawa partai. Tanpa kader, struktur hanya akan menjadi bagan administratif yang kehilangan daya hidup. Karena itu, mesin pertama yang digerakkan adalah penguatan kader militan sebagai fondasi ideologis sekaligus operasional.

Kerja kader dijalankan melalui sebuah siklus yang disebut K2P2, yakni *Kader – Kaderisasi – Pelayanan Publik – Pemenangan Pemilu*. Siklus ini memastikan bahwa proses kaderisasi tidak berhenti di ruang-ruang pembinaan internal, tetapi bermuara pada pelayanan nyata kepada masyarakat dan berujung pada perolehan suara

elektoral[1]. Dengan demikian, militansi kader selalu diuji melalui keterlibatan sosial dan capaian politik yang terukur.

Kualitas kader tidak diukur dari retorika, melainkan dari produktivitas pembinaan. Ukuran utamanya adalah kemampuan membina umat melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA). Data menunjukkan adanya apresiasi tinggi terhadap kader dengan jumlah binaan besar—seperti figur Ibu Chomsiyah yang memiliki 112 binaan—yang menegaskan bahwa rekrutmen dan pembinaan kader merupakan indikator kinerja utama[9].

Untuk memperluas jangkauan gerakan, PKS Jawa Timur juga menyiapkan ribuan *Kader Pelopor* di setiap kabupaten dan kota. Mereka diposisikan sebagai pasukan pembuka wilayah yang bertugas menembus daerah-daerah kering dan membangun basis baru dari titik nol[10]. Kader pelopor inilah yang menjadi ujung tombak ekspansi teritorial partai.

Mesin Kedua: Struktur Partai yang Solid (*The Body*)

Jika kader adalah jiwa, maka struktur adalah tubuh yang menopang seluruh pergerakan. Tanpa struktur yang rapi dan utuh, energi kader tidak akan tersalurkan secara efektif.

Dalam Rencana Strategis (Renstra), struktur wilayah dipetakan ke dalam tiga kategori—Tipe A, B, dan C—berdasarkan tingkat kelengkapan. Tipe A sebagai kondisi ideal mensyaratkan keberadaan Fraksi DPRD Provinsi, kelengkapan DPD sebesar 100 persen, DPC 95 persen, serta DPRa minimal 75 persen [1].

Pada kondisi aktual tahun 2025, capaian struktur menunjukkan progres yang signifikan, namun masih menyisakan pekerjaan konsolidasi. DPC telah terbentuk sebesar 92 persen dari target 95 persen, DPRa mencapai 66 persen, dan kelengkapan struktur partai secara keseluruhan berada pada angka 97,67 persen[1]. Angka-angka ini menandakan bahwa fondasi organisasi telah kuat, tetapi fase akselerasi menuntut penyempurnaan hingga ke tingkat paling bawah.

Karena itu, penetrasi struktur tidak boleh berhenti di level kecamatan. Target strategisnya adalah menembus hingga desa dan

kelurahan melalui penguatan DPRa, sekaligus membentuk koordinator RW, RT, hingga TPS. Struktur yang solid dipahami sebagai pipa organisasi yang memastikan aspirasi rakyat dapat mengalir dan dikonversi secara efektif menjadi suara di kotak pemilu [1].

Mesin Ketiga: Anggota Legislatif (*The Voice & Power*)

Mesin ketiga adalah anggota legislatif (Aleg), yang berfungsi sebagai etalase sekaligus instrumen kekuasaan partai. Aleg tidak diposisikan semata sebagai wakil rakyat secara individual, melainkan sebagai perpanjangan suara dan kekuatan institusional PKS.

Setiap advokasi kebijakan, bantuan sosial, dan program aspirasi wajib diposisikan sebagai kontribusi PKS, bukan sebagai pencapaian personal. Doktrin ini menutup ruang bagi *individual glory* dan menegaskan bahwa kerja politik adalah kerja kolektif [1]. Dengan pendekatan ini, citra dan kepercayaan publik dibangun terhadap partai sebagai institusi, bukan hanya kepada figur tertentu.

Di tingkat provinsi, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur—yang kini telah kembali menjadi satu fraksi penuh—dituntut untuk bersikap proaktif dalam mengawal RPJMD serta isu-isu strategis rakyat. Fraksi tidak ditempatkan sebagai oposisi reaktif, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah provinsi yang berorientasi pada solusi dan keberpihakan public [1].

OPERASIONALISASI STRATEGI

Delapan Program Unggulan 2026

Sebagai manifestasi taktis dari visi “*Pelayanan sebagai Panglima*”, DPW PKS Jawa Timur meluncurkan delapan Program Unggulan untuk tahun 2026. Program-program ini dirancang untuk menyentuh beragam segmen demografis dan menjawab kebutuhan masyarakat secara spesifik, sekaligus menjadi instrumen nyata penguatan elektabilitas dan kehadiran sosial partai [1].

Tabel 2. Analisis Detail 8 Program Unggulan 2026

No	Nama Program	Akronim	Deskripsi & Target Sasaran Strategis	Analisis Dampak Politik
1	Rumah Keluarga Indonesia	RKI	Sasaran: Perempuan & Keluarga. Pusat pemberdayaan ekonomi, parenting, dan ketahanan keluarga. Di masa pemilu, RKI bertransformasi menjadi "Rumah Pemenangan"[8].	Mengunci basis suara <i>emak-emak</i> yang loyal dan militan. RKI menjadi titik kumpul sosial yang perlahan dikonversi menjadi sel politik.
2	Gerakan Ekonomi Mandiri	GEMA	Sasaran: UMKM & Masyarakat Bawah. Pemberian modal usaha (misal: gerobak mie ayam), pelatihan bisnis, dan akses pasar[13].	Menjawab isu perut dan ekonomi yang menjadi keresahan utama <i>grassroot</i> . Membuktikan PKS peduli kesejahteraan, bukan hanya agama.
3	Sekolah Kader	SAKTI	Sasaran: Pemuda & Kader Baru. Pendidikan	Mengikis stigma eksklusivisme. Mencetak kader

No	Nama Program	Akronim	Deskripsi & Target Sasaran Strategis	Analisis Dampak Politik
	Patriot Indonesia		karakter wawasan kebangsaan dan bela negara [13].	yang nasionalis-religius, siap diterjunkan sebagai patriot pembangunan.
4	JOIN PKS	JOIN PKS	Sasaran: Floating Mass & Gen Z. Pintu masuk rekrutmen eksternal yang inklusif, mudah, dan terbuka [12].	Menurunkan <i>barrier to entry</i> . Memudahkan orang yang sekadar ingin bergabung tanpa beban ideologis berat di awal.
5	Akademi Pemimpin Indonesia	API	Sasaran: Tokoh Potensial & Calon Pejabat. Inkubator kepemimpinan untuk menyiapkan calon legislatif dan eksekutif berkualitas [9].	Menjawab tantangan "Mapping Potential" dalam <i>Zero Mission</i> . Memastikan PKS tidak kehabisan stok pemimpin publik.
6	Transformasi Digital PKS	TOTAL	Sasaran: Internal Organisasi. Digitalisasi sistem keanggotaan (KTA), database, dan dashboard monitoring kinerja [17].	Tulang punggung "Smart Party". Menjamin akurasi data untuk pengambilan keputusan strategis (<i>Data-Driven Politics</i>).
7	Advokasi Kebijakan untuk Rakyat	AKAR	Sasaran: Konstituen. Kanal resmi penyaluran aspirasi rakyat ke fraksi DPRD untuk diperjuangkan menjadi kebijakan [17].	Memastikan legislator bekerja berbasis aspirasi riil. Memperkuat <i>bonding</i> antara wakil rakyat dan pemilihnya.

No	Nama Program	Akronim	Deskripsi & Target Sasaran Strategis	Analisis Dampak Politik
8	Jaring Wakil Rakyat	JAWARA	Sasaran: Jejaring Suara. Penguatan jaringan relasi antara legislator dengan simpul-simpul massa di dapil masing-masing [18].	Merawat basis konstituen agar tidak lari. Menjaga suhu politik tetap hangat sepanjang periode, bukan hanya saat kampanye.

Analisis terhadap kedelapan program unggulan menunjukkan pendekatan yang bersifat holistik dan saling melengkapi. Program RKI dan GEMA bekerja pada level basis sosial-ekonomi dengan fokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, SAKTI dan API bergerak di level sumber daya manusia melalui kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan. Program TOTAL beroperasi pada level sistem dengan menata manajemen dan tata kelola organisasi berbasis data. Adapun JOIN PKS, AKAR, dan JAWARA diarahkan pada level ekspansi politik dan elektoral. Keseluruhan program ini membentuk sebuah ekosistem pemenangan yang tertutup, terintegrasi, dan saling menguatkan, di mana setiap elemen berperan sebagai pengungkit bagi elemen lainnya.



MENGOKOHKAN STRATEGI: Ketua DPW PKS Jatim Bersama Sekjend PKS, Muhammad Kholid, dalam Agenda Rakernas.

PETA JALAN MENUJU 2029

Renstra dan Hegemoni Pilkada

Puncak dari seluruh rancangan strategis ini bermuara pada target kemenangan politik di tahun 2029. PKS Jawa Timur tidak lagi bersikap defensif atau setengah hati dalam menetapkan sasaran. Rencana Strategis (Renstra) serta arahan Ketua DPW secara eksplisit menyebutkan target-target kuantitatif yang harus dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan.



JATIM SOLID: Ketua DPW PKS Jatim bersama Presiden PKS dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PKS Jawa Timur.

Renstra 2026: Fase Akselerasi

Tahun 2026 dicanangkan sebagai fase akselerasi penuh. Setelah melalui tahapan konsolidasi pasca-Muswil, mesin partai dipacu untuk melakukan ekspansi secara agresif dan terukur.

Fokus utama diarahkan pada penguatan basis teritorial hingga tingkat RT dan RW, serta ekspansi rekrutmen ke segmen pemilih muda—khususnya Generasi Z—dan komunitas-komunitas berbasis minat dan hobi [1].

Dalam menyasar pemilih muda, PKS Jawa Timur memilih pendekatan pragmatis-rasional. Narasi ideologis yang kaku digantikan

dengan program-program aplikatif seperti “JOIN PKS”, pelatihan keterampilan digital, dan penguatan kapasitas ekonomi kreatif. Strategi ini dirancang untuk menjangkau anak muda yang lebih responsif terhadap solusi konkret dibandingkan jargon politik normatif [1].

Target Legislatif: Menembus “Dua Digit”

Target elektoral legislatif ditetapkan secara tegas pada angka “dua digit”, yakni di atas 10 persen secara rata-rata provinsi [1].

Secara strategis, angka 10 persen dipahami sebagai ambang batas psikologis yang menandai transformasi PKS dari partai papan tengah menjadi *major player* dalam konstelasi politik Jawa Timur. Melampaui ambang ini berarti peningkatan daya tawar politik, baik dalam pembentukan koalisi maupun dalam perumusan kebijakan.

Di daerah-daerah dengan basis suara kuat, target bahkan didorong lebih agresif. Di Kabupaten Magetan, misalnya, target ditetapkan hingga 17 persen atau setara dengan tujuh kursi DPRD. Strategi ini mencerminkan pendekatan pemaksimalan lumbung suara sebagai jangkar kemenangan provinsi [1].

Strategi Pilkada: Kemandirian Politik dan Target 15 Daerah

Pergeseran strategi paling signifikan terlihat pada pendekatan Pilkada. Dengan memanfaatkan momentum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, PKS Jawa Timur merancang skenario *Kemandirian Politik* [1].

Putusan MK tersebut menurunkan syarat pencalonan dari berbasis 20 persen kursi DPRD menjadi berbasis persentase suara sah, yakni antara 6,5 hingga 10 persen. Dengan basis suara PKS yang relatif stabil di banyak daerah—sering kali berada di atas 7 persen—partai ini kini memiliki “tiket emas” untuk mengajukan calon kepala daerah secara mandiri, tanpa harus terjebak dalam koalisi transaksional dengan partai-partai besar.

Secara konkret, PKS Jawa Timur menargetkan kemenangan di 10 hingga 15 kabupaten/kota dengan mengukung kader internal sendiri, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah [1].

Untuk mencapai target tersebut, DPW mulai menerapkan mekanisme “audisi” dan investasi sosial terhadap tokoh-tokoh kader potensial sejak dini. Proses *personal branding* calon dimulai sejak Renstra 2026, sehingga partai dapat menghindari praktik “calon dadakan” yang selama ini kerap melemahkan kesiapan elektoral.



2029 TEMBUS DUA DIGIT: Pimpinan DPTW PKS Jawa Timur bersama anggota legislatif DPR RI dr. Gamal.

Dampak jangka panjang dari strategi ini sangat signifikan. Apabila target tersebut tercapai, PKS akan menguasai eksekutif di hampir sepertiga wilayah Jawa Timur. Akses terhadap sumber daya birokrasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menjadi modal logistik dan politik yang besar untuk menghadapi Pemilu Nasional 2034.

Buku ini merupakan sebuah *blueprint* transformasi yang komprehensif, ambisius, namun tetap terukur. Di bawah kepemimpinan Bagus Prasetya Lelana, PKS Jawa Timur tengah bermetamorfosis dari sekadar partai kader ideologis menjadi partai

modern yang berbasis data, berorientasi pelayanan, dan siap merebut kekuasaan eksekutif.

Kunci keberhasilan strategi ini terletak pada konsistensi implementasi doktrin *Zero Mission* untuk menjaga militansi kader, serta kecerdasan dalam memainkan delapan Program Unggulan guna merebut hati rakyat. Dengan memanfaatkan celah strategis Putusan MK dalam Pilkada, PKS Jawa Timur tidak lagi menempatkan diri sebagai *follower*, melainkan bertekad menjadi *trendsetter* dalam lanskap politik Jawa Timur menuju 2029.

“Semangat *Zero Mission*” dan “Militansi Tanpa Batas” tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjelma menjadi kode etik operasional untuk menaklukkan Gerbang Baru Nusantara.

Referensi

1. DPW PKS Jawa Timur, *Bab 1 Buku DPW PKS Jatim*, dokumen PDF.
2. Kang Ekki, *Kisah Relawan Tsunami Aceh*, YouTube video. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=WhhrgMcfkGM> [Accessed: Dec. 24, 2025].
3. iNews Portal Aceh, *Sosok Inspiratif! Kisah Relawan Tsunami Aceh, Kini Duduki Jabatan Plt Kadis DKP Pidie Jaya*, [Online]. Available: <https://portalaceh.inews.id/read/229716/sosok-inspiratif-kisah-relawan-tsunami-aceh-kini-duduki-jabatan-plt-kadis-dkp-pidie-jaya> [Accessed: Dec. 24, 2025].
4. Jakarta News, *Prabowo Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Turki dan Suriah*, Feb. 21, 2023. [Online]. Available: <https://jakartanews.id/2023/02/21/prabowo-dampingi-jokowi-lepas-bantuan-kemanusiaan-untuk-turki-dan-suriah/> [Accessed: Dec. 24, 2025].
5. YouTube video. *Kisah Haru Relawan Indonesia bagi Korban Gempa Turki*,. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=Mz3umkKrrJQ>. [Accessed: Dec. 24, 2025].
6. Blog PKS, *Menyulam Jalan Pengabdian: Kiprah Pak Bagus Prasetya Lelana dari Panggung Dakwah hingga Kemanusiaan*, Aug. 2025. [Online]. Available:

- <https://blog.pks.id/2025/08/menyulam-jalan-pengabdian-kiprah-pak.html> [Accessed: Dec. 24, 2025].
7. PKS Jawa Timur, *Launching 1040 RKI PKS Jadi Rumah Pemenangan Khofifah–Emil*, [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/launching-1040-rki-pks-jadi-rumah-pemenangan-khofifah-emil-ketua-pks-jatim-penggerak-rki-siap-all-out-menangkan/> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 8. PKS Jawa Timur, *Ayo Bergerak! RAKERDA PKS Jatim: Kunci Konsolidasi dan Jalan Menuju Kemenangan*, [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/ayobergerak-rakerda-pks-jatim-kunci-konsolidasi-dan-jalan-menuju-kemenangan/> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 9. Seputar Jatim, *PKS Magetan Targetkan 7 Kursi DPRD dan Pimpinan, Kokohkan Barisan Lewat Delapan Program Unggulan 2026*, [Online]. Available: <https://seputarjatim.co.id/pks-magetan-targetkan-7-kursi-dprd-dan-pimpinan-kokohkan-barisan-lewat-delapan-program-unggulan-2026/> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 10. PKS Jawa Timur, *Bagus Prasetia Apresiasi Kepengurusan PKS Jatim Periode Lalu: Telah Letakkan Pondasi Kuat*, [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/bagus-prasetia-apresiasi-kepengurusan-pks-jatim-periode-lalu-telah-letakkan-pondasi-kuat/> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 11. PKS Sumatera Utara, *PKS Sumut Siap Tancap Gas dengan 8 Program Unggulan*, [Online]. Available: <https://sumut.pks.id/pks-sumut-siap-tancap-gas-dengan-8-program-unggulan> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 12. Fokus Borneo, *Dibekali 8 Program Unggulan, PKS Tarakan Diminta Presiden Almuzamil Wujudkan Kerja Nyata dan Berdampak*, Dec. 7, 2025. [Online]. Available: <https://fokusborneo.com/politik/2025/12/07/dibekali-8-program-unggulan-pks-tarakan-diminta-presiden-almuzamil-wujudkan-kerja-nyata-dan-berdampak/> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 13. Warta Lampung, *PKS Bandar Lampung Luncurkan Gerakan Ekonomi Mandiri*, [Online]. Available: <https://www.wartalampung.id/pks-bandar-lampung-luncurkan-gerakan-ekonomi-mandiri.html> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 14. PKS Magetan, *RAKERDA PKS Magetan 2025 Tegaskan K2P2 sebagai Arah Perjuangan*, Dec. 2025. [Online]. Available:

- <https://magetan.pks.id/2025/12/rakerda-pks-magetan-2025-tegaskan-k2p2.html> [Accessed: Dec. 24, 2025].
15. Terkininews, *PKS Kepri Fokus Perkuat Keluarga Lewat Program Rumah Keluarga Indonesia*, Nov. 14, 2025. [Online]. Available: [https://terkininews.com/2025/11/14/PKS -Kepri-Fokus-Perkuat-Keluarga-Lewat-Program-Rumah-Keluarga-Indonesia.html](https://terkininews.com/2025/11/14/PKS-Kepri-Fokus-Perkuat-Keluarga-Lewat-Program-Rumah-Keluarga-Indonesia.html) [Accessed: Dec. 24, 2025].
 16. PKS Kota Serang, *Renstra DPP PKS 2025–2030 dan Urgensi Konteks Kota Serang*, Dec. 2025. [Online]. Available: <https://serang.pks.id/2025/12/renstra-dpp-pks-20252030-dan-urgensi.html> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 17. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Blueprint for Digital Transformation in Banking*, Jakarta: OJK, 2021. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-DigitalPerbankan/BUEPRINT%20FOR%20DIGITAL%20TRANSFORMATION%20IN%20BANKING.pdf> [Accessed: Dec. 24, 2025].
 18. FPKS Kota Semarang, *Tak Main-main! PKS Kota Semarang Pasang Target Tinggi 18% Suara, Begini Strateginya*, Dec. 23, 2025. [Online]. Available: <https://fpkskotasemarang.id/2025/12/23/tak-main-main-pks-kota-semarang-pasang-target-tinggi-18-suara-begini-strateginya/> [Accessed: Dec. 24, 2025].

BAB II
FILOSOFI GERAKAN
(KADER & STRUKTUR)

SIAGA, BERANI, SETIA

Tri-Dharma Karakter Anggota PKS Jawa Timur

Semboyan “Siaga, Berani, Setia” bukanlah sekadar rangkaian kata atau slogan seremonial. Ia adalah filosofi hidup dan kerangka karakter, yang dirancang untuk membentuk pribadi pejuang yang kokoh—laksana fondasi bangunan yang mampu bertahan dari terpaan badai zaman. Ketiganya menyatu sebagai satu kesadaran utuh: kesiapan berpikir, keberanian bertindak, dan kesetiaan menjaga amanah.

Semboyan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur, H. Bagus Prasetya Lelana, dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Kantor DPW PKS Jawa Timur. Sejak saat itu, “Siaga, Berani, Setia” terus digaungkan dalam berbagai forum DPW maupun DPD sebagai penyemangat sekaligus pengingat karakter dasar yang harus dimiliki setiap anggota PKS Jawa Timur dalam menjalankan amanah perjuangan, khususnya dalam kerangka kerja K2P2 sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Nasional.



SIAGA BENCANA: Prosesi pengukuhan Satgas Penanggulangan Bencana DPW PKS Jatim. Simbol transformasi militansi kader menjadi pelayanan kemanusiaan yang sigap dan profesional.

1. Siaga: Ketajaman Pikiran dan Kesiapan Diri

Dalam Islam, kesiagaan adalah wujud kehati-hatian dan kesungguhan dalam mempersiapkan diri. Seorang mukmin diperintahkan untuk tidak lalai dan selalu waspada.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersiap siagalah kamu...” (QS. An-Nisa: 71)

Seorang ulama terkemuka pernah berpesan, *“Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia.”* Pesan ini menegaskan bahwa seorang pejuang harus senantiasa siaga dalam mengelola waktu dan keadaan, karena amanah yang dipikul jauh lebih besar daripada kenyamanan pribadi.

Siaga bukanlah kecemasan, melainkan kesiapan. Ia adalah manifestasi dari kewaspadaan yang tenang—pikiran yang jernih, mata yang terbuka terhadap perubahan, dan hati yang peka membaca tanda-tanda zaman. Orang yang siaga senantiasa membekali diri dengan ilmu dan perencanaan, sehingga tidak mudah terkejut oleh situasi apa pun. Secara fisik, ia siap bertindak tepat waktu dan tepat sasaran; secara batin, ia selalu “terjaga” sebelum fajar menyingsing.

Siaga berarti berada satu langkah di depan tantangan, bukan karena mendahului takdir, melainkan karena menghormati waktu dan tanggung jawab. Dalam konteks organisasi, siaga bermakna kesiapan ditempatkan di mana saja, menerima amanah tanpa menolak, serta menjalankan disiplin tanpa tapi. Kehadiran tepat waktu dalam agenda struktur adalah wujud nyata dari sikap siaga dan kepatuhan kader.

2. Berani: Keteguhan Hati dalam Membela Kebenaran

Keberanian sejati bukan bersumber dari kekuatan fisik, melainkan dari ketauhidan yang kokoh, yang menjadikan seseorang hanya takut kepada Allah semata. Rasulullah SAW bersabda:

“Jihad yang paling utama adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Ini adalah puncak keberanian moral. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menasihati, *“Seluruh makhluk itu lemah. Jangan gantungkan harapanmu kepada mereka dan jangan pula takut kepada mereka.”*

Kembalikanlah seluruh urusan hanya kepada Allah.” Dari sinilah keberanian sejati berakar.”

Berani bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk melampaui rasa takut demi kebenaran dan tujuan yang mulia. Ia tercermin dalam keberanian mengambil keputusan sulit meski tidak populer, keberanian mengakui kesalahan, serta ketangguhan menghadapi risiko demi melindungi nilai yang diyakini.

Keberanian tanpa kesiagaan akan berubah menjadi kecerobohan. Namun ketika keberanian berpadu dengan kesiapan, ia menjelma menjadi kekuatan yang terukur, efektif, dan bermartabat. Jika siaga adalah persiapan, maka berani adalah aksi nyata—energi yang mengubah niat menjadi kenyataan, melangkah ke dalam ketidakpastian dengan kepala tegak dan hati yang jernih.

3. Setia: Keteguhan Janji dan Integritas Amanah

Kesetiaan adalah mahkota dari seluruh karakter. Tanpanya, iman dan perjuangan kehilangan makna. Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu.”
(QS. Al-Ma’idah: 1)

Rasulullah SAW menegaskan, *“Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji.”* (HR. Ahmad). Imam Syafi’i pun mengingatkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang tetap setia saat kesulitan, bukan hanya ketika keadaan lapang.

Setia adalah jangkar perjuangan—keteguhan untuk tetap berdiri saat suasana tidak lagi nyaman. Ia mencakup integritas dan loyalitas kepada prinsip, organisasi, dan amanah yang diemban. Kesetiaan mengandung keteguhan yang tidak mudah goyah oleh iming-iming maupun tekanan, serta ketulusan pengabdian tanpa pamrih.

Setia berarti tetap berada di dalam kapal saat badai menerpa, bukan hanya saat laut tenang dan pelangi terlihat. Kesetiaan tanpa syarat inilah yang menjaga soliditas PKS Jawa Timur dan memastikan perjuangan berjalan dalam satu barisan.

Penutup: Satu Tarikan Napas Perjuangan

Ketiga nilai ini saling mengunci dan menguatkan. Tanpa siaga, keberanian menjadi buta. Tanpa berani, kesetiaan berubah menjadi pasif. Tanpa setia, kesiagaan dan keberanian berpotensi disalahgunakan. Karena itu, “Siaga, Berani, Setia” adalah satu tarikan napas perjuangan: siaga membaca peluang dan ancaman, berani mengambil tindakan, dan setia memastikan langkah tidak menyimpang dari tujuan mulia.

Anggota PKS Jawa Timur yang memegang teguh Tri-Dharma ini diharapkan menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam kegelapan dan menginspirasi dalam terang—pelindung yang waspada, pejuang yang tangguh, dan sahabat yang tak berkhianat. Inilah yang diharapkan Ketua DPW PKS Jawa Timur: agar setiap anggota menjadi mercusuar bagi lingkungannya, menghadirkan rasa aman dan memberi arah bagi sesama.

Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang sering diingatkan para ulama:

“Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib”—sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya kewajiban, maka ia menjadi wajib. Maka, memiliki karakter Siaga, Berani, dan Setia adalah kewajiban moral setiap anggota PKS Jawa Timur sebagai modal utama dalam ikhtiar menjemput kemenangan yang bermartabat.

STRATEGI AKSELERASI PERANGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA JAWA TIMUR

Arsitektur Kaderisasi PKS Menuju Kemenangan 2029

Jawa Timur merupakan salah satu episentrum politik nasional dengan karakter sosiokultural yang khas. Perpaduan antara religiositas pesantren, tradisi keislaman yang kuat, serta dinamika masyarakat urban dan industrial menciptakan medan dakwah dan perjuangan politik yang kompleks, namun sangat prospektif. Dalam konteks inilah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menempatkan pendidikan anggota sebagai poros utama akselerasi perjuangan menuju kemenangan 2029.



AKSELERASI MESIN KADERISASI: Presiden PKS bersama DPTW PKS Jatim dan DPTD PKS dari 38 Kabupaten dan Kota se Jawa Timur.

PKS Jawa Timur tidak lagi bergerak dengan pola rutinitas organisasi semata. Memasuki fase akselerasi, partai melakukan lompatan strategis melalui penguatan dan rekonstruksi perangkat pendidikan anggota. Langkah ini merupakan jawaban atas kebutuhan transformasi PKS menjadi organisasi politik yang modern, terbuka, dan inklusif, tanpa tercerabut dari akar spiritualitas yang menjadi identitas dasarnya. Pendidikan kader tidak lagi diposisikan sebagai

aktivitas pendukung, melainkan sebagai arsitektur utama pemenangan elektoral dan pembangunan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Paradigma Baru: *Zero Mission* dan Militansi Tanpa Batas

Keberhasilan sebuah gerakan politik sangat ditentukan oleh kejernihan visi dan militansi para penggeraknya. Dalam kepemimpinan periode ini, PKS Jawa Timur memperkenalkan filosofi *Zero Mission* sebagai standar mutu tertinggi (ihsan) dalam berorganisasi. *Zero Mission* bukan sekadar jargon, melainkan komitmen teknis dan kultural untuk menghapus inefisiensi, meminimalkan kesalahan, serta memastikan setiap program memiliki dampak yang terukur dan relevan.

Zero Mission mengajak seluruh kader untuk memulai kembali dari “titik nol”: meninggalkan kebiasaan lama yang tidak produktif, melakukan pembaruan cara berpikir, dan bekerja dengan orientasi hasil yang jelas. Di dalamnya tertanam semangat zero error, bukan dalam arti kaku dan birokratis, melainkan ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab penuh atas setiap amanah yang diemban.

Militansi tanpa batas di Jawa Timur diterjemahkan melalui tiga pilar karakter: Siaga, Berani, dan Setia. Pilar *Siaga* menuntut kesiapan kader menerima amanah struktural kapan pun dibutuhkan. Pilar *Berani* menegaskan keberanian mengambil risiko politik di lapangan, terutama dalam advokasi publik dan penetrasi basis massa baru. Sementara itu, pilar *Setia* menjadi fondasi loyalitas terhadap garis perjuangan partai, yang menjaga soliditas barisan di tengah tekanan eksternal dan dinamika internal.

Dengan paradigma ini, seluruh wasilah tarbiyah tidak lagi dipahami sebagai kegiatan edukatif semata, melainkan sebagai kawah candradimuka untuk mencetak kader pejuang yang tangguh secara spiritual, matang secara intelektual, dan efektif secara politik.

Transformasi Unit Pembinaan Anggota (UPA): Dari Sel UPA ke Unit Taktis Pemenangan

Unit Pembinaan Anggota (UPA) merupakan jantung sistem kaderisasi PKS. Secara historis, UPA berfungsi sebagai ruang pembinaan ruhiyah dan keilmuan. Namun, menuju 2029, UPA di Jawa Timur mengalami transformasi strategis menjadi unit taktis-fungsional pemenangan.

UPA tidak hanya membina iman dan pemahaman kader, tetapi juga menjadi unit terkecil yang memiliki kesadaran teritorial, kepekaan sosial, dan kemampuan advokasi di tingkat basis. Setiap UPA—yang terdiri dari 5 hingga 9 orang—dibekali dengan kapasitas manajerial untuk menjalankan instruksi partai secara cepat dan tepat, serta membaca dinamika sosial di lingkungan terdekatnya.

Agenda mingguan UPA tetap menjaga pilar-pilar utama seperti tilawah Al-Qur'an, penguatan ruhiyah, dan arahan pembina. Namun, agenda tersebut diperkaya dengan diskusi implementatif: evaluasi kerja lapangan, pemetaan persoalan warga, serta sinkronisasi program partai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, UPA menjelma sebagai mesin kaderisasi sekaligus mesin pelayanan dan pemenangan.

Target Pertumbuhan Kader: Menguatkan Hulu, Menjamin Hilir

Untuk memastikan keberlanjutan sistem ini, DPW PKS Jawa Timur menetapkan target strategis penambahan 800 pembina UPA baru pada tahun 2026. Langkah ini disiapkan untuk menopang target rekrutmen 34.000 anggota pendukung baru di seluruh Jawa Timur hingga 2029. Logika yang dibangun sangat jelas: penguatan hulu kaderisasi akan menentukan derasnya aliran hilir elektoral.

Perangkat Pendidikan Pendukung: Membentuk Kader Paripurna

Selain UPA, PKS Jawa Timur mengembangkan berbagai perangkat pendidikan pendukung yang dirancang untuk membentuk kader secara holistik—jasadiyah, fikriyah, dan ruhiyah.

Kemah Bela Negara (KEMBARA) menjadi laboratorium kedisiplinan dan ketahanan mental. Program ini melatih kader untuk taat pada pimpinan, kuat dalam kebersamaan, serta siap ditempatkan dalam kondisi lapangan yang berat, termasuk dalam penanganan bencana melalui Satgas Bencana. KEMBARA membangun daya tahan (endurance) kader agar tidak mudah rapuh menghadapi tekanan perjuangan.

Sementara itu, Daurah dan Pelatihan Tematik difokuskan pada peningkatan kapasitas intelektual dan kepemimpinan. Kurikulum daurah diarahkan pada penguasaan analisis politik, sosial, dan ekonomi, sehingga kader mampu berdialog dan menawarkan solusi kepada berbagai segmen masyarakat—dari akademisi hingga akar rumput.

Rekreasi dan Pelatihan Peningkatan Spiritual (PPS) melengkapi keseimbangan kader. Rekreasi memperkuat ukhuwah¹⁹ dan semangat kebersamaan, sedangkan PPS memperdalam hubungan vertikal dengan Allah SWT. Keduanya menjadi fondasi emosional dan spiritual agar soliditas organisasi tetap terjaga dalam jangka panjang.

Ihsan Terukur: Standar Kualitas Kader Berbasis Data

PKS Jawa Timur mengadopsi prinsip **Ihsan Terukur** sebagai sistem evaluasi kaderisasi berbasis data. Pendidikan kader tidak lagi dinilai secara subjektif, melainkan melalui indikator yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi.

Standar profil anggota mencakup akidah yang lurus, ibadah yang tertib, akhlak yang kokoh, kesehatan fisik, keluasan wawasan, disiplin diri, manajemen waktu, kerapian administrasi, kemandirian ekonomi, serta kebermanfaatan sosial. Kesepuluh karakter ini menjadi tolok ukur kualitas kader PKS Jawa Timur.

Indikator kuantitatif dipantau melalui sistem digital, mencakup tingkat kehadiran UPA, konsistensi amal harian, capaian Standar Kompetensi Anggota (SKA), serta kontribusi sosial dan dakwah di

¹⁹ Persaudaraan. Bisa *Ukhuwah Islamiyah* (sesama muslim), *Wathaniyah* (sesama bangsa), atau *Basyariyah* (sesama manusia).

lingkungan RT/RW. Dengan mekanisme ini, kaderisasi tidak lagi bersifat simbolik, melainkan berdampak nyata.

Digitalisasi Organisasi: Dashboard TOTAL sebagai Pusat Kendali

Sebagai bagian dari transformasi organisasi, PKS Jawa Timur mengembangkan Dashboard TOTAL (Transformasi, Opini, Teritorial, Advokasi, Literasi) sebagai pusat kendali berbasis data. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja struktur secara real-time, menciptakan transparansi, dan mendorong budaya *fastabiqul khairat* antarwilayah.

Melalui Dashboard TOTAL, setiap DPD dapat melihat rapor kerjanya, mengukur capaian terhadap target Rakerwil dan Rakerda, serta melakukan koreksi cepat jika terjadi deviasi. Inilah wujud organisasi modern yang belajar dari data, bukan sekadar intuisi.

Penutup: Pendidikan Anggota sebagai Mesin Kemenangan

Akselerasi PKS Jawa Timur menuju 2029 adalah sebuah orkestrasi besar yang menempatkan **pendidikan anggota sebagai mesin penggerak utama**. Integrasi nilai-nilai spiritual dengan manajemen modern berbasis data menjadi kunci untuk memenangkan hati rakyat Jawa Timur.

Transformasi UPA, penerapan Ihsan Terukur, digitalisasi melalui Dashboard TOTAL, serta pendekatan khusus bagi Generasi Z memastikan PKS Jawa Timur siap tidak hanya secara kuantitas, tetapi unggul secara kualitas. Kemenangan 2029 bukan semata angka di kotak suara, melainkan kemenangan nilai—ketika kader PKS hadir sebagai solusi nyata dan menjadi bagian integral dari kemajuan masyarakat Jawa Timur.

Dengan semangat *Zero Mission* dan militansi tanpa batas, seluruh struktur dan kader PKS Jawa Timur melangkah pasti menuju terwujudnya Indonesia yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.

BAB III
STRATEGI "*ZERO MISSION*"
& DIGITALISASI

TURBULENSI POLITIK DAN URGENSI TRANSFORMASI ONTOLOGIS

Lanskap politik Jawa Timur pasca Pemilu 2024 dan Pilkada serentak menghadirkan sebuah paradoks strategis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di satu sisi, capaian elektoral menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Peningkatan jumlah kursi legislatif di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menjadi indikator awal bahwa mesin partai bekerja dan mengalami penguatan struktural.¹ Namun, di sisi lain, bayang-bayang stagnasi pertumbuhan—yang secara internal dikenal dengan istilah “Stagnasi 8 Persen”—masih menjadi tantangan laten yang harus diatasi apabila partai ingin menembus target ambisius dua digit, bahkan mencapai 15 persen pada Pemilu 2029 [2].

Angka delapan persen tersebut bukan sekadar statistik elektoral. Ia merepresentasikan batas psikologis dan sosiologis yang selama ini mengurung PKS dalam segmen pemilih ceruk (*niche market*), sekaligus menghambat transformasinya menjadi partai massa (*catch-all party*) yang dominan di provinsi terbesar kedua di Indonesia ini.

Pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur periode 2025–2030, yang berlangsung di tengah dinamika sosial-politik yang bergejolak pada pertengahan 2025, tidak dimaknai sekadar sebagai pergantian personel dalam struktur hierarkis organisasi. Momen ini secara sadar dirancang sebagai sebuah *temporal landmark*, yakni penanda waktu strategis untuk memicu momentum psikologis dan operasional yang baru. Dalam perspektif teori organisasi modern, pelantikan tersebut difungsikan sebagai titik demarkasi yang tegas antara “masa lalu yang bersifat inkremental” dan “masa depan yang bersifat eksponensial”.

Dalam konteks inilah, strategi *Zero Mission* hadir bukan sebagai jargon kampanye internal atau sekadar retorika penyemangat. Ia diposisikan sebagai doktrin organisasi yang bersifat radikal dan mendasar. Strategi ini menuntut restrukturisasi ontologis terhadap cara

organisasi berpikir, merencanakan, dan mengeksekusi program kerja. Pendekatan lama yang bersifat inkremental—di mana program kerja tahun berjalan pada dasarnya merupakan pengulangan program tahun sebelumnya dengan sedikit penyesuaian anggaran inflatoir—dipandang telah usang dan tidak lagi memadai untuk menghadapi turbulensi politik serta pergeseran demografi pemilih yang berlangsung cepat di Jawa Timur. Kebangkitan pemilih Generasi Z dan milenial, yang menuntut relevansi, kecepatan, dan dampak nyata, mempercepat urgensi perubahan ini [3].

Strategi *Zero Mission* secara tegas mewajibkan dekonstruksi total terhadap konsep “biaya tenggelam” (*sunk cost*)²⁰ dalam praktik politik. Dalam paradigma lama, investasi waktu, energi, dan dana pada metode kampanye tradisional yang terbukti tidak menghasilkan *yield* elektoral signifikan kerap tetap dipertahankan atas nama tradisi atau ketakutan terhadap perubahan. *Zero Mission* membalik logika tersebut. Setiap aktivitas yang tidak memiliki hubungan kausal yang jelas dengan peningkatan suara atau penguatan struktur harus dihentikan tanpa keraguan.

Di bawah kepemimpinan Bagus Prasetya Lelana sebagai Ketua DPW dan Muhamad Syadid sebagai Sekretaris, PKS Jawa Timur berupaya membangun organisasi yang bersifat *purpose-built*: sebuah mesin politik yang dirancang secara sadar untuk menang, melayani, dan memimpin, bukan sekadar organisasi yang hadir untuk menggugurkan kewajiban administratif dalam demokrasi elektoral.

²⁰ : Biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan kembali. Dalam pengambilan keputusan rasional, *sunk cost* seharusnya diabaikan, namun manusia sering terjebak "Sunk Cost Fallacy" (melanjutkan proyek gagal karena sudah keluar uang banyak).

LANDASAN FILOSOFIS DAN OPERASIONAL: ZERO-BASED TRANSFORMATION (ZBT)²¹

Inti dari strategi *Zero Mission* terletak pada adopsi prinsip *Zero-Based Transformation* (ZBT) ke dalam ekosistem partai politik. Secara konseptual, ZBT berbeda secara fundamental dari pendekatan perencanaan dan penganggaran tradisional (*incremental budgeting*). Jika pendekatan tradisional dimulai dengan pertanyaan, “Berapa anggaran tahun lalu dan berapa kenaikan yang dibutuhkan tahun depan?”, maka ZBT justru berangkat dari pertanyaan yang bersifat eksistensial: Mengapa kegiatan ini harus ada? Jika partai ini dibangun kembali dari nol hari ini, apakah program ini masih relevan untuk dijalankan? Apa dampak elektoral yang spesifik, terukur, dan langsung terhadap target kemenangan 2029? [5].

Dalam implementasinya di PKS Jawa Timur, filosofi ZBT menuntut setiap bidang—mulai dari Kaderisasi, Kepemudaan, hingga Pemenangan Pemilu—untuk menjustifikasi seluruh alokasi anggaran dan jam kerja kader dari titik nol. Tidak ada program “warisan” yang dianggap sakral atau kebal terhadap evaluasi. Program pengajian rutin atau bakti sosial, misalnya, tidak otomatis dilanjutkan hanya karena telah berlangsung bertahun-tahun. Program tersebut harus diaudit ulang dengan pisau analisis yang tajam: apakah jumlah pesertanya tumbuh secara signifikan, apakah peserta tersebut terkonversi menjadi anggota partai atau pemilih loyal, dan apakah dampaknya berkontribusi langsung pada penguatan struktur serta suara elektoral. Jika tidak, maka metode pelaksanaannya harus diubah secara radikal, atau program tersebut dihentikan demi mengalihkan sumber daya ke inisiatif yang lebih produktif [3].

²¹ ZBT adalah evolusi dari ZBB. Jika ZBB fokus pada keuangan, ZBT fokus pada redesain organisasi secara menyeluruh. McKinsey mendefinisikan ZBT sebagai pendekatan untuk meninjau ulang apa yang dilakukan organisasi dan bagaimana cara melakukannya, seringkali dengan memangkas aktivitas yang tidak memberi nilai tambah (*non-value added*).

Tabel 3. Perbandingan Paradigma Pengelolaan Organisasi: Model Tradisional dan *Zero Mission* (Zero-Based Transformation)

Dimensi Organisasi	Paradigma Tradisional (Status Quo)	Paradigma Zero Mission (ZBT)
Landasan Perencanaan	Berbasis sejarah tahun lalu (<i>Historical-based</i>); menambahkan persentase tertentu dari anggaran sebelumnya.	Berbasis masa depan (<i>Future-based</i>); memulai dari nol dan menjustifikasi kebutuhan berdasarkan target 2029.
Fokus Alokasi Sumber Daya	" <i>Fair share</i> " atau pembagian merata ke seluruh bidang agar semua "kebagian".	" <i>Strategic bets</i> " atau alokasi terkonsentrasi pada inisiatif yang memiliki <i>High ROI</i> elektoral dan dampak sosial terbesar.
Evaluasi Program	Berorientasi pada <i>Output</i> (terlaksananya kegiatan, jumlah peserta).	Berorientasi pada <i>Outcome & Impact</i> (konversi suara, perubahan persepsi publik, penambahan kader).
Sikap terhadap Inovasi	Inkremental; perbaikan kecil pada proses yang sudah ada.	Radikal; keberanian untuk menghapus proses lama dan menggantinya dengan model baru (misal: digitalisasi total).
Manajemen Biaya	Fokus pada pemotongan biaya (<i>cost cutting</i>) saat krisis.	Fokus pada optimalisasi biaya (<i>cost optimization</i>) untuk investasi strategis jangka panjang.

Filosofi “titik nol” ini juga berfungsi sebagai mekanisme *mental decluttering* bagi organisasi. Partai politik kerap terjebak dalam inersia struktural: kegagalan masa lalu melumpuhkan keberanian untuk

berinovasi, sementara keberhasilan kecil di masa lalu justru melahirkan rasa puas diri (*complacency*) yang menghambat adaptasi. Dengan memulai dari titik nol, PKS Jawa Timur memaksa seluruh organ organisasi untuk memandang lanskap politik sebagai kanvas kosong yang harus dilukis ulang menggunakan data terkini dan pembacaan realitas yang mutakhir, bukan dengan asumsi-asumsi lama yang mungkin telah kehilangan relevansi pasca-pandemi dan perubahan perilaku pemilih di era digital [5].

Dalam kerangka ini, pergeseran paradigma dari model tradisional menuju model *Zero Mission* tidak lagi ditampilkan dalam bentuk tabel perbandingan, melainkan diwujudkan secara operasional dalam cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengevaluasi seluruh aktivitas partai. Transformasi ini menandai peralihan dari budaya mempertahankan kebiasaan menuju budaya mempertanyakan relevansi, dari rutinitas menuju orientasi hasil, dan dari kenyamanan struktural menuju keberanian strategis.

Psikologi Perubahan Organisasi: *The Fresh Start Effect*

Strategi *Zero Mission* tidak berhenti pada ranah teknokratis dan manajerial semata. Ia menembus lapisan terdalam organisasi: wilayah psikologis sumber daya manusia partai. Dengan merujuk pada korpus riset Katherine Milkman tentang *The Fresh Start Effect*, momen pelantikan pengurus DPW dan DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) se-Jawa Timur pada pertengahan 2025 didesain secara sadar sebagai *temporal landmark*. Momen ini berfungsi memisahkan “diri lama” yang mungkin kurang efektif atau gagal mencapai target dari “diri baru” yang lebih disiplin, ambisius, dan sepenuhnya berorientasi pada kemenangan [3].

Fenomena psikologis ini dimanfaatkan untuk memutus mata rantai *political fatigue*—kelelahan politik—yang kerap menjangkiti struktur pasca maraton panjang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada serentak 2024. Dalam banyak kasus, kelelahan tersebut berujung pada kejenuhan (*burnout*), penurunan kinerja, dan melemahnya militansi kader. Dengan mendeklarasikan “Era *Zero*

Mission” dan “Peta Jalan Baru 2026”, pimpinan DPW secara sadar memberikan *psychological permission* kepada seluruh struktur: izin psikologis untuk melepaskan beban kegagalan masa lalu tanpa rasa bersalah yang berlarut-larut, dan memusatkan energi sepenuhnya pada peluang keberhasilan di masa depan [8].



DIGITAL NATIVE: KOMDIGI PKS Jatim mengutarakan gagasan dalam program Podcast bersama Gen Z.

Penerapan *Fresh Start Effect* di PKS Jawa Timur diwujudkan melalui tiga lapis transformasi yang saling terkait dan saling menguatkan. Pertama adalah **transformasi kognitif**, yakni penanaman pola pikir baru bahwa target dua digit—bahkan 15 persen—bukanlah kemustahilan jika cara kerja organisasi diubah secara total. Pada tahap ini, organisasi secara sadar menghapus *limiting beliefs* yang selama ini membatasi keberanian kader untuk berpikir besar dan melampaui ambang psikologis delapan persen [9].

Lapisan kedua adalah **transformasi operasional**. Organisasi mulai mengadopsi teknologi dan metode kerja baru—seperti Dashboard TOTAL dan SIMANTAP—yang sebelumnya mungkin dianggap terlalu rumit atau “bukan budaya kita”. Momentum *fresh start* membuat adopsi teknologi tersebut lebih mudah diterima karena

dilekatkan pada identitas baru pengurus dan struktur. Teknologi tidak lagi diposisikan sebagai beban, melainkan sebagai alat pembebas yang mempercepat kerja dan memperjelas arah[3].

Lapisan ketiga adalah **transformasi kultural**. PKS Jawa Timur mulai membangun budaya meritokrasi berbasis data (*data-driven meritocracy*), di mana kinerja tidak lagi diukur dari kedekatan emosional dengan pimpinan atau senioritas struktural, melainkan dari capaian riil yang terbaca secara objektif di dashboard kinerja. Budaya *ewuh pakewuh*²² yang selama ini menghambat evaluasi jujur secara perlahan digantikan oleh budaya akuntabilitas profesional[3].

Kerangka Teoretis Pendukung: *Network Governance* dan *Resource Mobilization*

Untuk mengoperasionalkan filosofi *Zero Mission* yang ambisius ini, Sekretariat DPW PKS Jawa Timur mengadopsi dua kerangka teoretis utama dari khazanah ilmu politik dan administrasi publik, yakni *Network Governance*²³ dan *Resource Mobilization Theory*.

***Network Governance* (Tata Kelola Jejaring)**

Mengacu pada pemikiran R.A.W. Rhodes, PKS Jawa Timur berupaya menggeser gaya kepemimpinan dari hierarki komando yang kaku (*vertical command*) menuju orkestrasi jejaring (*horizontal orchestration*). Dalam lanskap modern yang kompleks dan saling terhubung, partai politik tidak lagi efektif dikelola layaknya pabrik dengan rantai komando linier. Sekretaris DPW tidak semata berperan sebagai administrator pencatat surat-menyurat, melainkan sebagai *Chief Integrator* atau *Network Orchestrator* yang menjahit 20 bidang

²² Perasaan sungkan, segan, atau tidak enak hati yang berlebihan untuk menegur, menolak, atau berbeda pendapat dengan orang lain (terutama yang lebih tua/dihormati) demi menjaga harmoni sosial semu.

²³ Teori yang dikembangkan oleh R.A.W. Rhodes (1996) dalam artikelnya "*The New Governance*". Ia menjelaskan pergeseran dari pemerintahan hierarkis tradisional (*top-down*) menuju tata kelola yang melibatkan jaringan aktor yang saling bergantung (pemerintah, swasta, NGO).

fungsional, 38 DPD kabupaten/kota, serta ratusan anggota legislatif menjadi satu ekosistem gerakan yang kohesif[3].

Tantangan utama dalam *network governance* adalah mengelola *problem of many hands*—banyaknya aktor dengan tingkat otonomi berbeda—serta menjaga koherensi tindakan tanpa bergantung pada otoritas koersif yang berlebihan. Untuk itu, Sekretariat DPW membangun protokol komunikasi dan standar operasional yang memungkinkan desentralisasi pelaksanaan di daerah, namun tetap berada dalam satu komando strategis dan visi yang terpusat [12].

Resource Mobilization Theory (Teori Mobilisasi Sumber Daya)

Teori yang dikembangkan oleh Charles Tilly serta McCarthy dan Zald menegaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial dan politik tidak ditentukan semata oleh besarnya keresahan publik (*grievances*). Keresahan selalu ada. Faktor penentunya adalah kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber daya (*resources*)—baik yang bersifat material seperti dana, logistik, dan fasilitas, maupun non-material seperti legitimasi, jaringan sosial, dan waktu kader—untuk mengubah keresahan tersebut menjadi aksi politik yang efektif [3].

Dalam kerangka *Zero Mission*, teori ini diterjemahkan menjadi strategi agresif untuk mengonversi simpati publik menjadi aset organisasi. Program pelayanan rakyat tidak berhenti pada aksi karitatif semata, tetapi dirancang sebagai mekanisme *fundraising*, rekrutmen kader baru, serta pengumpulan dan pemutakhiran basis data (*database gathering*) yang menjadi modal strategis partai dalam jangka Panjang [3].

REKAM JEJAK KINERJA PASCA PELANTIKAN (THE TRACK RECORD)

Konsolidasi Struktur dan Orkestrasi Jejaring: Membangun Pondasi Baru

Pasca pelantikan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPD) se-Jawa Timur, mesin partai langsung dipacu dengan intensitas tinggi. Di bawah komando Ketua DPW Bagus Prasetya Lelana dan Sekretaris Muhamad Syadid, PKS Jawa Timur melakukan serangkaian langkah konsolidasi yang bersifat cepat, terukur, dan radikal. Tujuannya jelas: memastikan “mesin baru” ini tidak mengalami *overheat*, namun tetap mampu beroperasi pada level *high performance* sejak hari pertama[14].

Konsolidasi ini dirancang bukan sekadar untuk mengisi struktur, melainkan untuk membangun fondasi organisasi yang siap memasuki fase akselerasi. Kecepatan, ketepatan, dan orkestrasi antarelemen menjadi kata kunci dalam fase awal kepemimpinan baru ini.



TRANSFORMASI DIGITAL: Sekretaris DPW PKS Jatim, Muhamad Syadid, mengawal transformasi digital partai.

Dinamika Pelantikan dan Penataan DPD 38 Kabupaten/Kota

Proses pelantikan pengurus DPD di 38 kabupaten/kota menjadi manifestasi awal dari penerapan *Network Governance*. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang kerap memakan waktu berbulan-bulan, penetapan struktur kali ini dilakukan dengan tempo akseleratif. Pengumuman resmi kepengurusan dibacakan langsung oleh Sekretaris DPW melalui kanal digital resmi PKS Jawa Timur (YouTube PKS Jatim), menandai dimulainya era transparansi dan digitalisasi dalam tata kelola organisasi[14].

Pembentukan struktur DPD dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang demokratis sekaligus terukur. Aspirasi anggota diserap melalui sistem *e-voting*, kemudian dipadukan dengan proses verifikasi rekam jejak serta *fit and proper test*. Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yakni aspirasi anggota, jenjang keanggotaan, faktor usia sebagai bagian dari regenerasi, pengalaman struktural, serta pengalaman publik[14]. Pendekatan ini memastikan bahwa struktur yang terbentuk bukan hanya representatif, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan dan daya tahan organisasi.

Kecepatan eksekusi menjadi ciri menonjol dari fase ini. Dalam waktu kurang dari 30 hari pasca Musyawarah Wilayah (Muswil) VI, seluruh struktur inti DPD—meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Kaderisasi, Dewan Etik, dan Majelis Pertimbangan—di 38 kabupaten/kota telah terbentuk secara definitif[14]. Kecepatan ini dinilai krusial untuk menghindari *power vacuum* yang berpotensi melumpuhkan ritme kerja partai di daerah.

Dimensi simbolik pelantikan juga mendapat perhatian serius. Muswil VI yang digelar di Dyandra Convention Hall, Surabaya, dihadiri sedikitnya 700 pengurus dari seluruh Jawa Timur. Kehadiran tokoh-tokoh kunci, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran Forkopimda, memberikan legitimasi politik eksternal yang kuat bagi kepengurusan baru.¹⁶ Dalam pidatonya, Ketua DPW menegaskan komitmen “kontribusi yang lebih besar untuk Jawa Timur”, sebuah

pernyataan yang dapat dibaca sebagai kontrak sosial awal antara kepengurusan baru dan publik luas.

Musyawarah Daerah (Musda) VI: Efisiensi Berbasis *Zero-Based Budgeting*

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI di seluruh wilayah Jawa Timur dilakukan dengan format *hybrid*, memadukan pertemuan daring dan luring terbatas, serta dikemas dalam konsep yang sederhana.¹⁷ Pilihan ini tidak semata didorong oleh pertimbangan efisiensi anggaran—sejalan dengan prinsip *Zero-Based Budgeting*—tetapi juga merupakan respons empatik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan.

Penghapusan seremoni mewah dan atribut berlebihan menjadi wujud nyata dari *Zero Mission in Action*. Langkah ini menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan. Dana yang tersisa kemudian dialokasikan ulang secara langsung ke program pelayanan rakyat dan penguatan infrastruktur digital partai. Re-alokasi ini mencerminkan penerapan prinsip *Zero-Based Transformation (ZBT)*, yang menempatkan *outcome* dan dampak nyata di atas sekadar *output* seremonial [3].

Kesederhanaan Musda juga memuat pesan politik yang kuat. Ia mengirimkan sinyal kepada publik bahwa PKS adalah partai yang peka terhadap krisis (*crisis-sensitive*). Instruksi Presiden PKS untuk tidak mengundang tokoh eksternal di daerah-daerah rawan serta fokus pada konsolidasi internal menunjukkan kematangan organisasi dalam membaca situasi keamanan, psikologi massa, dan konteks sosial-politik local [17].

Transformasi Sekretariat: *The Engine Room of Zero Mission*

Jantung implementasi *Zero Mission* berdenyut di Sekretariat Umum DPW. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Muhammad Syadid, sekretariat mengalami reposisi peran yang fundamental. Ia tidak lagi berfungsi sebagai unit administratif pasif—sekadar “tukang ketik” atau pengelola surat-menyurat—melainkan bertransformasi menjadi

Strategic Operations Center yang mengendalikan ritme, arah, dan integrasi kerja organisasi [3].

Reposisi ini menjadikan sekretariat sebagai ruang kendali utama yang menjahit perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lintas bidang secara simultan.

Implementasi Kerangka Kerja I–O–O–I pada Wakil Sekretaris

Salah satu inovasi manajerial paling signifikan adalah perombakan struktur Wakil Sekretaris (Wasek) dengan pembagian tugas berbasis kerangka *Input–Output–Outcome–Impact* (I–O–O–I). Pendekatan ini dirancang untuk menghilangkan *bottleneck*²⁴ serta tumpang tindih kewenangan yang kerap muncul dalam organisasi yang bersifat birokratis [3].

Dengan kerangka ini, setiap Wasek tidak hanya bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada dampak nyata dari proses kerja yang dijalankan. Alur kerja menjadi lebih jernih, akuntabilitas meningkat, dan setiap aktivitas sekretariat dapat ditautkan secara langsung dengan tujuan strategis *Zero Mission* .

Tabel 4. Implementasi Peran Wasek Berbasis I-O-O-I

Peran & Fokus Strategis	Deskripsi Tugas (<i>Zero Mission</i>)	Capaian Kinerja Faktual 2025
Wasek 1: Arsitek Organisasi <i>(Organizational Architect)</i>	Memastikan fondasi organisasi kokoh. Fokus pada <i>coverage</i> struktur hingga Ranting (DPRa), literasi kader, dan keprotokolan pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi pemenuhan struktur DPC (Kecamatan) mencapai 95%. • Pemenuhan struktur DPRa (Desa/Kelurahan) mencapai 70% di zona merah.

²⁴ Leher botol. Titik penyempitan dalam sistem produksi atau alur kerja yang menghambat kapasitas keseluruhan sistem

Peran & Fokus Strategis	Deskripsi Tugas (<i>Zero Mission</i>)	Capaian Kinerja Faktual 2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran kurikulum Akademi Literasi Kader (ALKA) untuk standarisasi pemahaman kebijakan.³
<p>Wasek 2: Konduktor Transformasi <i>(Data & Money)</i></p>	<p>Manajemen berbasis data (<i>Data-Driven Decision Making</i>). Bertindak sebagai <i>Chief Data Officer</i> yang mengelola dashboard dan melakukan Money ketat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Partai) Tahap 1. • Operasionalisasi Dashboard Kinerja DPW yang memvisualisasikan KPI daerah secara <i>real-time</i>. • Audit kinerja triwulanan yang mengidentifikasi DPD <i>underperform</i>.³
<p>Wasek 3: Manajer Citra & Ops <i>(Operational Excellence)</i></p>	<p>Efisiensi operasional (<i>Low Cost High Impact</i>), digitalisasi logistik, dan manajemen citra eksternal melalui protokol tamu VIP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan standar "PANDU BAKU" kegiatan partai untuk menekan kebocoran anggaran dan standarisasi kualitas event. • Digitalisasi inventaris aset DPW untuk mencegah <i>asset loss</i>. • Manajemen protokol tamu VIP yang profesional.³

Budaya *Deep Work* dan Integrasi Eksekutif

Sekretaris DPW menerapkan disiplin *Deep Work*²⁵ dengan penjadwalan kerja yang ketat dan terstruktur dari Selasa hingga Jumat. Pola ini dirancang untuk memastikan bahwa waktu pimpinan tidak habis tersedot oleh urusan teknis-administratif, melainkan difokuskan sepenuhnya pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kinerja organisasi [3].

Setiap hari memiliki fokus tematik yang jelas. Hari Selasa diarahkan pada penguatan fondasi data dan narasi, dengan agenda utama berupa audit data *Key Performance Indicators* (KPI) bersama Wakil Sekretaris II serta finalisasi narasi kebijakan publik. Hari Rabu difokuskan pada pengelolaan jejaring dan akuntabilitas, khususnya tata kelola *Network Governance* dengan anggota legislatif serta pemantauan kinerja advokasi. Hari Kamis digunakan untuk audit operasional Wakil Sekretaris III sekaligus akselerasi penanganan daerah tertinggal yang masuk kategori Zona Merah dan Zona Kuning. Sementara itu, hari Jumat dimanfaatkan untuk rapat Badan Pengurus Harian (BPH) guna menyinkronkan kebijakan dan anggaran, disertai refleksi strategis mingguan.

Pola kerja ini berhasil menciptakan ritme organisasi yang *predictable* namun tetap *agile*. Waktu yang sebelumnya banyak terbuang dalam rapat-rapat seremonial yang minim dampak kini dapat dialihkan ke proses pengambilan keputusan yang lebih tajam dan berbasis data.

Implementasi Sistem Dashboard TOTAL: Menara Pengawas Digital

Salah satu terobosan teknologi paling signifikan dalam periode kepengurusan ini adalah pengoperasian penuh Dashboard TOTAL (*Transformasi, Opini, Teritorial, Advokasi, dan Literasi*) [3]. Sistem

²⁵ Istilah ini dikoin oleh Cal Newport, profesor ilmu komputer di Georgetown University. Dalam bukunya *Deep Work*, ia mendefinisikannya sebagai aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi bebas gangguan (*distraction-free concentration*) yang mendorong kemampuan kognitif hingga batasnya. Ini dipertentangkan dengan *Shallow Work* (kerja dangkal) yang bersifat logistik dan administratif.

ini berfungsi sebagai “menara pengawas” (*control tower*) yang memberikan visibilitas penuh (*full visibility*) terhadap kesehatan organisasi secara *real-time*.

Pada pilar Teritorial (T), dashboard menyajikan peta panas (*heatmap*) sebaran suara dan kader pelopor hingga ke level Tempat Pemungutan Suara (TPS). Informasi ini memungkinkan DPW mendeteksi secara presisi wilayah-wilayah yang belum tergarap optimal (*white spaces* atau *lahan tidur*) serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran. Integrasi data ini secara efektif memutus kebiasaan lama yang terlalu bergantung pada intuisi atau klaim sepihak pengurus daerah [3].

Pada pilar Opini (O), sistem mengintegrasikan pemantauan sentimen media sosial. Dalam kasus munculnya isu-isu lokal yang sensitif, dashboard secara otomatis memberikan notifikasi peringatan sentimen negatif (*negative sentiment alert*). Fitur ini memungkinkan Biro Humas melakukan *counter-narrative* atau mitigasi krisis secara lebih cepat, sebelum isu berkembang menjadi eskalasi yang merugikan citra partai.

Dashboard TOTAL juga menjadi instrumen transparansi dan meritokrasi. Kinerja DPD diperingkat secara terbuka berdasarkan KPI yang terukur, seperti jumlah rekrutmen, volume layanan publik, dan kecepatan merespons instruksi. Mekanisme ini memunculkan efek psikologis kompetisi sehat (*fastabiqul khairat*) antardaerah. DPD yang berada di zona merah pada dashboard terdorong untuk segera memperbaiki kinerjanya agar tidak tertinggal dan “terlihat” lemah di hadapan pimpinan wilayah [14].

Aksi Pelayanan dan Advokasi Berbasis Data: *Resource Mobilization in Action*

Bergerak dari pola lama berupa “bantuan sosial massal” yang kerap tidak tepat sasaran, PKS Jawa Timur di bawah strategi *Zero Mission* mulai mengimplementasikan pendekatan *advokasi presisi* yang terintegrasi dengan pengumpulan dan analisis data.

1. Respons Bencana dan Solidaritas Terukur

Penggalangan dana untuk penanganan bencana, seperti gempa di Sumatera dan Aceh, dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan melalui satu pintu rekening DPW. Kader serta anggota fraksi, termasuk di Bangkalan, menunjukkan solidaritas nyata melalui pemotongan gaji dan donasi langsung.

Aksi ini memiliki nilai strategis yang melampaui dimensi karitas. Ia berfungsi sebagai latihan mobilisasi sumber daya internal (*internal resource mobilization*). Kecepatan dan efektivitas pengumpulan dana—misalnya capaian Rp8 juta dari satu DPD dalam waktu singkat—menjadi indikator konkret tingkat militansi dan soliditas kader yang dapat diukur secara objektif.¹⁸

2. Kolaborasi Institusional: Membangun Legitimasi

Langkah silaturahmi (sowan) ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur serta penandatanganan pakta integritas layanan publik dengan pemerintah daerah—seperti di Surabaya terkait penerapan *restorative justice* dan sanksi sosial—menandai pergeseran strategis PKS. Dari partai yang kerap dipersepsikan eksklusif, PKS bergerak menuju citra sebagai partai kolaboratif [22].

Dalam kerangka *Network Governance*, PKS memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan terbesar, khususnya NU. Langkah ini krusial untuk menembus sekat-sekat sosiologis khas Jawa Timur sekaligus memperoleh legitimasi moral yang lebih luas. Kerja sama dengan Kejaksaan dalam penerapan sanksi sosial bagi pelanggar hukum juga menjadi inovasi kebijakan yang mencerminkan kepedulian PKS terhadap ketertiban sosial yang bersifat edukatif, bukan semata represif [23].

Kinerja Legislatif dan Fungsi Pengawasan

Fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur maupun DPRD kabupaten/kota diinstruksikan untuk tegak lurus pada narasi besar “Pembelaan Rakyat”. Prinsip ini menjadi benang merah yang menghubungkan kerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kinerja tersebut tercermin dalam capaian terukur. PKS Jawa Timur berhasil meraih dua penghargaan dalam Legislatif Award 2025, sebuah pengakuan eksternal atas kualitas kinerja wakil rakyatnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan [24].

Pada level substansi, fraksi aktif mengawal isu-isu strategis seperti kemandirian pangan dan energi dalam pembahasan RAPBD 2026, serta mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Fokus ini menunjukkan keberpihakan PKS pada persoalan-persoalan fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan sekadar isu simbolik atau identitas [25].

Disiplin anggota legislatif juga dijaga secara ketat. Kehadiran dan keaktifan Aleg dipantau melalui Dashboard TOTAL. Ketua DPW secara terbuka memberikan apresiasi kepada fraksi yang selalu hadir lengkap dalam rapat paripurna, menjadikan kedisiplinan sebagai nilai politik dan *selling point* partai di mata public [2].

EVALUASI KRITIS BERBASIS DATA (*CRITICAL EVALUATION*)

Meskipun rekam jejak kinerja yang dipaparkan pada Bab II menunjukkan progres yang signifikan dan menggembirakan, filosofi *Zero Mission* justru menuntut kejujuran brutal (*brutal honesty*) dalam melakukan evaluasi. Tidak ada ruang bagi budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) yang menutupi retakan struktural di balik cat kinerja yang tampak mengilap. Bab ini secara sengaja membedah kesenjangan (*gap*) antara idealisme strategi dan realitas lapangan, mengurai hambatan struktural, serta mengidentifikasi tantangan eksternal yang dihadapi dalam fase awal implementasi *Zero Mission* .



BRUTAL HONESTY: Evaluasi kinerja berbasis data. Tidak ada ruang bagi budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) yang menutupi retakan struktural di balik cat kinerja yang tampak mengilap.

Analisis *Gap* Implementasi *Zero Mission* : Antara Konsep dan Realitas

- **Jebakan “*Pseudo-Zero-Based*”**

Evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di sejumlah wilayah menyingkap gejala yang

dapat disebut sebagai “*Pseudo–Zero-Based*”,²⁶ yakni penerapan *Zero-Based Thinking* (ZBT) yang bersifat setengah hati.

Fenomena yang paling menonjol adalah praktik *rebranding* program. Sejumlah program kerja yang diajukan pada dasarnya merupakan program lama yang hanya diberi nama baru, tanpa perubahan substantif dalam metode pelaksanaan, segmentasi sasaran, maupun efisiensi biaya. Contohnya adalah kegiatan bertajuk “Konsolidasi Kader” yang pada praktiknya tidak berbeda dengan pertemuan rutin biasa, tanpa disertai target rekrutmen baru atau indikator dampak yang jelas.

Akar persoalan ini terletak pada belum terinternalisasinya prinsip ZBT hingga ke level akar rumput. Resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*) masih cukup kuat, terutama di kalangan kader senior atau pengurus lama yang telah lama merasa nyaman dengan pola kerja tradisional. Upaya untuk membersihkan *biaya tenggelam* (*sunk cost*) juga belum sepenuhnya tuntas. Di sejumlah daerah, anggaran masih tersedot untuk kegiatan seremonial internal yang minim dampak elektoral, semata-mata karena alasan “sudah tradisi”.

- **Kualitas versus Kuantitas Struktur**

Data Dashboard TOTAL menunjukkan bahwa capaian pemenuhan struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) secara kuantitatif telah mendekati 100 persen. Namun, audit kualitas yang dilakukan oleh tim Wakil Sekretaris I menampilkan gambaran yang jauh lebih bernuansa.

Di beberapa zona merah—khususnya wilayah basis non-tradisional PKS seperti kawasan Mataraman dan Tapal Kuda—struktur yang terbentuk sering kali hanya bersifat administratif. Pengurus yang tercatat secara *de jure* tidak selalu aktif secara *de*

²⁶ Gabungan awalan *pseudo-* (palsu/semu) dan *zero-based*. Merujuk pada praktik di mana organisasi mengklaim melakukan perubahan radikal, namun kenyataannya hanya mengganti nama program lama (*rebranding*) tanpa mengubah substansi.

facto. Aktivitas rekrutmen, pelayanan masyarakat, hingga rapat rutin kerap tidak berjalan. Struktur hadir sebagai “papan nama”, namun tidak berfungsi sebagai mesin politik yang hidup.

Masalah lain yang mengemuka adalah kesenjangan kompetensi digital. Terdapat *digital divide* yang cukup lebar antara pengurus DPW dan DPD di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo dengan pengurus di wilayah pedesaan. Ketidakmampuan, bahkan keengganan, sebagian pengurus daerah dalam menggunakan aplikasi SIMANTAP dan Dashboard TOTAL menyebabkan data dari wilayah-wilayah strategis sering kali kosong atau terlambat. Kondisi ini menciptakan *blind spot* data yang berbahaya bagi pengambilan keputusan strategis di tingkat wilayah [3].

Evaluasi Kepemimpinan dan Manajerial: Hambatan dalam Network Governance

- **Efektivitas Peran Sekretariat dan Rantai Komando**

Peran Sekretaris DPW sebagai *Chief Operating Officer* (COO) sekaligus *Chief Integrator* telah berjalan relatif baik pada level konseptual dan kebijakan strategis tingkat atas. Namun, dalam praktik eksekusi di lapisan bawah, peran ini masih menghadapi friksi yang tidak ringan.

Salah satu masalah utama adalah terjadinya distorsi informasi. Instruksi strategis yang dirumuskan dalam sesi *Deep Work* Sekretaris sering kali mengalami penyederhanaan berlebihan, perlambatan, atau bahkan penyimpangan makna ketika diturunkan ke level bidang teknis dan DPD. Rantai komando birokratis yang masih panjang menjadi penghambat utama bagi terwujudnya organisasi yang *agile*, sebagaimana diidealkan dalam teori *Network Governance* [10].

Selain itu, pembagian peran Wakil Sekretaris berbasis kerangka Input–Output–Outcome–Impact (I-O-O-I), meskipun rapi secara konseptual, masih menyisakan area abu-abu dalam praktik sehari-hari. Ambiguitas ini kerap memunculkan

kebingungan operasional. Sebagai contoh, ketika terjadi gangguan teknis pada infrastruktur data, belum selalu jelas siapa yang memegang tanggung jawab penuh: apakah Wakil Sekretaris II sebagai pengguna dan pengelola data, atau Wakil Sekretaris III sebagai manajer operasional digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan saling lempar tanggung jawab dan memperlambat penyelesaian masalah [3].

Audit Kinerja Dashboard TOTAL: Isu Validitas Data

- **Kepatuhan dan Integritas Data**

Prinsip dasar sistem informasi menyatakan bahwa secegang apa pun sebuah dashboard, kualitas keluarannya sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimasukkan (*Garbage In, Garbage Out*). Evaluasi terhadap Dashboard TOTAL menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek kepatuhan dan integritas data.

Di sejumlah DPC, khususnya wilayah pedesaan, tingkat kedisiplinan input data kegiatan dan anggota baru masih berada di bawah 60 persen. Praktik lama berupa “kebut semalam” atau pelaporan yang dirapel di akhir bulan masih lazim terjadi. Kebiasaan ini secara efektif meniadakan fungsi pemantauan *real-time* dan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang seharusnya menjadi keunggulan utama Dashboard TOTAL [3].

Selain itu, masih ditemukan indikasi bias pelaporan berupa kecenderungan mempercantik laporan (*over-reporting*) untuk menghindari sanksi atau teguran dari tingkat wilayah. Mekanisme validasi lapangan melalui *spot check* yang dilakukan oleh tim independen Wakil Sekretaris II belum mampu menjangkau seluruh titik sampel secara berkala. Akibatnya, validitas data di beberapa wilayah strategis masih layak dipertanyakan.

Evaluasi Dampak Program Pelayanan: Tantangan Konversi

- **Kesenjangan antara Popularitas dan Elektabilitas**

Program-program pelayanan publik, seperti bakti sosial dan layanan kesehatan, terbukti efektif dalam membangun citra positif dan simpati masyarakat. Pada dimensi popularitas, dampaknya sangat terasa. Namun, ketika diukur dari sisi konversi menjadi anggota partai, simpatisan aktif, atau pemilih pasti—yang mencerminkan akseptabilitas dan elektabilitas—data masih menunjukkan jeda yang signifikan.

Dalam perspektif *Resource Mobilization Theory*, partai relatif berhasil memobilisasi sumber daya untuk memberi (aksi filantropi), tetapi belum optimal dalam memobilisasi penerima manfaat untuk bergabung dalam aksi politik. Dalam banyak kegiatan sosial, *call to action* politik disampaikan terlalu halus, atau bahkan dihilangkan sama sekali, karena kekhawatiran pengurus akan dicap “mempolitisasi bantuan”. Akibatnya, PKS kerap dipersepsikan publik sebagai lembaga sosial atau amil zakat yang baik, namun belum tentu sebagai kekuatan politik yang perlu dimenangkan dalam pemilu [13].

Stagnasi Delapan Persen dan Dinamika Lingkungan Eksternal

Upaya menembus target dua digit—bahkan ambisi 15 persen—masih berhadapan dengan tembok tebal realitas sosiologis dan lingkungan eksternal Jawa Timur.

Salah satu tantangan yang belum sepenuhnya teratasi adalah residu persepsi eksklusivitas. PKS masih menghadapi kesulitan menembus basis Nahdliyin pedesaan dan kelompok Abangan secara signifikan, meskipun langkah simbolik berupa sowan ke PWNU telah dilakukan. Persepsi ini merupakan warisan masa lalu yang tidak mudah dihapus hanya dalam rentang enam hingga dua belas bulan kepengurusan baru.

Di sisi lain, tantangan generasi muda, khususnya Gen Z, juga semakin mengemuka. Meskipun Wakil Sekretaris III telah fokus pada penguatan digital, narasi PKS di media sosial masih didominasi konten

formal-struktural seperti foto pelantikan, rapat, dan kunjungan tokoh. Konten semacam ini kurang *relate* dengan bahasa visual, estetika, dan preferensi Gen Z. Konten yang viral secara organik masih jarang, dan tingkat keterlibatan (*engagement rate*) akun resmi di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan secara serius [3].

Lingkungan eksternal pun menghadirkan dinamika baru. Munculnya gelombang protes sosial pada tahun 2025 terkait isu ekonomi dan demokrasi²⁸ membuka peluang sekaligus ancaman. Peluang muncul apabila PKS mampu mengartikulasikan keresahan publik tersebut menjadi agenda politik yang solutif dan kredibel. Namun, ancaman akan menguat jika PKS justru dipersepsikan sebagai bagian dari elite politik yang tidak menawarkan solusi nyata.

PROYEKSI DAN PETA JALAN KEMENANGAN 2026 (*PROJECTION 2026*)

Tahun 2026 dicanangkan sebagai “**Tahun Ekspansi dan Presisi**”. Jika tahun 2025 merupakan fase *Fresh Start*, konsolidasi, serta peletakan fondasi sistem dan budaya kerja baru, maka 2026 adalah momentum ketika mesin *Zero Mission* harus dipacu pada kecepatan maksimal untuk memecahkan cangkang stagnasi delapan persen dan memasuki teritori dua digit. Orientasi strategi pada fase ini harus bergeser secara tegas: dari semata “bertahan dan membenahi” menuju “menyerang dan meluaskan”.

Grand Strategy 2026: Precision Expansion

Ekspansi politik pada 2026 tidak boleh dilakukan secara membabi buta atau dengan pendekatan *scattergun* yang menyebarkan sumber daya tanpa fokus. Setiap langkah ekspansi harus berbasis **Precision Targeting**, dengan memanfaatkan akumulasi data analitik dari Dashboard TOTAL sepanjang 2025 sebagai fondasi pengambilan keputusan.

- **Micro-Targeting Wilayah Berbasis Heatmap (Zoning Strategy)**

Berdasarkan peta panas (*heatmap*) teritorial dan data historis perolehan suara, wilayah Jawa Timur diperlakukan secara diferensial dan presisi.

Wilayah **Zona Hijau** atau basis kuat PKS akan menerapkan strategi *Lock & Load*. Fokus utamanya adalah memastikan retensi pemilih dan anggota mendekati 100 persen. Zona ini diposisikan sebagai lumbung logistik, kader, dan pembiayaan yang akan mensubsidi ekspansi ke wilayah lain. Program diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kader agar basis kuat ini semakin mandiri dan resilien.

Wilayah **Zona Kuning**, yang bersifat *swing* atau potensial, menjadi medan tempur utama. Strategi yang diterapkan adalah

Persuasive Penetration. Alokasi sumber daya Aleg, program pelayanan publik, bantuan sosial, dan advokasi kebijakan diprioritaskan ke zona ini. Target strategisnya adalah mengonversi *swing voters*²⁷ menjadi *loyal voters*. Aleg provinsi maupun pusat diwajibkan “berkantor politik” secara berkala di wilayah ini untuk membangun kedekatan personal dan kehadiran nyata.

Wilayah **Zona Merah** atau *white spaces* diperlakukan dengan pendekatan paling hati-hati melalui strategi *Guerilla Service*. PKS tidak masuk dengan atribut partai yang mencolok yang berpotensi memicu resistensi sosiologis. Pendekatan dilakukan melalui advokasi kemanusiaan, kolaborasi dengan tokoh masyarakat lokal, serta layanan dasar seperti akses air bersih, kesehatan, dan pendidikan. Target utamanya adalah *trust building*, bukan permintaan suara secara langsung [3].

Transformasi Lanjutan Sekretariat (Wasek 2.0)

Menindaklanjuti temuan evaluasi kritis pada Bab III, Sekretariat DPW akan mengalami peningkatan peran menuju versi **Wasek 2.0**, dengan mandat yang lebih tajam, terukur, dan berbasis hasil.

- **Penguatan Peran Wakil Sekretaris dengan KPI Baru**

Peran **Wakil Sekretaris I (Organizational Health)** difokuskan pada program prioritas *Audit Kualitas Struktur dan Rejuvenasi*. Dilakukan sensus ulang pengurus hingga tingkat ranting. Struktur yang pasif dan hanya berfungsi sebagai “papan nama” akan direstrukturisasi secara tegas dan digantikan dengan figur baru yang lebih progresif, termasuk merekrut *Key Opinion Leader* lokal dan pemuda potensial dari kalangan Gen Z. Indikator kinerja bergeser dari sekadar persentase struktur terbentuk menjadi persentase struktur aktif yang melaksanakan minimal satu kegiatan pelayanan atau rekrutmen setiap bulan.

²⁷ Pemilih ayunan. Kelompok pemilih yang pilihannya dapat berubah-ubah mendekati hari pemilihan, sering kali didasarkan pada isu rasional atau kinerja kandidat, bukan ideologi

Peran **Wakil Sekretaris II (Data Intelligence)** diperkuat melalui program *SIMANTAP Mobile dan AI Integration*. Pengembangan aplikasi mobile yang ramah pengguna ditujukan untuk memudahkan input data langsung dari gawai kader di lapangan, sekaligus mengatasi kesenjangan kompetensi digital. Pada tahap awal, pemanfaatan kecerdasan buatan sederhana digunakan untuk memprediksi tren suara dan sentimen publik berbasis data historis. KPI utama diarahkan pada tingkat akurasi data di atas 95 persen—yang diverifikasi melalui *spot check* rutin—serta kecepatan penyajian data *real-time* untuk pengambilan keputusan strategis BPH [3].

Peran **Wakil Sekretaris III (Digital & Logistics Warfare)** diarahkan pada pembentukan *Content Factory Gen Z*. Tim ini bersifat non-birokratis, diisi oleh kreator muda yang diberi otonomi kreatif untuk memproduksi konten yang ringan, relevan, dan berpotensi viral, namun tetap mengandung nilai PKS. KPI tidak lagi berbasis jumlah unggahan, melainkan pada *engagement rate*, *shareability* konten, serta efisiensi biaya logistik kegiatan yang ditargetkan turun minimal 20 persen dibanding baseline 2025 [3].

Program Unggulan 2026: Mengubah Layanan Menjadi Suara

Mengacu pada *Resource Mobilization Theory*, setiap program pelayanan pada 2026 wajib dilengkapi mekanisme konversi yang jelas—bukan sekadar memberi, tetapi juga membangun basis dukungan politik.

- **Program “PKS Tetangga Kita” (*Hyper-Local Advocacy*)**

Fokus gerakan dialihkan dari kegiatan besar di ruang-ruang mewah menuju aktivitas mikro di tingkat RT dan RW yang berbiaya rendah namun berdampak tinggi.

Setiap kader pelopor diwajibkan berperan sebagai “konsultan masalah warga” bagi sepuluh hingga dua puluh rumah di sekitarnya. Persoalan sehari-hari—mulai dari sampah, drainase, administrasi kependudukan, hingga akses layanan kesehatan—dibantu penyelesaiannya melalui struktur PKS atau diadvokasikan

langsung oleh Aleg PKS. Program ini nyaris tanpa biaya finansial (*zero cost*), namun menuntut investasi waktu, empati, dan konsistensi kader. Target akhirnya adalah terciptanya ikatan emosional personal yang kuat dan autentik, yang jauh lebih tahan terhadap godaan *money politics* dibandingkan baliho atau spanduk kampanye.

- **Akademi Kepemimpinan Muda (*Future Leaders Incubator*)**

Untuk menembus segmen pemilih muda secara organik, PKS Jatim mengembangkan Akademi Kepemimpinan Muda yang terbuka bagi publik luas.

Program ini mencakup pelatihan kepemimpinan, *bootcamp* digital marketing, serta kelas kewirausahaan yang diberikan secara gratis. Peserta terbaik tidak hanya direkrut sebagai anggota, tetapi dipersiapkan menjadi calon legislatif muda potensial untuk 2029 atau menjadi bagian dari *cyber army* dan mesin kampanye digital yang militan.

Peta Jalan Literasi dan Kebijakan (*Policy Roadmap*)

Memasuki 2026, PKS Jawa Timur harus tampil sebagai *agenda setter* dalam wacana publik. Advokasi isu pangan dan energi ditempatkan sebagai prioritas utama. PKS tidak hanya mengkritisi kebijakan ekonomi provinsi dalam RAPBD 2026, tetapi juga menawarkan solusi tanding (*counter-proposal*) yang konkret dan berbasis data, terutama terkait kemandirian pangan, energi, dan ekonomi inklusif. Dengan pendekatan ini, PKS diproyeksikan sebagai partai dengan kapasitas teknokratis dan solusi cerdas, bukan sekadar partai protes [25].

Sebagai penguat kepercayaan publik, PKS Jatim juga akan menerbitkan *Buku Putih Kinerja* yang memuat laporan berkala kinerja fraksi dan pengurus wilayah. Dikemas secara visual dan komunikatif, laporan ini bertujuan menunjukkan *Return on Vote* (ROV)²⁸ kepada

²⁸ Istilah ini adalah modifikasi kreatif dari istilah keuangan *Return on Investment* (ROI). ROV berarti "imbal hasil suara", yakni apa manfaat nyata yang didapat rakyat setelah memberikan suaranya.

pemilih—sebuah bukti konkret bahwa suara yang diberikan menghasilkan dampak nyata.

Kesimpulan: Menjaga Api *Fresh Start*

Tantangan terbesar pada 2026 bukanlah kekurangan strategi, melainkan risiko memudarnya euforia pelantikan. *Fresh Start Effect* secara alami akan meluruh seiring waktu. Untuk menjaga momentum tersebut tetap menyala, DPW PKS Jawa Timur akan menerapkan mekanisme **Reset Semesteran**.

Setiap enam bulan dilakukan audit total berbasis Zero-Based Transformation. DPD atau bidang yang gagal mencapai KPI akan mengalami *reshuffle* personel atau pendampingan intensif, seolah-olah baru dilantik kembali. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga rasa urgensi (*sense of urgency*) dan disiplin eksekusi di seluruh tubuh organisasi.

Dengan menjalankan Peta Jalan 2026 secara konsisten, berbasis data, dan berpegang teguh pada filosofi *Zero Mission*, PKS Jawa Timur tidak sekadar mengejar angka 15 persen. Partai ini sedang membangun sebuah institusi politik modern yang adaptif, melayani, dan tak terhentikan (*unstoppable*). Transformasi ini adalah satu-satunya jalan untuk menghancurkan kutukan delapan persen dan mengantarkan PKS menjadi kekuatan utama penentu arah masa depan Jawa Timur.

Tabel Referensi Utama Dokumen:

- ³ Strategi *Zero Mission* PKS Jatim
- ³ Kemampuan Strategis Sekretaris DPW
- ³ Wasek 2 sebagai Konduktor Transformasi
- ³ Konsep Dashboard Performa DPW PKS Jatim
- ³ Peran Wasek 1, 2, 3 (I-O-O-I)
- ³ Deep Work dan Integrasi Wasek
- ⁵ Teori Zero-Based Transformation & Budgeting
- ⁷ The Fresh Start Effect (Katherine Milkman)
- ¹⁰ Network Governance (R.A.W. Rhodes)

- ¹³ Resource Mobilization Theory (Charles Tilly)
- ¹ Berita Pelantikan & Target PKS Jatim
- ²⁰ Program Layanan (Mudik, Takjil)
- ²⁸ Konteks Protes 2025
- ²⁵ Isu Strategis Pembangunan Jatim 2026

Referensi

1. Suara Surabaya, *Bagus Prasetia Lelana Pimpin PKS Jatim, Target 12 Kursi DPRD di Pemilu 2029*, 2025. [Online]. Available: <https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/bagus-prasetia-lelana-pimpin-pks-jatim-target-12-kursi-dprd-di-pemilu-2029/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
2. PKS Jawa Timur, *Tancap Gas Usai Dilantik, Ketua DPW PKS Jatim Kumpulkan Ketua dan Sekretaris DPD, Minta Hilangkan Kutukan 8 Persen*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/tancap-gas-usai-dilantik-ketua-dpw-pks-jatim-kumpulkan-ketua-dan-sekretaris-dpd-minta-hilangkan-kutukan-8-persen/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
3. DPW PKS Jawa Timur, *Strategi Zero Mission PKS Jatim*, dokumen PDF internal, 2025.
4. McKinsey & Company, *Using Zero-Based Principles to Forge a Purpose-Built Organization*, 2023. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/Operations/Our%20Insights/Zero%20based%20productivity%20Organization%20Using%20zero%20based%20principles%20to%20forge%20a%20purpose%20built%20organization/Zero-based-productivity-Organization-Using-zero-based-principles-to-forge-a-purpose.pdf>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
5. CrossCountry Consulting, *2025 Zero-Based Transformation: Save Costs, Time, and Labor*, 2025. [Online]. Available: <https://www.crosscountry-consulting.com/insights/blog/zero-based-thinking-operating-model-transformation/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
6. Bain & Company, *Zero-Based Redesign (ZBR)*, 2024. [Online]. Available: <https://www.bain.com/consulting-services/performance-improvement/zero-based-redesign/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].

7. J. Riis, H. Dai, and K. Milkman, *The Fresh Start Effect: Motivational Boosts Beyond New Year's Resolutions*, 2014. [Online]. Available: <https://katherinemilkman.squarespace.com/s/the-fresh-start-effect-motivational-boosts-beyond-new-years-resolutions.pdf>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
8. H. Dai, K. Milkman, and J. Riis, *The Fresh Start Effect: Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior*, *Management Science*, 2014. [Online]. Available: https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2014/06/Dai_Fresh_Start_2014_Mgmt_Sci.pdf. [Accessed: Dec. 23, 2025].
9. R. A. W. Rhodes, *Google Scholar Profile*. [Online]. Available: https://scholar.google.com/citations?user=Yu1_AiUAAA&hl=en. [Accessed: Dec. 23, 2025].
10. R. A. W. Rhodes, *How to Manage Your POL*, Discussion Paper, Commonwealth Secretariat, Feb. 15, 2013. [Online]. Available: <http://www.raw-rhodes.co.uk/wpcontent/uploads/2013/07/Com-Sec-2013-v2.pdf>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
11. R. A. W. Rhodes, *Network Governance and the Differentiated Polity*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2017. [Online]. Available: <https://global.oup.com/academic/product/network-governance-and-the-differentiated-polity-9780198786108>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
12. R. A. W. Rhodes, *The New Governance*, *Political Studies*, vol. 44, pp. 652–667, 1996. [Online]. Available: <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PSPA108/rhodes.pdf>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
13. Wikipedia, *Resource Mobilization*, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_mobilization. [Accessed: Dec. 23, 2025].
14. PKS Jawa Timur, *Regenerasi Kepemimpinan, PKS Tetapkan DPTD se-Jatim 2025–2030*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/regenerasi-kepemimpinan-pks-tetapkan-dptd-se-jatim-2025-2030/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
15. [Bangsa Online, *Tongkat Estafet Kepemimpinan DPW PKS Jatim Berganti, Bagus Ketua, Syadid Sekretaris*, 2025. [Online]. Available: <https://bangsaonline.com/berita/151392/tongkat-estafet-kepemimpinan-dpw-pks-jatim-berganti-bagus-ketua-syadid-sekretaris>. [Accessed: Dec. 23, 2025].

16. PKS Jawa Timur, *Muswil VI PKS Jatim, 700 Pengurus se-Jatim Hadir, Siap Majukan Jatim*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/muswil-vi-pks-jatim-700-pengurus-se-jatim-hadir-siap-majukan-jatim/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
17. PKS Jawa Timur, *Musda VI PKS Jatim Digelar Daring dan Sederhana, Tegaskan Pergantian Kepengurusan DPTD*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/musda-vi-pks-jatim-digelar-daring-dan-sederhana-tegaskan-pergantian-kepengurusan-dptd/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
18. PKS Jawa Timur, *Rakerda PKS Bangkalan Tekankan Penguatan Kualitas Kader untuk Mengokohkan Aksi Kemanusiaan*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/rakerda-pks-bangkalan-tekankan-penguatan-kualitas-kader-untuk-mengokohkan-aksi-kemanusiaan/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
19. PKS Jawa Timur, *DPW PKS Jawa Timur – Situs Resmi*. [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
20. ANTARA News Jawa Timur, *PKS Jatim Luncurkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.antaranews.com/berita/892589/pks-jatim-luncurkan-berbagai-program-sosial-selama-ramadhan>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
21. ANTARA News Jawa Timur, *PKS Jatim Luncurkan Posko Mudik di Terminal Purabaya*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.antaranews.com/berita/900617/pks-jatim-luncurkan-posko-mudik-di-terminal-purabaya/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
22. PKS Jawa Timur, *Sowan ke PWNU, PKS Jatim Perkenalkan Pengurus Baru*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.pks.id/sowan-ke-pwnu-pks-jatim-perkenalkan-pengurus-baru/>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
23. Pemerintah Kota Surabaya, *Jalin PKS dengan Kejaksaan, Pemkot Surabaya Dukung Penerapan Pidana Sanksi Sosial*, 2025. [Online]. Available: <https://www.surabaya.go.id/id/berita/24588/jalin-pks-dengan-kejaksaan-pemkot-surabaya-dukung-penerapan-pidana-sanksi-sosial>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
24. ANTARA News Jawa Timur, *PKS Jatim Raih Dua Penghargaan Legislatif Award 2025*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.antaranews.com/berita/976433/pks-jatim-raih-dua-penghargaan-legislatif-award-2025>. [Accessed: Dec. 23, 2025].

25. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, *Gubernur Jatim RAPBD 2026 Usung Kemandirian Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*, 2025. [Online]. Available: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-jatim-rapbd-2026-usung-kemandirian-pangan-dan-energi-serta-ekonomi-yang-produktif-dan-inklusif>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
26. Infopublik, *Pemprov Jatim Gelar Kick Off Musrenbang RKPD 2026*, 2025. [Online]. Available: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/914089/pemprov-jatim-gelar-kick-off-musrenbang-rkpd-2026>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
27. McKinsey & Company, *Zero-Based Productivity—Organization: Using Zero-Based Principles to Forge a Purpose-Built Organization*, 2023. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/zero-based-productivity-organization-using-zero-based-principles-to-forge-a-purpose-built-organization>. [Accessed: Dec. 23, 2025].
28. [28] Wikipedia, *2025 Indonesian Protests*, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Indonesian_protests. [Accessed: Dec. 23, 2025].
29. [29] Jatim Times, *Tiga Tantangan Sosial di Kota Malang Menjelang 2026*, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.times.co.id/news/ekonomi/U1thXmGTU/Tiga-Tantangan-Sosial-di-Kota-Malang-Menjelang-2026>. [Accessed: Dec. 23, 2025].

BAB IV
PORTFOLIO KINERJA
& ROADMAP 2026-2029

BIDANG KADERISASI

Menyiapkan Hulu Kemenangan, Memastikan Hilir Kekuasaan

Kaderisasi sebagai Jantung Strategi Kemenangan

Bidang Kaderisasi (BKAP) menempati posisi sentral dalam arsitektur besar Akselerasi Jawa Timur. Ia bukan sekadar unit pembinaan internal, melainkan mesin utama pencetak manusia perjuangan yang akan menggerakkan seluruh lini dakwah, pelayanan, dan kemenangan politik. Dalam pandangan strategis DPW PKS Jawa Timur, kaderisasi adalah hulu kemenangan—jika hulunya jernih dan kuat, maka hilir elektoral akan mengalir dengan sendirinya.

Pasca pelantikan kepengurusan 2025, BKAP bergerak cepat memastikan tidak ada kekosongan sistem. Konsolidasi struktur kaderisasi di 38 kabupaten/kota dilakukan sebagai langkah awal menyatukan frekuensi gerak. Penataan penanggung jawab setiap jenjang kader, revitalisasi Unit Pembinaan Anggota (UPA), serta penyegaran para pembina (murobbi) menjadi fondasi awal agar mesin pembinaan tetap menyala tanpa jeda.

Dalam konteks perubahan demografi Jawa Timur—dengan dominasi Gen Z dan Milenial—BKAP memaknai *Zero Mission* sebagai pembaruan total cara mengader. Kader tidak lagi diposisikan sebagai objek pembinaan pasif, melainkan subjek perubahan sosial. Orientasi kaderisasi bergeser dari sekadar loyalitas struktural menuju transformasi personal: spiritual kuat, intelektual adaptif, dan sosial membumi.

Melalui pendekatan ini, kader PKS diharapkan tidak eksklusif, tetapi hadir sebagai bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Kader adalah solusi, bukan simbol. Inilah titik temu antara militansi ideologis dan relevansi sosial.

Transformasi Sistem Pembinaan: Dari Durasi ke Kontribusi

Salah satu lompatan penting dalam kinerja BKAP adalah transformasi sistem pembinaan dari berbasis waktu menjadi berbasis kinerja dan kompetensi.

Dalam paradigma baru ini, kenaikan jenjang kader mensyaratkan kontribusi nyata di masyarakat. Setiap kader dituntut memiliki peran sosial yang jelas—baik di lingkungan RT/RW, komunitas profesi, dunia usaha, maupun ruang advokasi publik. Pembinaan (liquo/UPA) tidak lagi berhenti pada transfer materi, tetapi menjadi ruang refleksi dan penguatan atas aksi lapangan yang dijalankan kader.

Dampaknya bersifat ganda. Secara internal, soliditas kader terjaga karena pembinaan menjadi ruang pengisian energi perjuangan. Secara eksternal, PKS hadir sebagai partai yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar hadir saat pemilu. Inilah implementasi konkret semangat Militansi Tanpa Batas yang tidak berhenti pada slogan, tetapi menjelma kerja nyata.

Memasuki 2026, BKAP menargetkan ekspansi rekrutmen besar-besaran melalui sinergi dengan program JOIN PKS. Namun ekspansi ini tidak bersifat membabi buta. Prinsipnya jelas: tumbuh cepat tanpa kehilangan kualitas. Setiap anggota baru harus segera teraktivasi dalam sistem pembinaan agar tidak menjadi kader pasif (*Zero Dormant Member*).

Untuk itu, sistem deteksi dini berbasis data disiapkan guna memantau kesehatan UPA dan aktivitas kader. Pendekatan pembinaan juga dipersonalisasi, membuka jalur pembinaan fungsional bagi kader profesional agar tetap tumbuh tanpa terhambat keterbatasan waktu. *Zero Mission* dalam kaderisasi berarti: tidak ada kader yang ditinggalkan.

Roadmap 2026–2029: Mencetak Pemimpin, Menjaga Militansi

Roadmap kaderisasi menuju 2029 dirancang untuk menjawab dua tantangan besar sekaligus: bonus demografi dan pragmatisme politik. Di satu sisi, terbuka peluang besar merekrut anak muda. Di sisi

lain, budaya transaksional menggerus idealisme. BKAP memosisikan diri sebagai benteng nilai sekaligus inkubator kepemimpinan masa depan.

Strategi yang ditempuh adalah memperkuat militansi kader secara utuh—spiritual, intelektual, dan fisik. Kurikulum kepemimpinan diperkuat, termasuk melalui program-program ketahanan mental dan fisik, agar kader siap menghadapi kerja lapangan panjang menuju 2029. Militansi dipahami bukan sebagai sikap keras, tetapi sebagai daya tahan moral dalam perjuangan.

Ke depan, BKAP juga mengedepankan kaderisasi yang inklusif dan kolaboratif. Sinergi lintas bidang—kepemudaan, perempuan, humas—serta kolaborasi eksternal dengan komunitas dan ormas menjadi strategi memperluas kolam rekrutmen. PKS tidak menutup diri, tetapi membuka pintu bagi siapa pun yang ingin tumbuh, belajar, dan mengabdikan.

Pada akhirnya, target besar PKS Jawa Timur bukan sekadar kemenangan elektoral 2029, melainkan kemenangan peradaban: hadirnya stok pemimpin lokal yang berintegritas, berdaya saing, dan dicintai rakyat. Bidang Kaderisasi memastikan bahwa ketika kemenangan itu tiba, ia ditopang oleh manusia-manusia yang siap memikul amanah, bukan sekadar menikmati hasil. Kader Siap, PKS Melesat.

BIDANG PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA (BIPEKA)

Dari Ketahanan Keluarga Menuju Kemenangan Politik

Keluarga sebagai Medan Strategis Politik: Menang dari Rumah ke TPS

BIPEKA memposisikan keluarga bukan sekadar isu sosial, melainkan medan strategis pemenangan politik jangka panjang. Dalam lanskap Jawa Timur yang kental dengan nilai kekeluargaan dan religiositas, keluarga adalah unit paling stabil, paling berpengaruh, dan paling tahan terhadap volatilitas politik elektoral. Karena itu, BIPEKA mengusung paradigma: *siapa yang menjaga keluarga, dialah yang akan dipercaya menjaga masa depan.*

Melalui pendekatan ini, politik tidak lagi hadir sebagai jargon elite, tetapi sebagai kehadiran nyata di dapur, ruang tamu, dan ruang tumbuh anak-anak. Perempuan—terutama ibu—dipahami sebagai *opinion leader domestik* yang menentukan arah pilihan keluarga. BIPEKA memanfaatkan posisi strategis ini untuk membangun loyalitas politik yang organik, rasional, dan berjangka panjang.



KEKUATAN KELUARGA: Peluncuran 1.040 titik Rumah Keluarga Indonesia (RKI) sebagai basis pemenangan. Emak-emak PKS bergerak dari pintu ke pintu, menjaga ketahanan keluarga sekaligus memenangkan kepemimpinan daerah.

Pendekatan ini sekaligus menjadi jawaban atas stagnasi ceruk elektoral. Ketika kampanye konvensional sering berhenti pada popularitas sesaat, kerja-kerja BIPEKA membangun trust sosial yang dalam. Dari sinilah suara tidak hanya diperoleh, tetapi dijaga dan diwariskan lintas pemilu. Politik keluarga adalah investasi elektoral paling murah, paling tahan lama, dan paling autentik.

Rumah Keluarga Indonesia (RKI): Mesin *Zero Mission* BIPEKA

Program unggulan BIPEKA, Rumah Keluarga Indonesia (RKI), merupakan manifestasi konkret strategi *Zero Mission* : sederhana, langsung menyentuh kebutuhan, berdampak tinggi, dan berbiaya rendah. RKI bukan sekadar forum pengajian atau aktivitas seremonial, melainkan pusat solusi keluarga berbasis komunitas.

RKI dirancang sebagai *entry point* yang aman dan ramah bagi masyarakat luas—termasuk mereka yang apolitis atau skeptis terhadap partai. Di RKI, warga mendapatkan layanan nyata: pendampingan keluarga, edukasi parenting, konseling rumah tangga, penguatan ekonomi perempuan, hingga advokasi kasus sosial. Semua dijalankan tanpa atribut politik berlebihan, namun dengan nilai dan etos PKS yang konsisten.

Secara strategis, RKI berfungsi ganda:

- **Secara sosial**, memperkuat ketahanan keluarga dan menjawab persoalan riil seperti perceraian, stunting, dan tekanan ekonomi rumah tangga.
- **Secara politik**, menjadi mesin konversi simpatik: dari penerima manfaat → relawan → anggota → pemilih loyal.

Target jangka menengah BIPEKA adalah menjadikan RKI sebagai *brand sosial* PKS di Jawa Timur, dengan visi “Satu Desa, Satu RKI”. Dengan skema ini, PKS tidak perlu selalu hadir dengan baliho dan jargon, karena namanya hidup dalam ingatan warga sebagai bagian dari solusi keseharian mereka.

Militansi Perempuan dan Ekspansi Sunyi: Strategi Menembus 2029

BIPEKA mengandalkan kekuatan paling senyap namun paling efektif dalam politik Jawa Timur: militansi perempuan berbasis komunitas. Berbeda dengan mobilisasi massa besar yang mahal dan mudah dipatahkan, strategi BIPEKA adalah *ekspansi sunyi*—bergerak dari rumah ke rumah, dari komunitas ke komunitas, dari hati ke hati.

Militansi ini dijalankan melalui tiga jalur utama:

1. **Dakwah berbasis komunitas perempuan**, seperti majelis taklim, arisan, dan forum sekolah.
2. **Advokasi mikro**, di mana kader perempuan menjadi rujukan masalah warga di lingkungannya.
3. **Digitalisasi emak-emak**, memanfaatkan WhatsApp Group dan media sosial komunitas sebagai kanal narasi positif dan kontra-hoaks.

Dalam kerangka Roadmap 2026–2029, BIPEKA tidak hanya berorientasi pada kemenangan suara, tetapi juga penyiapan pemimpin masa depan. Melalui pelatihan, inkubasi kepemimpinan perempuan, dan penguatan kapasitas publik, BIPEKA menjadi *talent pool* strategis bagi caleg perempuan, relawan militan, dan penggerak sosial PKS ke depan.

Dengan pendekatan ini, BIPEKA tidak sekadar memenuhi kuota keterwakilan perempuan, tetapi mengubah perempuan menjadi aktor utama ekspansi elektoral PKS. Kemenangan tidak lagi bergantung pada hiruk-pikuk kampanye, melainkan pada jaringan kepercayaan yang tumbuh perlahan namun mengakar kuat.

BIDANG KOPERASI DAN DESA

Rebut Desa, Kepung Kota, Menangkan Jawa Timur

Desa sebagai Medan Strategis Kemenangan Politik dan Kedaulatan Ekonomi

Bidang Koperasi dan Desa (KOPDES) memosisikan desa bukan sebagai objek pembangunan musiman, melainkan sebagai subjek utama perjuangan politik dan ekonomi PKS Jawa Timur. Desa dipahami sebagai benteng terakhir kedaulatan bangsa: tempat produksi pangan, basis sosial yang relatif stabil, serta ruang hidup nilai gotong royong yang masih autentik. Dalam konteks Jawa Timur yang memiliki ribuan desa, penguasaan medan desa bukan sekadar strategi elektoral, melainkan syarat mutlak untuk membangun kekuatan politik jangka panjang.

Melalui KOPDES, PKS Jatim berupaya menggeser persepsi lama bahwa PKS adalah partai perkotaan dan kelas menengah terdidik. Arah gerakan diarahkan untuk menjadikan PKS hadir, relevan, dan dibutuhkan di pematang sawah, pesisir nelayan, dan balai desa. Pendekatan ini menempatkan PKS sebagai mitra warga desa dalam menghadapi persoalan riil: ketergantungan pada tengkulak, lemahnya posisi tawar petani dan nelayan, serta rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi desa.

Fase awal pasca-pelantikan difokuskan pada membangun kepercayaan sosial melalui pendekatan kultural—silaturahmi dengan tokoh desa, kepala desa, dan pemimpin informal—sebagai bentuk “*kulo nuwun politik*”²⁹. Langkah ini menegaskan bahwa PKS tidak datang membawa agenda instan, melainkan komitmen jangka panjang untuk tumbuh bersama desa. Desa tidak diperlakukan sebagai lumbung suara lima tahunan, tetapi sebagai ruang pengabdian yang berkelanjutan menuju 2029.

²⁹ Secara harfiah berarti "saya minta (izin)". Ini adalah frasa standar etika (*unggah-ungguh*) saat seseorang hendak memasuki rumah atau wilayah orang lain. Mengucapkan *kulo nuwun* menandakan kerendahan hati tamu dan penghormatan terhadap tuan rumah

Koperasi sebagai Instrumen Perlawanan Struktural dan Basis Elektoral

Inti strategi KOPDES adalah koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi berjamaah. Koperasi tidak dipahami secara sempit sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai instrumen produksi, distribusi, dan kedaulatan ekonomi rakyat desa. Melalui koperasi, PKS berupaya memutus mata rantai ketergantungan petani dan nelayan pada sistem ijon, tengkulak, dan permainan harga yang merugikan.

Pendekatan yang dikembangkan adalah korporatisasi petani dan nelayan berbasis koperasi produksi, dari hulu hingga hilir. Kader KOPDES mendampingi desa dalam penyediaan sarana produksi, penguatan manajemen koperasi, hingga akses pasar yang lebih adil. Jaringan kader PKS di perkotaan diposisikan sebagai pasar alternatif, membangun ekosistem “desa menyuplai, kota membeli”. Dengan cara ini, koperasi tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Dampak ekonomi ini memiliki konsekuensi politik yang strategis. Ketika koperasi berfungsi dan kesejahteraan meningkat, PKS tidak lagi dipersepsikan sebagai partai janji, melainkan aktor solusi nyata. Basis elektoral dibangun bukan melalui retorika, tetapi melalui pengalaman langsung warga desa yang merasakan kehadiran PKS dalam hidup mereka. Koperasi menjadi medium konversi kepercayaan sosial menjadi loyalitas politik yang berjangka panjang.

Roadmap 2026–2029: Rebut Desa, Kepung Kota, Menangkan Jawa Timur

Memasuki 2026, KOPDES diarahkan memasuki fase ekspansi terukur sebagai bagian dari peta jalan kemenangan 2029. Strategi besar yang dibangun adalah “Rebut Desa untuk Kepung Kota”. Wilayah pedesaan dipetakan sebagai basis stabil dan tahan guncangan politik, yang mampu menopang ekspansi suara PKS di wilayah urban yang lebih cair dan kompetitif.

Roadmap KOPDES mencakup penguatan struktur hingga tingkat desa, pembentukan desa binaan sebagai etalase keberhasilan

PKS, serta rekrutmen tokoh-tokoh desa sebagai kader pelopor dan bakal calon pemimpin daerah. Pendekatan *Zero Mission* diterjemahkan sebagai zero blank spot di pedesaan: tidak boleh ada desa yang tidak disentuh kerja nyata PKS, baik melalui koperasi, advokasi, maupun pelayanan sosial.

Militansi kader di desa dibangun melalui nilai gotong royong dan “sambatan politik”³⁰—kehadiran fisik kader membantu panen, menyelesaikan masalah warga, dan mendampingi tanpa syarat politik. Inilah bentuk kampanye paling efektif di desa: kehadiran, keteladanan, dan kebermanfaatannya. Dengan jejaring koperasi, tokoh desa, pesantren, dan kelompok tani, KOPDES menjadi simpul strategis yang menghubungkan kekuatan sosial-ekonomi desa dengan agenda politik PKS Jawa Timur.

Melalui jalur inilah, PKS Jatim menargetkan bukan hanya peningkatan suara, tetapi hegemoni moral dan sosial di wilayah pedesaan, yang akan menjadi fondasi kokoh untuk kemenangan elektoral 2029 dan seterusnya.

³⁰ Tradisi gotong royong di pedesaan Jawa di mana warga membantu tetangga yang sedang punya hajat besar (membangun rumah, panen, hajatan) tanpa mengharapkan upah uang, biasanya hanya dibalas dengan makan bersama. Ini adalah wujud solidaritas komunal

**BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
(POLHUKAM)
Menjaga Arah Perjuangan dan Menopang Kemenangan
Bermakna**

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPW PKS Jawa Timur dibentuk atas kesadaran bahwa perjuangan politik tidak pernah berdiri sendiri. Politik selalu berkelindan dengan hukum, keamanan, serta dinamika sosial yang kompleks. Dalam konteks Jawa Timur yang plural, kompetitif, dan dinamis, Polhukam hadir bukan sekadar sebagai pelengkap struktur organisasi, melainkan sebagai penjaga arah perjuangan, penguat kualitas keputusan politik, dan sistem kewaspadaan dini partai.

Secara filosofis, Polhukam berpijak pada pandangan bahwa politik, hukum, dan keamanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Politik tanpa hukum melahirkan kesewenang-wenangan, hukum tanpa politik kehilangan daya dorong, dan keamanan tanpa keadilan hanya menciptakan ketertiban semu. PKS memandang politik sebagai sarana ibadah dan pengabdian, sehingga setiap sikap dan kebijakan politik harus bersih, bermartabat, konstitusional, serta berpihak kepada rakyat. Nilai inilah yang menjiwai kerja Polhukam dalam memastikan PKS Jawa Timur tetap konsisten pada keadilan, etika politik, dan kepentingan publik.

Dalam visi besar DPW PKS Jawa Timur, Polhukam berperan sebagai simpul strategis yang menghubungkan gagasan normatif partai dengan realitas kebijakan di lapangan. Polhukam membantu merumuskan sikap politik yang substantif, mengawal kerja-kerja legislasi dan pengawasan, serta membangun komunikasi politik yang sehat dengan masyarakat. Melalui edukasi politik dan advokasi hukum, Polhukam mendorong pemahaman politik sebagai instrumen menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar kontestasi kekuasaan.

Pasca pelantikan kepengurusan, Polhukam memasuki fase konsolidasi awal yang krusial. Tantangan utamanya adalah menyatukan arah, ritme, dan cara pandang di tengah keberagaman latar belakang pengurus. Konsolidasi dilakukan melalui dialog intens dan kolaboratif untuk membangun fondasi berpikir bersama. Fokus utama bukan hanya menjalankan program jangka pendek, melainkan menyiapkan kerangka kerja strategis menuju 2026.

Salah satu ikhtiar strategis Polhukam adalah penguatan advokasi kebijakan pro-rakyat melalui forum AKAR (Advokasi Kebijakan untuk Rakyat). Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara kader legislatif, akademisi, dan praktisi untuk membedah kebijakan daerah secara kritis dan konstruktif. Polhukam menegaskan bahwa advokasi harus berbasis data, kajian hukum, dan narasi yang mudah dipahami publik agar berdampak nyata pada kerja legislasi dan pengawasan.

Untuk menopang kualitas keputusan politik, Polhukam menginisiasi penguatan jejaring melalui Polhukam Jatim Network dan Polhukam Research Institute. Langkah ini menandai pergeseran kerja dari berbasis intuisi menuju berbasis riset dan data. Jejaring ini diharapkan menjadi sumber analisis, rujukan sikap politik, serta basis respons cepat terhadap isu-isu strategis daerah.

Di sisi lain, kerja Polhukam yang bersifat sunyi namun menentukan adalah mitigasi risiko politik dan kepemiluan. Polhukam memetakan potensi kerawanan pemilu, sengketa, dan persoalan hukum sebagai investasi jangka panjang bagi kredibilitas partai. Prinsip yang dipegang adalah bahwa kemenangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui proses yang bersih, patuh hukum, dan bermartabat.



KEPEMIMPINAN PUBLIK: Presiden PKS dan Pimpinan DPTW PKS Jatim mengunjungi Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Evaluasi kinerja Polhukam dilakukan secara jujur dan reflektif. Fondasi penting telah mulai terbangun—konsolidasi, jejaring riset, advokasi kebijakan, dan kesadaran mitigasi—meski masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, sistem kerja, dan waktu kader. Ke depan, Polhukam dituntut menjaga keseimbangan antara kehati-hatian hukum dan ketegasan politik agar sikap partai tetap tajam dan bermakna.

Menatap 2026, Polhukam memproyeksikan perannya dalam kerangka K2P2 melalui penguatan kapasitas kader, pengawalan kebijakan pro-rakyat, dan mitigasi politik untuk kemenangan pemilu. Pada akhirnya, Polhukam menempatkan diri sebagai penjaga ekosistem perjuangan PKS Jawa Timur—agar partai dapat bergerak aman secara hukum, nyaman secara organisasi, dan kuat secara politik—menuju kemenangan yang bukan hanya elektoral, tetapi kemenangan nilai bagi masyarakat Jawa Timur.

BIDANG SENI DAN BUDAYA

Seni Budaya sebagai Jantung Dakwah Humanis dan Diplomasi Politik

Bidang Seni dan Budaya (Senbud) DPW PKS Jawa Timur memandang seni dan kebudayaan bukan sekadar ornamen pelengkap perjuangan politik, melainkan jantung peradaban yang memompa nilai-nilai kebaikan ke tengah masyarakat. Jawa Timur dengan keragaman budaya—Mataraman, Arek, Pandalungan, Madura, hingga Osing—menuntut pendekatan politik yang halus, membumi, dan berakar pada kearifan lokal. Dalam konteks ini, Senbud hadir sebagai wajah humanis PKS yang berbicara melalui bahasa rasa, keindahan, dan tradisi yang akrab dengan kehidupan rakyat.

Secara strategis, Senbud menempatkan seni budaya sebagai sarana dakwah kultural dan diplomasi politik yang cair. Politik yang kering dan eksklusif berisiko menjauh dari rakyat, sementara kebudayaan tanpa perlindungan politik mudah terpinggirkan. Karena itu, Senbud mengintegrasikan nilai-nilai perjuangan PKS dengan ekspresi budaya lokal, sehingga PKS hadir sebagai partai yang religius sekaligus berbudaya, santun namun tegas, serta modern tanpa tercerabut dari akar tradisi.

Pendekatan ini bertujuan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, khususnya kelompok seniman dan budayawan yang selama ini sering merasa berjarak dengan politik. Dengan menjadikan seni sebagai pintu masuk, PKS berupaya memenangkan hati sebelum meraih dukungan elektoral, sekaligus meruntuhkan persepsi bahwa politik Islam bertentangan dengan budaya lokal Jawa Timur.

Penguatan Basis Komunitas dan Advokasi Seniman sebagai Arah Kerja

Pasca pelantikan, Bidang Seni dan Budaya bergerak cepat membangun fondasi kerja berbasis komunitas. Fokus utama diarahkan pada konsolidasi internal struktur Senbud dari tingkat wilayah hingga

kabupaten/kota, serta penajakan dan penguatan hubungan dengan komunitas seni dan kreator budaya. Langkah ini menegaskan bahwa Senbud tidak bekerja secara elitis, melainkan berangkat dari realitas lapangan dan kebutuhan seniman.

Program unggulan Senbud dirancang untuk memberikan ruang ekspresi dan apresiasi bagi seniman lokal, sekaligus menjadikan PKS sebagai rumah yang ramah bagi pelaku budaya. Melalui panggung seni, fasilitasi karya, dan pendampingan komunitas, Senbud membangun relasi yang setara dan bermartabat. Dampak terpenting dari pendekatan ini bukan hanya pada jumlah kegiatan, melainkan pada perubahan persepsi: PKS dipandang sebagai partai yang menghargai kreativitas, mendengarkan aspirasi, dan hadir secara konsisten.

Senbud juga menempatkan advokasi seniman sebagai bagian dari pelayanan publik. Seniman tidak hanya dilihat sebagai alat kampanye, tetapi sebagai subjek perjuangan yang memiliki hak atas ruang berekspresi, perlindungan karya, dan akses terhadap kebijakan. Dengan demikian, seni budaya menjadi medium pengabdian sekaligus ladang kaderisasi berbasis minat, hobi, dan identitas kultural.

Strategi Menuju 2029: Budaya sebagai Jalan Kemenangan Nilai

Menatap 2026–2029, Bidang Seni dan Budaya menegaskan strategi kebudayaan sebagai jalan menuju kemenangan yang bermakna. Tantangan utama di Jawa Timur adalah perang narasi identitas serta pergeseran minat generasi muda dari seni tradisi. Menjawab hal ini, Senbud mengusung pendekatan berbasis zona budaya, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Senbud mendorong integrasi seni budaya dengan transformasi digital, agar dakwah kultural tidak terjebak nostalgia masa lalu. Digitalisasi karya, produksi konten budaya berkualitas, dan pemanfaatan media sosial diarahkan untuk menampilkan wajah PKS Jawa Timur yang estetik, ramah, dan relevan bagi generasi muda. Seni tradisi dan budaya populer diposisikan sejajar sebagai medium perjuangan nilai.

Dalam kerangka besar perjuangan partai, Senbud menanamkan militansi kultural: berkesenian sebagai bagian dari jihad konstitusional. Militansi ini diwujudkan bukan melalui konfrontasi, melainkan konsistensi berkarya, keberanian menjaga nilai, dan kesetiaan pada rakyat. Melalui jejaring kolaborasi internal dan eksternal, Senbud berkomitmen menjadi garda depan yang mengetuk pintu hati masyarakat Jawa Timur, menyiapkan fondasi kemenangan PKS yang tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga kemenangan nilai dan peradaban.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Mengawal Keringat Pekerja, Membangun Kemandirian Ekonomi Umat

Pekerja sebagai Subjek Perjuangan dan Pilar Keadilan Sosial

Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPW PKS Jawa Timur lahir dari keyakinan bahwa buruh dan pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan subjek utama pembangunan yang harus dimuliakan, dilindungi haknya, dan diberdayakan potensinya. Di tengah posisi Jawa Timur sebagai salah satu basis industri terbesar nasional, jutaan pekerja menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan kebijakan, fluktuasi ekonomi, dan perubahan regulasi.

PKS memandang isu ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari perjuangan keadilan sosial. Karena itu, Bidnaker tidak ditempatkan hanya sebagai unit respons konflik industrial, tetapi sebagai instrumen ideologis untuk memastikan keberpihakan politik kepada kaum pekerja. Politik ketenagakerjaan PKS diarahkan untuk menghadirkan negara dan partai sebagai pelindung, bukan penonton, dalam relasi yang timpang antara modal dan tenaga kerja.

Dalam kerangka besar menuju 2029, Bidnaker bertransformasi dari pendekatan reaktif menuju pendekatan strategis dan berkelanjutan. Pekerja tidak hanya dibela saat terjadi PHK atau sengketa, tetapi diposisikan sebagai mitra perjuangan jangka panjang dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan basis politik PKS yang kokoh.

Dari Advokasi ke Pemberdayaan: Fondasi Gerakan Pekerja PKS

Pasca pelantikan kepengurusan, Bidnaker memulai konsolidasi struktur dan jejaring di wilayah-wilayah industri strategis Jawa Timur. Konsolidasi ini menegaskan orientasi kerja Bidnaker yang membumi: hadir di kawasan industri, berjejaring dengan serikat pekerja, dan mendengar langsung kegelisahan buruh. Advokasi kebijakan

pengupahan, khususnya terkait UMK, menjadi pintu masuk penting untuk membangun kepercayaan pekerja terhadap PKS.

Namun, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa persoalan pekerja tidak berhenti pada aspek hukum dan upah. Kerentanan ekonomi akibat PHK, minimnya keterampilan tambahan, dan ketergantungan penuh pada satu sumber penghasilan menjadi masalah struktural. Dari sinilah lahir pendekatan baru Bidnaker: integrasi advokasi hukum dengan pemberdayaan ekonomi.

Bidnaker mulai menggeser fokus dari sekadar pendampingan kasus menuju penciptaan solusi jangka panjang. Advokasi ketenagakerjaan dipadukan dengan pelatihan kewirausahaan, penguatan keterampilan, dan jejaring ekonomi, sehingga pekerja—termasuk eks-pekerja—memiliki jalan keluar yang bermartabat. Pendekatan ini mengubah persepsi buruh terhadap PKS: dari partai yang datang saat konflik, menjadi mitra strategis kesejahteraan dan kemandirian.

Strategi Menuju 2029: Basis Pekerja sebagai Kekuatan Politik

Menatap 2026–2029, Bidang Ketenagakerjaan menempatkan kaum pekerja sebagai salah satu basis pemenangan strategis PKS Jawa Timur. Tantangan besar seperti deindustrialisasi, otomatisasi, dan regulasi ketenagakerjaan yang tidak berpihak menjadi konteks perjuangan yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, besarnya populasi pekerja yang belum memiliki afiliasi politik kuat membuka peluang besar bagi PKS untuk hadir secara konsisten dan bermakna.

Strategi Bidnaker diarahkan pada pengawalan aspirasi secara tuntas (*Zero Mission*): setiap keluhan pekerja harus direspons hingga menemukan solusi, baik melalui jalur hukum, mediasi, maupun pemberdayaan ekonomi. Kehadiran PKS ditargetkan merata di kawasan industri, memastikan tidak ada ruang kosong perjuangan di basis pekerja.

Selain itu, Bidnaker mendorong transformasi solidaritas buruh menjadi kekuatan politik. Melalui pendidikan politik perburuhan, pekerja diajak memahami bahwa kesejahteraan mereka sangat

ditentukan oleh kebijakan publik dan representasi politik. Militansi dan korsa buruh diarahkan menjadi energi elektoral yang sadar, terorganisir, dan berkelanjutan.

Dengan sinergi lintas bidang dan kolaborasi multipihak, Bidnaker berkomitmen menjadikan kaum pekerja bukan hanya objek kebijakan, tetapi aktor perubahan. Kemenangan yang dituju bukan sekadar penambahan suara, melainkan terbangunnya basis pekerja yang sejahtera, mandiri, dan loyal. Dari sanalah PKS Jawa Timur menapaki jalan kemenangan yang berakar pada keadilan sosial dan keberpihakan nyata kepada rakyat pekerja.

**BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
KEPEMIMPINAN PARTAI (BPPKP)
Menuju Kepemimpinan Transformasional PKS Jawa Timur
2026–2029**

PKS Jawa Timur menghadapi tantangan elektoral dan sosial yang semakin kompleks seiring perubahan demografi, budaya politik, serta ekspektasi publik yang terus meningkat. Dengan populasi besar, keragaman kultur (Mataraman, Arek, Pandalungan, Madura), serta dominasi masyarakat muda dan ekosistem pesantren, Jawa Timur menuntut kepemimpinan partai yang bukan hanya ideologis, tetapi juga adaptif, kompeten, dan mampu membaca medan sosial secara presisi. Dalam konteks inilah, kehadiran Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai (BPPKP) menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan zaman sekaligus menopang target besar kemenangan PKS 2029.

BPPKP lahir sebagai bidang baru dengan mandat utama membangun sistem kaderisasi kepemimpinan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Fokusnya bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi menyiapkan “bahan baku” sumber daya manusia partai—kader, pengurus, dan pejabat publik—yang memiliki kapasitas kepemimpinan utuh: integritas moral, sensitivitas sosial, profesionalisme, dan kematangan kenegarawanan. Empat nilai ini—bersih, peduli, profesional, dan negarawan—menjadi DNA kepemimpinan PKS dan fondasi seluruh kurikulum serta aktivitas BPPKP.

Melalui program unggulan Akademi Pemimpin Indonesia (API) Jawa Timur, BPPKP mengonsolidasikan berbagai inisiatif pelatihan kepemimpinan dalam satu ekosistem terpadu. API dirancang sebagai ruang pembelajaran strategis untuk membentuk pemimpin partai yang memahami ideologi, menguasai manajemen organisasi, mampu berkomunikasi publik secara efektif, serta memiliki keberanian mengambil keputusan strategis berbasis data. Dengan pendekatan ini, kepemimpinan PKS tidak lagi bertumpu pada intuisi semata, tetapi pada kompetensi yang terukur dan relevan dengan tuntutan elektoral.

Pasca pelantikan kepengurusan, BPPKP melakukan penajaman arah kerja dengan merumuskan program-program inti yang saling terhubung. Fokus utama diarahkan pada pembangunan sistem kepemimpinan yang modern dan adaptif, salah satunya melalui digitalisasi asesmen kader. Langkah ini menjadi titik balik penting dalam kaderisasi, karena memungkinkan partai memiliki basis data kompetensi kader secara menyeluruh. Asesmen kepemimpinan, rekam jejak pelatihan, kinerja organisasi, hingga pemetaan karakter kader dihimpun dalam satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk penempatan jabatan, penokohan, serta persiapan kontestasi politik.

Digitalisasi asesmen tidak semata bersifat administratif, melainkan menjadi alat strategis pemenangan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, partai dapat memastikan bahwa kader yang maju dalam pileg, pilkada, maupun pilkades adalah mereka yang paling siap secara kapasitas dan legitimasi publik. Target jangka menengahnya adalah tercapainya dokumentasi 100% data kompetensi kader sebagai fondasi talent pool PKS Jawa Timur.

Selain sistem, BPPKP juga menaruh perhatian besar pada penguatan ekosistem pelatih (trainer). Kesadaran bahwa pelatihan kepemimpinan berskala besar tidak mungkin bergantung pada figur tunggal mendorong BPPKP membangun jaringan trainer internal yang profesional dan tersertifikasi. Dengan sistem jenjang trainer yang jelas—dari junior hingga master trainer—BPPKP menargetkan mayoritas program pelatihan dapat ditangani oleh sumber daya internal partai. Strategi ini tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai dan ideologi dalam setiap proses kaderisasi.

Dalam perspektif jangka panjang, roadmap BPPKP 2026–2029 dirumuskan dalam lima pilar utama: pembangunan fondasi sistem kepemimpinan, akselerasi program dan ekosistem trainer, penguatan data dan penokohan, pembangunan talent pipeline, serta konsolidasi dan legacy. Roadmap ini menegaskan bahwa kerja BPPKP tidak berhenti pada pelatihan jangka pendek, tetapi diarahkan untuk menciptakan kesinambungan kepemimpinan lintas periode.

Evaluasi kritis menunjukkan bahwa tantangan terbesar BPPKP bukan semata teknis, melainkan kultural. Di tengah perubahan cepat masyarakat dan meningkatnya kompetisi politik, masih terdapat kecenderungan nyaman pada status quo dan rendahnya dorongan untuk meningkatkan kapasitas diri. Padahal, perubahan perilaku pemilih, tekanan kompetitor, serta dinamika politik nasional menuntut kader PKS untuk terus belajar dan beradaptasi. Tanpa upaya serius meningkatkan kualitas kepemimpinan, keunggulan moral dan ideologis berisiko tidak cukup untuk memenangkan kontestasi.

Memasuki tahun 2026, BPPKP memposisikan diri sebagai *supporting system* utama bagi strategi Kaderisasi dan Pelayanan Publik untuk Pemenangan Pemilu (K2P2). Fokus diarahkan pada penguatan internal organisasi melalui peningkatan kapasitas manajerial pengurus di seluruh jenjang, sekaligus penguatan peran pejabat publik sebagai etalase partai di mata masyarakat. Kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, dan kinerja publik yang nyata diyakini akan memperbesar peluang PKS meraih target dua digit pada Pemilu 2029.

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA (BINAPORA)

Membangun Raga, Merekat Bangsa, Menjemput Kemenangan

Binapora DPW PKS Jawa Timur memosisikan olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan instrumen strategis perjuangan politik jangka panjang. Politik dipahami sebagai maraton, bukan lari cepat—ia menuntut stamina, konsistensi, dan daya tahan. Dalam perspektif ini, kekuatan jasadiyah kader menjadi modal penting untuk menjaga militansi, kehadiran di tengah masyarakat, dan keberlanjutan kerja-kerja pemenangan hingga 2029. Olahraga menjadi medium paling cair untuk menyapa publik, meruntuhkan sekat ideologis, dan menghadirkan PKS sebagai partai yang sehat, ramah, dan membumi.

Sejak awal kepengurusan, Binapora bergerak cepat menangkap momentum meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga dan gaya hidup sehat. Aktivasi komunitas olahraga, turnamen e-sport, serta olahraga massal seperti senam dan jalan sehat menjadi pintu masuk efektif membangun kedekatan sosial. Lapangan olahraga menjelma ruang konsolidasi sosial-politik yang alami, di mana kader PKS hadir bukan sebagai juru kampanye, melainkan sebagai kawan berolahraga. Pendekatan ini secara perlahan mengikis stigma eksklusivitas dan membangun persepsi baru bahwa PKS adalah bagian dari keseharian masyarakat.

Secara organisatoris, Binapora dikembangkan dengan filosofi “total football”: semua lini bergerak dan saling menguatkan. Pembinaan olahraga prestasi dan komunitas, pengembangan e-sport, serta kebugaran rakyat ditempatkan sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Fokusnya bukan pada seremoni, melainkan keberlanjutan komunitas. Melalui komunitas olahraga dan e-sport, Binapora membangun basis relasi jangka panjang, terutama dengan generasi muda yang selama ini cenderung berjarak dengan politik formal. Hobi menjadi pintu masuk, kebersamaan menjadi jembatan, dan kepercayaan publik tumbuh secara organik.

Program unggulan Binapora dirancang dengan prinsip “masuk lewat hobi, pulang membawa persepsi”. Kader didorong untuk aktif di komunitas olahraga warga, membuka turnamen inklusif, dan menghadirkan ruang-ruang positif bagi anak muda, termasuk melalui e-sport. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan sosial PKS, tetapi juga membangun database relawan, simpatisan, dan pemilih muda yang potensial. Olahraga digital diposisikan sebagai bahasa baru politik anak muda—ruang di mana PKS bisa hadir tanpa kesan menggurui, tetapi tetap membawa nilai dan etika.

Memasuki 2026, Binapora menargetkan perluasan arena gerak dengan penguatan klub olahraga binaan, peningkatan kontribusi rekrutmen anggota baru, serta pengembangan liga olahraga internal PKS Jawa Timur. Lebih dari itu, atribut olahraga PKS diarahkan menjadi bagian dari budaya populer anak muda, sehingga identitas partai hadir secara natural dalam aktivitas keseharian. Semua ini diarahkan untuk memperkuat brand awareness PKS sebagai partai yang bugar, energik, dan relevan dengan zaman.

Dalam kerangka jangka menengah menuju 2029, Binapora menempatkan isu kesehatan dan kebugaran sebagai pintu masuk strategis. Kesadaran hidup sehat pascapandemi membuka ruang besar bagi PKS untuk hadir melalui olahraga murah, komunitas terbuka, dan aktivitas rekreatif yang positif. Strategi “*Zero Mission*” diterjemahkan dalam kebugaran total kader dan penghapusan jarak sosial antara tokoh PKS dengan masyarakat. Olahraga menjadi diplomasi sosial yang efektif—menciptakan kedekatan tanpa sekat, dialog tanpa formalitas, dan kepercayaan tanpa paksaan.

Nilai-nilai olahraga seperti fair play, sportivitas, dan daya tahan mental ditanamkan sebagai etos politik kader. Kader dilatih untuk siap menang dan siap berjuang, tidak mudah menyerah, serta tetap santun dalam kompetisi. Dengan jiwa atlet, kader PKS diharapkan mampu bertahan dalam tekanan politik, bangkit dari kekalahan, dan konsisten mengabdikan hingga peluit akhir demokrasi berbunyi.

Akhirnya, Binapora diproyeksikan sebagai simpul kolaborasi—baik internal dengan bidang kepemudaan dan humas,

maupun eksternal dengan ekosistem olahraga daerah. Sinergi ini memastikan bahwa kerja Binapora tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi besar pemenangan PKS Jawa Timur. Setiap keringat di lapangan olahraga diarahkan menjadi energi sosial, elektoral, dan spiritual bagi kemenangan 2029.

Badan Sehat, Ibadah Kuat, PKS Hebat.
Olahraga bukan sekadar gerak tubuh, tetapi jalan pengabdian dan perekat bangsa.

BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMBINAAN MASYARAKAT RENTAN DAN DISABILITAS (BPdKPMRD)

Fondasi Ideologis: Pelayanan sebagai Inti Perjuangan Politik

Keberadaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPdKPMRD) merupakan manifestasi ideologis dari visi PKS sebagai partai Islam *rahmatan lil alamin*. Bidang ini menegaskan bahwa perjuangan politik tidak berhenti pada perebutan kekuasaan, melainkan harus hadir nyata dalam membela kehidupan, martabat, dan masa depan manusia—terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan. Pendidikan, kesehatan, dan pembelaan terhadap kelompok marginal dipahami bukan sebagai program tambahan, tetapi sebagai inti dari politik keadilan sosial.

Dalam konteks Jawa Timur yang berpenduduk besar dan sangat beragam, tantangan pendidikan dan kesehatan bersifat struktural dan multidimensi. Ketimpangan akses, kualitas layanan yang belum merata, serta persoalan disabilitas dan kerentanan sosial menuntut kehadiran partai yang bukan sekadar responsif, tetapi proaktif dan sistematis. BPdKPMRD memosisikan diri sebagai penghubung antara nilai ideologis partai dan kebutuhan riil masyarakat, dengan orientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar charity.

Empat fokus strategis menjadi fondasi kerja bidang ini: penguatan jaminan kesehatan keluarga kader dan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, advokasi beasiswa dan pengembangan kapasitas SDM, serta pembinaan masyarakat rentan dan penyandang disabilitas secara inklusif. Semua diarahkan untuk membangun manusia Jawa Timur yang sehat, berilmu, berdaya, dan bermartabat—sejalan dengan cita-cita Indonesia madani.

Narasi Perjalanan: Kerja Sunyi, Tantangan Nyata, dan Pembelajaran Lapangan

Perjalanan BPdKPMRD sepanjang 2025 adalah kisah kerja sunyi di tengah keterbatasan. Banyak inisiatif lahir dari praktik baik di akar rumput—tokoh-tokoh lokal yang dengan dedikasi tinggi

mengabdikan diri pada pendidikan inklusif, pendampingan anak berkebutuhan khusus, penanganan stunting, dan pemberdayaan keluarga rentan. Dari pengalaman inilah lahir gagasan program berkelanjutan seperti Sahabat PKK dan Rumah Pintar, yang memanfaatkan kantor partai sebagai pusat layanan sosial-edukatif terbuka bagi masyarakat.

Namun, realitas organisasi menunjukkan tantangan serius. Belum meratanya struktur pelaksana di tingkat DPD menjadi hambatan utama. Keterbatasan SDM, luasnya wilayah Jawa Timur, serta beban kerja kader membuat implementasi program belum optimal. Selain itu, sektor kesehatan menghadapi persoalan klasik: meski kepesertaan BPJS tinggi, akses layanan berkualitas masih timpang, terutama di wilayah terpencil. Di sisi lain, pembinaan disabilitas dihadapkan pada stigma sosial, minimnya data, dan rendahnya aksesibilitas fasilitas publik. Dari situ lahir pembelajaran penting: program yang kuat membutuhkan struktur yang solid, kolaborasi lintas bidang, dan pendekatan berbasis data. BPdKPMRD mulai menata strategi rekrutmen PIC, penguatan relawan internal, pendampingan berjenjang antar daerah, serta pembangunan jejaring dengan mitra strategis. Evaluasi dilakukan secara jujur—bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memastikan kerja pelayanan partai semakin efektif dan berdampak luas.

Proyeksi 2026: Integrasi Layanan, Inovasi, dan Penguatan Dampak

Memasuki 2026, BPdKPMRD mengarahkan langkahnya melampaui rutinitas program menuju pembangunan sistem pelayanan yang terintegrasi. Keluarga ditempatkan sebagai basis utama pembangunan kader dan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan pembinaan sosial tidak lagi berjalan terpisah, tetapi disatukan dalam satu ekosistem pelayanan partai yang berkelanjutan.

Inovasi strategis difokuskan pada lima pilar besar: transformasi kesehatan berbasis pencegahan dan pendataan kader, edukasi masif pemanfaatan BPJS, advokasi beasiswa pendidikan inklusif, penguatan komunitas profesi pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan

kemitraan strategis lintas sektor. Kantor partai diproyeksikan sebagai *Rumah Sehat* dan pusat layanan edukatif, sementara kader dipersiapkan sebagai relawan terlatih yang mampu melakukan pendampingan sosial secara bermartabat.

Program inklusi disabilitas dan masyarakat rentan diarahkan pada perubahan paradigma: dari belas kasihan menuju pemberdayaan. Melalui Sahabat PKK dan gerakan AKSES PKK, kader tidak hanya melayani, tetapi juga mengadvokasi kebijakan dan membangun kesadaran publik. Pelatihan berjenjang dan ToT disiapkan untuk memastikan keberlanjutan relawan dan kesiapan struktur menghadapi isu kemanusiaan.

Keseluruhan arah ini menegaskan posisi BPdKPMRD sebagai wajah pelayanan PKK Jawa Timur. Dengan pelayanan yang tulus, sistem yang rapi, dan kolaborasi yang kuat, BPdKPMRD berkomitmen mengawal PKK sebagai partai pelayan umat dan bangsa—hadir bagi yang lemah, menguatkan yang rentan, dan memuliakan kemanusiaan.

BIDANG PEMUDA PELAJAR DAN MAHASISWA (BPPM) Menyiapkan Generasi Pemimpin, Memperkuat Basis Pemuda, Mengamankan Masa Depan Partai

Konsolidasi Kelembagaan sebagai Fondasi Gerak Pemuda

Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa (BPPM) DPW PKS Jawa Timur memposisikan fase pasca pelantikan 2025 sebagai tahap konsolidasi dan perencanaan strategis, bukan eksekusi instan. Pilihan ini didasarkan pada kesadaran bahwa kerja-kerja kepemudaan yang bersifat strategis menuntut fondasi organisasi yang kuat, struktur yang jelas, serta pemahaman mandat yang seragam hingga tingkat daerah. Dalam konteks Jawa Timur yang memiliki keragaman kesiapan struktur dan SDM antar kabupaten/kota, konsolidasi dipandang sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan program jangka menengah.

Pada fase ini, BPPM memfokuskan diri pada penataan struktur internal DPW, internalisasi fungsi dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta pengawalan kesiapan BPPM DPD. Evaluasi menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada ketiadaan program, melainkan pada ketimpangan kesiapan kelembagaan di daerah, termasuk perangkapan jabatan dan keterbatasan SDM khusus BPPM. Refleksi ini mendorong BPPM menempatkan penguatan sistem sebagai prioritas, agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya tidak bersifat administratif, tetapi berdampak dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, BPPM menegaskan dirinya bukan sebagai bidang seremonial pemuda, melainkan sebagai instrumen strategis Partai dalam membaca perubahan sosial generasi muda dan menyiapkan infrastruktur kaderisasi jangka menengah menuju 2026 dan Pemilu 2029.

Enam Kegiatan Utama sebagai Mesin Kaderisasi dan Dukungan Politik Pemuda

Kerja BPPM disusun berbasis kegiatan nyata, bukan narasi program unggulan semata. Enam Kegiatan Utama—Muda Mandiri, Training for Youth Facilitator, Pembinaan Organisasi Sayap dan

Jaringan, Akademi Pemimpin Muda Indonesia, Jatim Muda Bicara, dan Jalan Muda Parlemen—diposisikan sebagai mesin operasional untuk menjalankan tiga fungsi utama BPPM: pengembangan pemuda, pembangunan dukungan politik, dan perjuangan aspirasi pemuda.

Dari enam kegiatan tersebut, Pembinaan Organisasi Sayap dan Jaringan (POJ) serta Jalan Muda Parlemen (JMP) ditetapkan sebagai kegiatan paling strategis dan wajib terlaksana hingga tingkat kabupaten/kota. POJ diarahkan untuk membangun ekosistem pemuda Partai melalui penguatan Gema Keadilan, Garuda Keadilan, dan komunitas PKS Muda sebagai basis kaderisasi ekstensifikasi dan dukungan elektoral. Sementara itu, JMP diproyeksikan sebagai investasi politik jangka menengah dalam menyiapkan kader legislatif muda yang berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan, dan kesiapan elektoral.

Kegiatan lain—Muda Mandiri, TYF, APMI, dan JMB—berfungsi sebagai penguat kualitas SDM pemuda, ketahanan kader, serta pembentukan opini publik di segmen pemilih muda. Seluruh kegiatan dirancang selaras dengan Fokus K2P2 dan IKP BPPM, sehingga kinerja BPPM tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari kontribusi nyata terhadap kaderisasi, basis pemuda, dan pemenangan Partai.

Proyeksi 2026: Regenerasi Kepemimpinan dan Infrastruktur Elektoral Pemuda

Tahun 2026 diposisikan sebagai fase awal eksekusi terstruktur atas fondasi yang telah dibangun. Fokus utama BPPM diarahkan pada penegasan struktur mandiri BPPM di DPD, pemenuhan dan penguatan SDM daerah, serta pelaksanaan bertahap Kegiatan Utama berbasis kesiapan wilayah. Pendekatan diferensiasi daerah diterapkan untuk menjaga kualitas implementasi sekaligus mencegah beban administratif yang tidak proporsional.

Dalam kerangka jangka menengah menuju Pemilu 2029, BPPM menempatkan dirinya sebagai penyedia infrastruktur sosial-politik pemuda Partai. POJ berfungsi memperluas dan mengokohkan

basis pemilih muda yang terorganisir, sementara JMP memastikan tersedianya SDM politik muda yang siap diproyeksikan sebagai calon legislator. Kegiatan pendukung memperkuat militansi, kapasitas, dan citra PKS sebagai representasi politik pemuda.

Dengan strategi ini, BPPM menegaskan bahwa kerja kepemudaan adalah investasi, bukan peristiwa sesaat. Keberhasilan BPPM diukur dari kemampuannya membangun sistem kaderisasi dan kepemimpinan pemuda yang berkelanjutan, terdistribusi, dan berdampak langsung pada kekuatan Partai di masa depan. Pemuda bukan hanya penerus, tetapi penentu arah kemenangan PKS Jawa Timur.

BIDANG PEMENANGAN PEMILU DAN PILKADA (BP3) Mengorkestrasi Kemenangan, Menjaga Arah, Mengamankan Target Elektoral

Posisi Strategis BP3 dalam Arsitektur Kemenangan PKS Jawa Timur

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) menempati posisi sentral dalam struktur perjuangan PKS Jawa Timur. Ukuran keberhasilan partai politik pada akhirnya bermuara pada capaian elektoral: perolehan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kemenangan kader dalam kontestasi pilpres dan pilkada. Dalam konteks inilah BP3 berfungsi sebagai *leading agency* yang mengorkestrasi seluruh potensi partai agar bergerak serempak menuju target kemenangan.

Pada periode 2025–2030, PKS mengusung kerangka besar K2P2, yakni kemenangan pemilu yang tidak semata-mata berorientasi kursi, tetapi ditopang oleh kekuatan kader sebagai aktor utama. Pendekatan ini menghadirkan tantangan tersendiri, mengingat tidak semua daerah pemilihan memiliki ketersediaan SDM kader yang ideal, sementara kompetisi elektoral semakin pragmatis. BP3 berada di garis depan untuk menjembatani idealisme K2P2 dengan realitas lapangan, memastikan bahwa strategi pemenangan tetap efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Relevansi BP3 semakin menguat seiring visi besar DPW PKS Jawa Timur untuk menembus dua digit kursi DPRD Provinsi pada Pemilu 2029, dengan target minimal 12 kursi. Target ini menempatkan BP3 sebagai bidang strategis yang bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian visi tersebut, sekaligus menjadi simpul kolaborasi lintas bidang agar seluruh energi partai terkonsolidasi dalam agenda pemenangan.

Konsolidasi Awal dan Tantangan Pemetaan Dapil

Pasca pelantikan kepengurusan, BP3 memfokuskan fase awal kerja pada konsolidasi internal dan penguatan pemahaman tupoksi.

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi penyusunan struktur kepengurusan bidang, pendalaman mandat melalui forum rakernas, rakerwil, rakortas bersama BPH DPW, serta rapat pleno DPW. Selain itu, BP3 mulai merancang agenda kerja 2026 dengan penekanan pada penyusunan peta dapil dan pemetaan Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) sebagai fondasi strategis pemenangan.

Upaya konsolidasi diperluas ke daerah melalui rakor dengan BP3 di 38 kabupaten/kota, silaturahmi dan diskusi target kursi dengan DPD, serta penyampaian gambaran kerja BP3 di berbagai forum rakerda. Aktivitas ini bertujuan membangun kesamaan persepsi sekaligus mengumpulkan data awal terkait potensi dan tantangan dapil di masing-masing wilayah.

Evaluasi internal menunjukkan dua tantangan utama. Pertama, keterbatasan SDM BP3 di tingkat wilayah untuk mengelola kompleksitas 14 dapil provinsi yang mencakup 38 kabupaten/kota. Kedua, keterbatasan data, khususnya terkait peta kompetitor, yang menyulitkan penyusunan peta dapil komprehensif pada tahap awal. Untuk merespons hal tersebut, BP3 mengambil langkah taktis dengan menggali data lintas bidang—terutama dari Badan Pengembangan Daerah, ketua zona, DPD, serta kader senior—sembari secara bertahap membangun basis data internal dan eksternal sebagai fondasi analisis pemenangan.

Arah 2026: Pemetaan Strategis dan Kolaborasi Kemenangan

Tahun 2026 diposisikan sebagai fase krusial bagi BP3 untuk beranjak dari konsolidasi menuju eksekusi strategis. Fokus utama diarahkan pada pemetaan dapil berbasis pendekatan K2P2 dan P2, guna memastikan setiap daerah pemilihan memiliki strategi pemenangan yang kontekstual dan realistis. BP3 menargetkan tersusunnya peta dapil yang lebih tajam, termasuk identifikasi dapil berat yang memerlukan terobosan khusus untuk mengejar target kursi.

Kolaborasi lintas bidang menjadi kunci. BP3 akan memperkuat sinergi dengan Bidang Pengembangan Daerah serta bidang-bidang lain untuk melakukan *detailing* peta dapil hingga level teknis, sekaligus

mengoptimalkan dukungan pejabat publik dan anggota DPR RI dalam mengawal target kursi provinsi, terutama di dapil yang belum memiliki representasi legislatif provinsi.

Secara keseluruhan, arah kerja BP3 menegaskan bahwa kemenangan elektoral bukan hasil kerja sektoral, melainkan buah dari orkestrasi yang rapi, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh elemen partai. BP3 hadir sebagai pengarah irama kemenangan—menjaga fokus, menyatukan langkah, dan memastikan bahwa target besar PKS Jawa Timur pada 2029 bergerak dari visi menjadi realitas.

BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN NELAYAN

Menguatkan Pangan Rakyat, Menegakkan Kedaulatan, Menumbuhkan Basis PKS

Petani–Peternak–Nelayan Kuat sebagai Fondasi Kedaulatan dan Basis Sosial PKS

Bidang Pertanian, Peternakan, dan Nelayan diposisikan sebagai bidang strategis karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan isu fundamental ketahanan pangan. Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional memiliki potensi besar sekaligus persoalan struktural: fluktuasi harga, lemahnya posisi tawar produsen kecil, keterbatasan akses modal dan teknologi, serta panjangnya rantai distribusi. Ketahanan pangan tidak akan terwujud tanpa penguatan aktor utamanya—petani, peternak, dan nelayan.

Bidang ini mengusung narasi “Petani, Peternak, Nelayan Kuat – Indonesia Berdaulat” sebagai kerangka kerja, bukan sekadar slogan. Kekuatan dimaknai secara menyeluruh: ekonomi yang layak, pengetahuan dan keterampilan, jejaring organisasi, serta posisi tawar dalam sistem pangan. Kerja bidang diarahkan sebagai instrumen dakwah dan pelayanan politik PKS yang membumi, melalui keberpihakan nyata, pemberdayaan berkelanjutan, dan advokasi kebijakan. Dengan demikian, sektor pangan menjadi pintu masuk strategis penguatan basis sosial jangka panjang PKS di Jawa Timur.

Kerja Terstruktur Berbasis Lapangan: Pemetaan, Pendampingan, dan Penguatan Pasar

Pasca pelantikan, bidang ini memulai kerja dengan konsolidasi internal dan pemetaan potensi serta persoalan sektor pangan di berbagai wilayah. Pemetaan menjadi fondasi agar program tidak seremonial, tetapi berbasis kebutuhan riil. Dari fase ini, kerja bidang disusun dalam tiga klaster utama yang saling terhubung: konsolidasi dan pemetaan wilayah, Sekolah Tani Ternak Nelayan (STTN), dan Pasar Tani.

STTN menjadi instrumen utama peningkatan kapasitas dan ketahanan pelaku sektor pangan melalui pendampingan langsung, adaptif, dan berkelanjutan. Sementara Pasar Tani berfungsi memperkuat jejaring hulu–hilir, membuka ruang advokasi kebijakan, serta membangun legitimasi bidang di mata mitra eksternal. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan lapangan, keterlibatan kader lokal, dan kehadiran yang konsisten menghasilkan respons komunitas yang lebih kuat. Tantangan seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan variasi kapasitas struktur daerah dihadapi dengan pendekatan kolaboratif dan pembelajaran organisasi berkelanjutan.

Arah 2026: Integrasi Dakwah, Kaderisasi, dan Pemenangan Berbasis Pangan

Tahun 2026 ditetapkan sebagai fase penguatan dampak. Kerja bidang diarahkan untuk terintegrasi penuh dengan agenda besar partai melalui kerangka K2–P2: dakwah dan pelayanan yang melahirkan kader sekaligus menopang pemenangan pemilu. Program bidang bukan hanya alat pendampingan ekonomi, tetapi ruang kaderisasi lapangan yang melatih kepemimpinan, kepekaan sosial, dan kemampuan teknis kader PKS di sektor pangan.

Kontribusi terhadap pemenangan pemilu dibangun melalui penguatan basis massa organik di desa pertanian, sentra peternakan, dan komunitas nelayan, dengan narasi politik yang membumi dan beretika. Inovasi program 2026—STTN berjenjang, Pasar Tani terpadu, Jambore Petani–Peternak–Nelayan, serta Gerakan Regenerasi Pangan Muda—dirancang sebagai alat pelayanan, kaderisasi, dan penguatan citra PKS secara simultan. Dengan kolaborasi internal lintas bidang dan dukungan eksternal, khususnya aleg DPR RI, bidang ini diarahkan menjadi pilar penting ketahanan pangan sekaligus mesin penguatan basis sosial dan elektoral PKS Jawa Timur.

BIDANG ADVOKASI PARTAI

Dari Pembelaan Hukum Menuju Instrumen Kemenangan Bermartabat

Advokasi sebagai Garda Ideologis, Politik, dan Elektoral Partai

Bidang Advokasi Partai (BAP) diposisikan bukan sekadar unit bantuan hukum, melainkan garda depan pembelaan konstitusional partai, kader, dan rakyat. Di tengah meningkatnya konflik hukum, kriminalisasi politik, sengketa pemilu, serta ketidakadilan struktural, kehadiran BAP menjadi kebutuhan strategis bagi PKS Jawa Timur. Advokasi dimaknai sebagai kerja simultan: hukum, sosial, dan politik, yang saling menguatkan.

Transformasi paradigma advokasi menjadi kunci. BAP diarahkan tidak hanya reaktif menangani kasus, tetapi progresif, preventif, dan elektoral. Artinya, setiap kerja advokasi harus membangun kesadaran hukum, memperkuat kepercayaan publik, serta berkontribusi pada konsolidasi dan pemenangan politik. Dengan pendekatan ini, advokasi menjadi instrumen ideologis untuk menegaskan citra PKS sebagai partai pembela rakyat dan penjaga keadilan konstitusional di Jawa Timur.

Kerja Nyata dan Konsolidasi: Advokasi sebagai Pintu Masuk Kepercayaan Publik

Pasca pembentukan dan pelantikan, BAP bergerak membangun struktur kerja, jejaring advokat, dan respons cepat atas kasus-kasus nyata. Dalam fase awal, BAP menangani berbagai perkara strategis—mulai dari sengketa koperasi, korban narkoba, kekerasan terhadap anak, hingga pembelaan kader dari framing media. Kerja ini memperlihatkan bahwa advokasi yang hadir tepat waktu mampu meningkatkan kepercayaan internal kader dan membuka ruang konsolidasi politik di akar rumput.

Evaluasi menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada keterbatasan SDM hukum daerah, data kasus, pendanaan, serta persepsi keliru bahwa BAP adalah “pengacara pribadi” untuk seluruh

urusan kader. BAP merespons dengan membangun SOP advokasi, jejaring advokat–paralegal berbasis kader, sinergi dengan struktur dan ormas, serta dokumentasi advokasi yang terukur. Pelajaran penting yang muncul: advokasi tanpa data mudah dilupakan, dan advokasi tanpa konsolidasi politik hanya menjadi kerja sosial. Konsistensi, sistem kerja, dan integrasi dengan strategi partai menjadi kebutuhan mutlak.

Arah 2026: Advokasi Terstruktur untuk Konsolidasi dan Kemenangan

Tahun 2026 ditetapkan sebagai fase penguatan sistem dan dampak. BAP diarahkan menjadi mesin advokasi terintegrasi yang menopang agenda besar partai melalui penguatan literasi hukum, kaderisasi advokat, dan advokasi kebijakan publik. Program seperti Sekolah Hukum, Helpdesk Advokasi 24 jam, kajian legislasi progresif, serta penguatan advokasi pemilu dirancang untuk menjadikan advokasi sebagai alat pelayanan, pendidikan politik, dan pemenangan secara bersamaan.

Target BAP tidak hanya diukur dari jumlah kasus, tetapi dari konversi advokasi menjadi kepercayaan publik, basis politik, dan kesiapan kader hukum di seluruh Jawa Timur. Dengan integrasi data, SOP nasional, kolaborasi lintas bidang, serta sinergi dengan wakil rakyat, BAP diarahkan menjadi jantung keberpihakan PKS—menghadirkan keadilan, menjaga martabat kader, dan mengawal kemenangan PKS Jawa Timur secara berkelanjutan dan bermartabat.

BIDANG RELAWAN DAN SAKSI

Refleksi Kinerja dan Peta Jalan Kemenangan

Bidang Relawan dan Saksi (BRS) DPW PKS Jawa Timur lahir sebagai jawaban atas kebutuhan strategis pemenangan pemilu yang semakin kompleks dan kompetitif. Sebagai bidang baru pada periode kepengurusan 2025–2030, BRS dibentuk dengan kesadaran bahwa kemenangan elektoral tidak lagi cukup ditopang oleh mesin partai semata, melainkan membutuhkan kekuatan relawan yang terorganisasi, saksi yang terlatih, serta jaringan lapangan yang bekerja secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, BRS diposisikan sebagai ujung tombak pemenangan dan pengamanan suara partai, baik pada pemilu nasional maupun pilkada.

Tugas pokok BRS diarahkan untuk membangun, mengorganisasi, dan menggerakkan relawan serta saksi sebagai kekuatan strategis partai. Fungsi tersebut dijalankan melalui rekrutmen dan pembinaan relawan-saksi yang militan dan loyal, pengorganisasian jaringan hingga tingkat bawah, pengamanan suara di TPS, serta penguatan militansi ideologis berbasis pendidikan politik dan kerja sosial. BRS tidak hanya diproyeksikan sebagai struktur teknis pemilu, tetapi sebagai ekosistem perjuangan yang menumbuhkan rasa memiliki, kesetiaan, dan keterikatan emosional relawan terhadap PKS.

Pada fase awal pembentukan, fokus kerja BRS Jawa Timur masih berada pada konsolidasi internal dan penyelarasan pemahaman tugas pokok dan fungsi di seluruh tingkatan wilayah. Pembentukan struktur BRSW dan BRSD menjadi fondasi awal yang penting, disertai dengan upaya membangun komunikasi dan koordinasi melalui forum-forum rapat, rakor, serta kanal komunikasi digital. Meski capaian kerja masih terbatas dan belum menghasilkan output kuantitatif yang signifikan, fase ini menjadi periode krusial untuk membangun kesamaan persepsi dan arah gerak organisasi.

Evaluasi internal menunjukkan bahwa keberhasilan utama BRS terletak pada terbentuknya jejaring koordinasi antara BRS wilayah dan daerah, serta mulai terbangunnya ruang komunikasi yang

menghubungkan seluruh struktur. Namun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang harus diakui secara jujur. Sebagai bidang baru, BRS masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan sumber daya manusia, pemahaman tupoksi yang belum merata, serta intensitas koordinasi yang belum optimal. Keterbatasan ini menjadi catatan penting agar ke depan BRS dapat bergerak lebih sistematis dan terukur.

Dari proses evaluasi tersebut, BRS Jawa Timur menarik pelajaran strategis bahwa data saksi pemilu sebelumnya merupakan modal awal yang sangat berharga. Data yang rapi, valid, dan terawat akan menjadi fondasi utama untuk membangun kekuatan relawan yang solid dan berkelanjutan. Selain itu, merawat relawan dan saksi tidak dapat dilakukan secara insidental, melainkan harus menjadi kerja jangka panjang yang terstruktur agar biaya politik ke depan lebih ringan dan efektivitas kemenangan semakin tinggi.

Memasuki tahun 2026, BRS Jawa Timur menetapkan arah strategis melalui renstra dan inovasi program yang berfokus pada dua hal utama: penguatan basis relawan dan institusionalisasi kerja lapangan. Program unggulan diarahkan pada pengembangan kader patriot dan jejaring wakil rakyat, sementara inovasi difokuskan pada pendataan relawan berbasis saksi TPS, relawan caleg, serta relawan kegiatan partai. Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah rencana pendirian Rumah Perjuangan PKS di tingkat DPC sebagai pusat konsolidasi, pelayanan, dan aktivitas relawan.

Target 2026 dirumuskan secara realistis namun progresif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, BRS menargetkan terbentuknya basis relawan pada sebagian TPS eksisting, terdatanya relawan berbasis caleg dan kegiatan partai, serta berdirinya Rumah Perjuangan PKS di sebagian DPC. Secara kualitatif, BRS menekankan pentingnya konsolidasi rutin lintas struktur dan terbentuknya komunitas relawan PKS yang solid, militan, dan berkesinambungan.

Pada akhirnya, Bidang Relawan dan Saksi hadir sebagai pilar strategis untuk memastikan kemenangan PKS Jawa Timur berjalan secara terukur, bermartabat, dan berkelanjutan. Dengan semangat

Siaga, Berani, dan Setia, BRS diharapkan mampu menjadi pengikat energi relawan, penjaga suara partai, sekaligus penguat kehadiran PKS di tengah masyarakat. Tahun 2026 menjadi fase penting untuk meletakkan fondasi kokoh, agar langkah menuju kemenangan ke depan dapat ditempuh dengan lebih ringan, solid, dan penuh keyakinan.

BIDANG KEPANDUAN DAN BELA NEGARA (BKBN)

Refleksi Strategis dan Proyeksi Perjuangan

Bidang Kepanduan dan Bela Negara (BKBN) DPW PKS Jawa Timur menempati posisi strategis dalam menopang ketahanan organisasi dan kesiapsiagaan kader menghadapi dinamika sosial, kebangsaan, dan politik menuju 2026. Kehadiran BKBN dilandasi kesadaran bahwa perjuangan politik tidak pernah berlangsung di ruang steril, melainkan selalu bersentuhan dengan realitas lapangan: kerumunan massa, agenda publik berskala besar, kondisi darurat, hingga krisis kemanusiaan. Tanpa kader yang terlatih, disiplin, dan berkarakter, visi besar Partai berisiko kehilangan daya jangkarnya di tengah masyarakat.



KERJA-KERJA KEMANUSIAAN: Ketua DPW PKS Jawa Timur melepas relawan kemanusiaan yang hendak berangkat ke Aceh Tamiang.

BKBN dirancang bukan sebagai pelengkap struktural, melainkan sebagai garda siaga Partai. Kepanduan membentuk karakter dan disiplin kader, bela negara menanamkan nasionalisme dan patriotisme, sementara fungsi pengamanan memastikan stabilitas dan keselamatan gerak organisasi. Ketiganya menyatu dalam satu filosofi kerja: tegas namun humanis, siap siaga namun beretika, kuat namun berpihak pada kemaslahatan. Dalam kerangka Islam rahmatan lil ‘alamin, kekuatan dimaknai untuk melindungi, bukan menakutkan; disiplin untuk menata, bukan mengekang.

Pasca pelantikan kepengurusan DPW PKS Jawa Timur, BKBN menghadapi tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Jawa Timur sebagai provinsi luas dan heterogen menuntut pendekatan pembinaan yang fleksibel namun tetap terstandar. Pembagian wilayah ke dalam lima Bidang Pembinaan Daerah (BPD) menjadi strategi lapangan agar pembinaan, pengamanan, dan pelayanan dapat berjalan lebih terukur dan responsif. Penetapan struktur BKBN wilayah dan BPD menjadi fondasi awal konsolidasi, dengan tantangan utama menyatukan beragam latar belakang kader ke dalam satu irama kerja kolektif.

Berbagai kegiatan konsolidatif seperti latihan kepanduan, serah terima jabatan, dan kembara menjadi ruang penting untuk menghidupkan kembali barisan. Kegiatan-kegiatan ini tidak dimaknai sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai proses penyatuan visi, penguatan ukhuwah, dan refleksi kedisiplinan kader. Di sinilah BKBN belajar bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh kedalaman pengalaman bersama yang menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif.

Pemutakhiran data SDM kepanduan menjadi capaian penting yang membuka realitas objektif kondisi lapangan. Tingkat keaktifan kader menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang kepanduan, tantangan personal dan sosial semakin kompleks. Faktor ekonomi, kesehatan, dan dinamika keluarga menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan. BKBN memandang kondisi ini bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai peta masalah yang harus didekati dengan empati. Pendekatan dialogis, penyesuaian ritme pembinaan, serta penguatan dukungan moral menjadi strategi untuk menjaga ikatan kader dengan organisasi.

Evaluasi kritis menunjukkan sejumlah keberhasilan strategis. BKBN tetap mampu menjalankan fungsi dasar kepanduan dan pengamanan di tengah keterbatasan. Lebih dari itu, proses pembinaan kepanduan terbukti mampu melahirkan kader-kader unggul yang dipercaya mengemban amanah strategis di Partai, bahkan hingga level kepemimpinan wilayah. Hal ini menegaskan bahwa BKBN adalah

ruang kaderisasi lapangan yang efektif dalam membentuk kepemimpinan, militansi, dan integritas.

Namun, evaluasi juga mengungkap tantangan serius. Citra kependuan masih kerap dipersempit sebagai kerja teknis lapangan semata, belum sepenuhnya dipahami sebagai proses pembinaan karakter dan bela negara. Penarikan kader terbaik ke posisi strategis lain, tanpa sistem regenerasi yang kuat, berpotensi melemahkan daya dukung internal BKBN. Di sisi lain, keterbatasan sosial-ekonomi kader menuntut pendekatan pengelolaan SDM yang lebih adaptif dan inovatif.

Memasuki 2026, BKBN memosisikan diri sebagai instrumen penting implementasi kerangka K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu). Fokus diarahkan pada penguatan karakter dan militansi kader, pembinaan berjenjang yang terintegrasi, serta kontribusi langsung dalam pelayanan publik dan penguatan basis sosial. Program kependuan dan bela negara dijadikan pintu masuk pemenangan berbasis dapil, dengan pendekatan kehadiran nyata, disiplin organisasi, dan pengabdian kemanusiaan.

Pada akhirnya, kemenangan yang dituju bukan sekadar kemenangan elektoral, melainkan kemenangan nilai dan keteladanan. BKBN dipanggil untuk memastikan bahwa perjuangan PKS Jawa Timur tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga kokoh secara karakter, disiplin, dan pengabdian—sebuah kemenangan yang bermartabat dan berkelanjutan.

BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN LINGKUNGAN HIDUP (EKUIN LH)

Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Lingkungan Hidup (EKUIN LH) DPW PKS Jawa Timur memegang peran strategis dalam menghubungkan perjuangan politik dengan realitas keseharian rakyat. Bidang ini berdiri di simpul paling sensitif antara kebijakan publik dan kebutuhan langsung masyarakat: kesejahteraan ekonomi, kemandirian daerah, ketahanan industri, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Keempat pilar ini bukan sekadar isu teknokratis, melainkan fondasi utama kepercayaan publik dan daya saing politik PKS menuju 2026 dan seterusnya.

Konteks Jawa Timur pasca pelantikan DPW diwarnai oleh tantangan fiskal yang serius. Penurunan signifikan kapasitas keuangan provinsi akibat perubahan skema Dana Transfer ke Daerah dan opsen pajak kendaraan bermotor berdampak langsung pada ruang gerak kebijakan publik. Dalam situasi ini, PKS—sebagai bagian dari partai pengusung kepemimpinan daerah—memikul tanggung jawab moral dan politik untuk menghadirkan solusi yang realistis, adil, dan berpihak pada rakyat. Di sinilah EKUIN LH diposisikan sebagai laboratorium gagasan ekonomi-politik wilayah, yang tidak hanya merespons masalah, tetapi juga menyiapkan arah kebijakan alternatif yang kredibel.

Filosofi kerja EKUIN LH bertumpu pada keyakinan bahwa kemenangan politik hanya mungkin dicapai jika ditopang oleh kredibilitas gagasan dan keberpihakan nyata. Ekonomi berkeadilan dimaknai sebagai distribusi manfaat pembangunan yang merata; industri bernilai tambah sebagai upaya keluar dari jebakan ekonomi berbasis bahan mentah; keuangan inklusif sebagai pembuka akses modal dan literasi; serta lingkungan hidup berkelanjutan sebagai syarat mutlak pembangunan jangka panjang. Dengan filosofi ini, EKUIN LH tidak berdiri sebagai pengamat, melainkan sebagai penggerak narasi dan advokasi kebijakan publik yang membumi.

Pasca pelantikan, langkah awal EKUIN LH diarahkan pada konsolidasi internal dan penataan arah kerja. Pemetaan kapasitas sumber daya manusia, pembagian fokus sub-bidang, serta penyelarasan dengan visi DPW menjadi fondasi penting untuk membangun kerja kolektif. Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bidang menjadi tonggak kelembagaan yang menegaskan posisi EKUIN LH sebagai think tank ekonomi-politik wilayah, jembatan antara isu ekonomi riil rakyat dan agenda kebijakan Partai, sekaligus penggerak program ekonomi yang berdampak.

Peran EKUIN LH sebagai penyaji gagasan strategis di Rakorwil memperkuat posisinya sebagai rujukan substantif ekonomi di lingkungan DPW dan DPD. Namun refleksi kritis juga muncul: gagasan tidak boleh berhenti di ruang diskusi. Tantangan terbesar bidang ini adalah mentransformasikan narasi dan analisis menjadi program konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari sinilah kesadaran kolektif mulai tumbuh bahwa ekonomi tidak cukup dibahas, tetapi harus dihadirkan dalam bentuk solusi nyata.

Evaluasi kinerja menunjukkan sejumlah capaian penting: meningkatnya kesadaran internal bahwa isu ekonomi dan lingkungan sangat menentukan pelayanan publik dan kemenangan pemilu, dimulainya pemetaan isu ekonomi riil Jawa Timur, serta terbukanya ruang dialog dengan pelaku ekonomi lintas sektor. Namun, evaluasi juga menyingkap keterbatasan yang harus diakui secara jujur. Program unggulan yang masif belum terbentuk, data kuantitatif terstruktur masih terbatas, dan koordinasi lintas bidang serta lintas struktur belum optimal. Bidang ini juga mengakui bahwa pendekatan diskursif masih lebih dominan dibanding eksekusi, serta pemanfaatan jejaring legislatif dan mitra strategis belum maksimal.

Dari proses ini, EKUIN LH menarik pelajaran mendasar: program ekonomi harus sederhana, relevan, dan terukur; lingkungan hidup bukan isu elit, melainkan isu keseharian rakyat; dan advokasi kebijakan harus dirancang agar dampaknya bisa dirasakan, bukan sekadar diperdebatkan. Pelajaran ini menjadi bekal penting untuk memasuki fase berikutnya.

Memasuki 2026, arah strategis EKUIN LH ditegaskan sebagai opinion leader dan pusat advokasi kebijakan ekonomi dan lingkungan hidup di Jawa Timur. Kontribusi utama bidang ini diarahkan pada kerangka K2P2, khususnya aspek Pelayanan Publik, melalui penguatan program Advokasi Kebijakan Pro Rakyat (AKAR). EKUIN LH diharapkan memimpin penyusunan policy brief, narasi publik, dan agenda advokasi yang dapat digunakan oleh anggota legislatif sebagai instrumen nyata pembelaan terhadap kepentingan rakyat.

Peta jalan kemenangan 2026 bagi EKUIN LH tidak dimaknai semata sebagai akumulasi kegiatan, tetapi sebagai proses membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang masuk akal, berpihak, dan berkelanjutan. Dengan sinergi bersama aleg DPR RI, DPRD Provinsi, akademisi, pelaku industri, dan komunitas lingkungan, EKUIN LH diarahkan menjadi simpul penting yang menghubungkan gagasan, kebijakan, dan kebutuhan rakyat.

Pada akhirnya, keberhasilan bidang ini akan diukur dari sejauh mana PKS dipersepsikan sebagai partai yang memahami persoalan ekonomi rakyat dan mampu menawarkan solusi yang realistis. Inilah makna kemenangan yang ingin dituju: kemenangan nilai, kepercayaan, dan keberpihakan—sebagai fondasi kuat menuju kemenangan politik yang bermartabat dan berkelanjutan.

BIDANG PEMBANGUNAN UMMAT DAN KERUKUNAN BERAGAMA (BPUKB)

Ruh Keumatan dan Jangkar Kerukunan Jawa Timur

Bidang Pembangunan Ummat dan Kerukunan Beragama (BPUKB) DPW PKS Jawa Timur menempatkan diri sebagai ruh keumatan dan kompas moral partai di wilayah yang menjadi barometer religiusitas nasional. Jawa Timur dengan ribuan pesantren, tokoh agama, dan keberagaman keyakinan menuntut pendekatan politik yang tidak semata elektoral, tetapi membumi, menenangkan, dan menyatukan. Dalam konteks inilah BPUKB hadir untuk memastikan bahwa perjuangan politik PKS berpijak pada nilai-nilai keimanan, akhlak, dan kebangsaan yang inklusif.

Sepanjang paruh kedua 2025, BPUKB bertransformasi dari pendekatan seremonial menuju politik pemberdayaan berbasis kebangsaan. Fokus kerja diarahkan pada dua poros utama: penguatan internal, yaitu menjaga spiritualitas kader agar tetap dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar;³¹ serta kolaborasi eksternal, yakni membangun jejaring dengan ormas Islam, pesantren, tokoh lintas iman, dan lembaga keagamaan. Pendekatan wasathiyah³² menjadi fondasi, menghadirkan wajah organisasi yang santun, dialogis, namun tegas dalam prinsip.

Dari Konsolidasi Kultural Menuju Aksi Kebangsaan

Periode Agustus–Desember 2025 menjadi fase konsolidasi dan penguatan basis kultural BPUKB. Langkah awal dimulai dengan penyamaan frekuensi gerak pengurus wilayah dan daerah, sekaligus menanamkan makna kebangsaan dalam bingkai spiritual. Momentum-momentum keagamaan dan nasional dimanfaatkan sebagai ruang dakwah sosial-politik yang menyejukkan.

³¹ Doktrin sosial Islam yang berarti "memerintahkan/mengajak kepada kebaikan" (*ma'ruf*) dan "mencegah dari keburukan/kejahatan" (*munkar*)

³² Moderasi. Jalan tengah. Sikap beragama yang seimbang (*tawazun*), adil (*i'tidal*), dan toleran (*tasamuh*), tidak ekstrem kanan (radikal) atau ekstrem kiri (liberal).

Peringatan Maulid Nabi, Hari Santri, hingga dialog lintas iman dimaknai bukan sekadar agenda rutin, tetapi sebagai media perekat sosial. Silaturahmi ke pesantren, tokoh ulama, habaib, dan pimpinan ormas Islam menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi moral. Dialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperkuat posisi BPUKB sebagai mitra strategis dalam mitigasi konflik sosial, terutama menjelang tahun-tahun politik.

Meski sebagian kegiatan bersifat koordinatif dan belum sepenuhnya masif, periode ini berhasil menegaskan posisi BPUKB sebagai ruang dialog, bukan ruang eksklusif. Diskusi dan pendampingan terus dilakukan kepada pengurus daerah agar agenda keumatan dapat diturunkan secara adaptif sesuai karakter lokal masing-masing daerah.

Peta Jalan 2026: Pelayanan Umat, Moderasi, dan Advokasi

Memasuki 2026, BPUKB diarahkan menjadi pusat rujukan solusi keumatan dan jangkar kerukunan di Jawa Timur. Arah strategis ini diterjemahkan ke dalam empat pilar utama yang menjadi kompas gerak pengurus wilayah dan daerah.



UKHUWAH KEBANGSAAN: Ketua DPW PKS Jatim Bagus Prasetya Lelana didampingi jajaran pengurus bersilaturahmi (*sowan*) ke Kantor PWNU Jawa Timur. Membangun jembatan hati, merajut kolaborasi untuk umat dan bangsa.

Pertama, Silaturahmi sebagai strategi utama. Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak bersifat transaksional, tetapi dibangun melalui kedekatan emosional yang konsisten. BPUKB mendorong pengurus daerah memiliki peta jejaring tokoh serta agenda sowan rutin sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.

Kedua, Pelayanan umat sebagai dakwah nyata. BPUKB menekankan dakwah bil hal, yaitu kehadiran langsung melalui layanan sosial-keagamaan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program seperti pendampingan keluarga, layanan keumatan, pembinaan dai, dan aktivitas sosial lintas agama menjadi pintu masuk kepercayaan publik.



SINERGI BERKEMAJUAN: Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetya Lelana, didampingi jajaran pengurus bersilaturahmi ke Kantor PW Muhammadiyah Jawa Timur.

Ketiga, Moderasi beragama (wasathiyah) sebagai benteng kebangsaan. Di tengah potensi polarisasi, BPUKB memosisikan diri sebagai penjaga Islam yang ramah dan damai. Penguatan pemahaman keislaman arus utama, kolaborasi dengan ormas besar, serta pendidikan kader menjadi prioritas untuk menjaga citra Islam rahmatan lil ‘alamin.

Keempat, Advokasi hak-hak keagamaan. BPUKB hadir membela kebebasan beribadah, keadilan regulasi, dan kepentingan umat melalui jalur konstitusional dan kebijakan publik. Advokasi ini tidak reaktif, tetapi berbasis dialog, hukum, dan kepentingan bersama.

Target strategis 2026 difokuskan pada penguatan pesantren binaan, pencetakan dai muda yang melek digital, serta pengembangan desa sadar kerukunan sebagai model toleransi. Seluruh agenda ini dirancang untuk memastikan bahwa kehadiran BPUKB tidak berhenti pada wacana, tetapi dirasakan langsung oleh umat dan masyarakat luas.

Ringkasnya, BPUKB bergerak dari penguatan nilai menuju pelayanan nyata, dari simbol menuju substansi. Dengan kepemimpinan yang inklusif dan arah strategis yang jelas, BPUKB diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama legitimasi moral, sosial, dan kebangsaan PKS Jawa Timur menuju agenda besar 2026–2029.

BIDANG KOMUNIKASI DAN DIGITAL (KOMDIGI)

Jembatan Nilai, Kerja Nyata, dan Persepsi Publik

Perubahan lanskap komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menggeser pusat pembentukan opini publik ke ruang digital. Media sosial, platform video, dan kanal pesan instan kini menjadi arena utama interaksi sosial, politik, dan kebudayaan. Di Jawa Timur—provinsi dengan populasi besar dan keragaman sosial tinggi—transformasi digital menghadirkan peluang strategis sekaligus tantangan serius bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bidang Komunikasi dan Digital (Komdigi) DPW PKS Jawa Timur hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Komdigi diposisikan bukan sekadar sebagai produsen konten, melainkan sebagai arsitek komunikasi strategis yang menghubungkan kerja nyata partai dengan pemahaman dan kepercayaan publik. Kesadaran dasarnya sederhana namun krusial: politik modern adalah politik komunikasi. Kerja pelayanan, advokasi, dan pengabdian yang tidak terkomunikasikan dengan baik akan kehilangan daya jangkauan dan dampaknya.

Filosofi kerja Komdigi berpijak pada komunikasi sebagai bagian dari dakwah dan pelayanan. Setiap pesan dipahami sebagai amanah nilai yang harus mencerminkan karakter PKS: bersih, peduli, profesional, dan berkeadilan. Publik diposisikan sebagai mitra dialog, bukan sekadar objek kampanye. Oleh karena itu, narasi yang dibangun diarahkan pada politik solusi—mengangkat kisah pelayanan kader, kerja legislator, dan advokasi kebijakan yang menyentuh persoalan nyata masyarakat.

Dalam kerangka visi besar DPW PKS Jawa Timur, Komdigi memegang peran strategis sebagai penguat pelayanan publik, perekat soliditas internal, inovator komunikasi generasi muda, sekaligus pengelola isu dan reputasi partai. Dengan komunikasi yang terarah dan bernilai, Komdigi berkontribusi langsung dalam membangun kepercayaan publik dan fondasi kemenangan jangka menengah.

Refleksi Pasca Pelantikan: Menjaga Ritme di Tengah Keterbatasan

Pasca pelantikan kepengurusan DPW PKS Jawa Timur, Bidang Komdigi langsung dihadapkan pada tuntutan kerja cepat di tengah ekosistem digital yang bergerak dinamis. Tanpa kemewahan waktu adaptasi, Komdigi berupaya membangun ritme kerja, menyatukan persepsi lintas bidang, serta menjaga kehadiran PKS Jawa Timur di ruang digital agar tetap bermakna dan terdengar luas.

Podcast lintas bidang dan program Ogenzi menjadi upaya awal menghadirkan percakapan yang lebih humanis, reflektif, dan dekat dengan generasi muda. Webinar Fraksi PKS Jawa Timur Bicara berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan publik dan masyarakat, memperkuat posisi aleg sebagai etalase partai.

Namun refleksi jujur menunjukkan masih banyak ruang perbaikan. Pemanfaatan podcast dan Youtube belum optimal, keterbatasan SDM host dan talent menjadi kendala, serta sinergi lintas bidang belum terbangun secara sistematis. Sebagian program kreatif tertunda karena ekosistem pendukung—lokasi produksi, jadwal, dan tim—belum sepenuhnya siap.

Peta Jalan 2026: Konsolidasi Digital Menuju Pemenangan

Tahun 2026 diproyeksikan sebagai tahun konsolidasi digital bagi Bidang Komdigi DPW PKS Jawa Timur. Fokus kerja bergeser dari sekadar menjaga ritme menuju penataan sistemik, penguatan dampak, dan integrasi penuh dengan agenda besar partai melalui kerangka K2P2: Kader, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu.

Dalam aspek kader, komunikasi digital diarahkan untuk memperkuat identitas, militansi, dan kebanggaan kolektif. Konten tidak lagi menampilkan kader semata sebagai struktur formal, tetapi sebagai pribadi yang humanis, solutif, dan dekat dengan rakyat. Narasi pelayanan dan pengabdian menjadi pengikat emosional kader dengan partai.

Pada aspek kaderisasi, Komdigi memosisikan digital sebagai medium regenerasi. Program Ogenzi dikembangkan sebagai pintu

masuk Gen Z untuk mengenal nilai dan gagasan PKS dengan bahasa yang relevan. Kaderisasi digital diperkuat melalui pelatihan media sosial, transfer keterampilan kreatif, dan pembentukan jejaring kreator internal di seluruh Jawa Timur.

Dalam aspek pemenangan, Komdigi mulai menyiapkan mesin digital sejak dini. Kehadiran digital dibangun secara berkelanjutan melalui konten Youtube mingguan, penguatan media sosial, dan pembentukan relawan digital di kabupaten/kota. Komunikasi pemenangan tidak dipahami sebagai kerja instan menjelang pemilu, melainkan proses panjang membangun kredibilitas, kepercayaan, dan kedekatan dengan publik.

Target 2026 diarahkan pada konsistensi produksi konten, peningkatan engagement, penguatan Forum PR sebagai ruang kaderisasi Komdigi, serta kolaborasi erat dengan aleg DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota. Seluruh agenda ini membutuhkan dukungan struktural, SDM kreatif, dan fasilitas produksi yang memadai.

BIDANG USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF (BUMKraf)

Inkubator Kemandirian, Penggerak Ekonomi Kemenangan

Jawa Timur memiliki karakter ekonomi yang khas dan tangguh. Jutaan pelaku UMKM, unit usaha pesantren, serta sektor ekonomi kreatif menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, terutama saat krisis. Bagi PKS, UMKM dan ekonomi kreatif bukan sekadar objek bantuan, melainkan subjek perubahan dan fondasi penting bagi kemandirian umat serta kemenangan politik jangka panjang.

Bidang Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif (BUMKraf) DPW PKS Jawa Timur hadir dengan visi strategis: mengubah semangat wirausaha menjadi kekuatan ekonomi riil yang menopang militansi kader dan keberdayaan masyarakat. Di bawah tema besar *Akselerasi Jawa Timur*, BUMKraf menempatkan kemandirian ekonomi sebagai prasyarat keberlanjutan perjuangan. Kader yang mandiri secara ekonomi akan lebih kokoh dalam berjuang, sementara masyarakat yang berdaya akan lebih rasional dan jernih dalam menentukan pilihan politiknya.

BUMKraf menegaskan posisi PKS sebagai partai solusi ekonomi. Tidak berhenti pada wacana dan orasi, tetapi hadir langsung dalam persoalan dapur rakyat, usaha kecil, dan mimpi ekonomi keluarga. Di sinilah ekonomi dipahami bukan hanya sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga modal sosial dan politik.

Refleksi Kinerja Awal: Membangun Ekosistem, Menyalakan Harapan

Pasca pelantikan pada Agustus 2025, BUMKraf bergerak cepat membangun fondasi ekosistem ekonomi kader dan masyarakat. Fokus awal diarahkan pada konsolidasi jaringan pengusaha, penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta penciptaan ruang temu antara potensi usaha dan pasar.

Langkah strategis yang ditempuh BUMKraf menunjukkan pergeseran pendekatan: dari kegiatan seremonial menuju

pembangunan ekosistem. Jaringan pengusaha kader mulai dipetakan dan disatukan dalam forum silaturahmi bisnis, membuka peluang pasar internal dan kolaborasi antarsektor. Pelatihan digital marketing dan ekonomi kreatif digelar sebagai respons terhadap perubahan lanskap ekonomi, mendorong UMKM untuk masuk ke pasar digital dan memanfaatkan platform daring.

BUMKraf juga mulai membangun komunitas binaan di tingkat daerah sebagai embrio inkubasi wirausaha. Produk-produk UMKM difasilitasi tampil dalam berbagai agenda besar partai, tidak hanya sebagai etalase ekonomi, tetapi sebagai simbol keberpihakan PKS terhadap usaha rakyat. Dari proses ini, kepercayaan dan loyalitas basis massa mulai tumbuh karena masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran partai.

Refleksi dari fase ini menunjukkan bahwa ekonomi adalah pintu masuk advokasi paling konkret. Ketika PKS hadir membantu usaha bertumbuh, persepsi politik berubah menjadi hubungan emosional dan rasional yang kuat. Namun BUMKraf juga menyadari bahwa tantangan ke depan bukan sekadar memperbanyak kegiatan, melainkan memastikan pendampingan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Peta Jalan 2026–2029: Arsitektur Ekonomi Pemenangan

Memasuki 2026, BUMKraf memproyeksikan fase *scale-up* dan ekspansi sebagai bagian dari strategi pemenangan menuju 2029. Ekonomi ditempatkan sebagai pilar kemandirian partai dan basis militansi kader, bukan sekadar sektor pendukung.

Arah strategis BUMKraf bertumpu pada tiga gagasan besar. Pertama, inkubasi wirausaha tuntas tanpa sisa. Semangat *Zero Mission* diterjemahkan dalam pendampingan paripurna: memastikan usaha kader dan binaan memiliki legalitas lengkap, pendampingan mentor, serta mitigasi risiko kegagalan. Tidak ada UMKM yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah dan dukungan.

Kedua, militansi ekonomi saudagar pejuang. BUMKraf menanamkan kembali teladan wirausaha pejuang—mandiri secara

finansial, namun dermawan dan berkontribusi bagi perjuangan. Kemandirian logistik partai dibangun melalui unit usaha strategis dan penguatan ekonomi internal. Gerakan “beli produk teman” menjadi praktik sederhana namun berdampak besar dalam membangun sirkulasi ekonomi internal kader.

Ketiga, kolaborasi pentahelix³³ sebagai mesin pertumbuhan. BUMKraf menyadari bahwa kemenangan ekonomi tidak bisa dikerjakan sendirian. Sinergi internal dengan bidang kepemudaan dan perempuan memperluas garapan start-up, industri kreatif, dan *home industry*. Sementara kolaborasi eksternal dengan asosiasi usaha, perbankan syariah, dan pemerintah daerah membuka akses permodalan, sertifikasi, dan pasar yang lebih luas.

Dengan peta jalan ini, BUMKraf tidak lagi diposisikan sebagai penyelenggara pelatihan semata, tetapi sebagai arsitek ekonomi kemenangan. Target akhirnya jelas: ekonomi kader kuat, masyarakat berdaya, logistik perjuangan mandiri, dan basis massa yang loyal serta tumbuh secara organik.

Penutup

Menuju 2029, perjuangan membutuhkan napas panjang dan fondasi ekonomi yang kokoh. BUMKraf berkomitmen menjaga agar “asap dapur” kader tetap mengepul dan roda ekonomi umat terus berputar. Transformasi mindset menjadi kunci: dari pencari kerja menjadi pencipta kerja, dari penerima bantuan menjadi penggerak kemandirian.

Dengan ekonomi yang berdaya, barisan akan semakin kokoh. Ekonomi Berdaya, PKS Berjaya.

³³ Model kolaborasi pembangunan yang melibatkan lima unsur: Pemerintah (*Government*), Akademisi (*Academics*), Badan Usaha (*Business*), Masyarakat/Komunitas (*Community*), dan Media. Konsep ini diadopsi luas dalam regulasi pariwisata dan inovasi di Indonesia (misal: Permenparekraf).

BAB V

REFLEKSI & PENUTUP

Saudara-saudaraku, seluruh keluarga besar PKS Jawa Timur—para pengurus DPW, pimpinan DPTD di 38 kabupaten/kota, serta seluruh anggota yang saya banggakan—apa yang tertuang dalam buku ini bukanlah sekadar catatan kegiatan atau dokumentasi formal belaka. Ia adalah manifesto perjuangan, sebuah panduan arah yang harus menjadi napas gerak kita bersama dalam menghadapi turbulensi politik menuju 2029. Kita telah memasuki sebuah era baru yang kita sebut sebagai fase akselerasi: sebuah keputusan sadar untuk meninggalkan pola pertumbuhan organik yang lambat, menuju lompatan eksponensial yang lebih besar, lebih cepat, dan terukur. Melalui strategi *Zero Mission*, kita dipanggil untuk berani melakukan *fresh start*, melepaskan beban masa lalu, serta memperbarui peta perjuangan agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat Jawa Timur yang terus berubah.

Fokus perjuangan ke depan sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar, yaitu memperkuat kerangka kerja K2P2: penguatan kader, kaderisasi yang berkualitas, dan pelayanan publik yang nyata sebagai jalan utama menuju kemenangan pemilu. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kader adalah hulu dari seluruh kemenangan. Jika hulunya jernih dan kuat, maka hilir elektoral akan mengalir dengan sendirinya menuju kekuasaan yang bermartabat. Karena itu, tugas utama kita di tahun 2026 adalah memastikan sistem kaderisasi bekerja sebagai jantung strategi—mencetak manusia-manusia tangguh yang spiritualnya kuat, intelektualnya adaptif, dan kehadiran sosialnya benar-benar membumi di tengah rakyat.

Kaderisasi tidak boleh lagi berhenti pada rutinitas pertemuan internal, tetapi harus bertransformasi menjadi sistem pembinaan berbasis kinerja dan kontribusi nyata di lapangan. Setiap kader dituntut membuktikan militansinya melalui peran sosial yang konkret, dimulai dari lingkungan terkecil di tingkat RT dan RW. Dengan cara inilah PKS tidak lagi dipersepsikan sebagai partai yang hadir menjelang pemilu semata, melainkan sebagai partai yang hidup dan bernapas bersama rakyat setiap hari. Inilah makna pelayanan publik sebagai panglima: setiap kebijakan dan program kerja harus menyentuh

kebutuhan paling dasar masyarakat, mulai dari ketahanan keluarga melalui Rumah Keluarga Indonesia, pemberdayaan ekonomi desa, hingga advokasi hukum dan kesehatan bagi mereka yang paling rentan.

Kita sedang membangun organisasi yang cerdas dan berbasis data, di mana setiap langkah dipantau melalui Dashboard TOTAL untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja di seluruh wilayah. Tidak ada lagi ruang bagi budaya “asal bapak senang” atau laporan administratif tanpa dampak. Setiap rupiah dan setiap jam kerja kader harus berbuah hasil nyata—penambahan anggota baru, peningkatan kepercayaan publik, dan pertumbuhan suara. Kita harus berani memangkas kebisingan program yang bersifat seremonial dan mengalihkan energi sepenuhnya pada kegiatan berdampak tinggi bagi masyarakat luas.

Dalam menjalankan amanah kepemimpinan ini, saya mengajak seluruh struktur—dari wilayah hingga desa—untuk memiliki kesamaan suhu dan frekuensi perjuangan: bekerja dengan prinsip amanah tanpa menolak, disiplin tanpa tapi, dan kesetiaan tanpa syarat kepada visi besar partai. Kita ingin menghadirkan PKS sebagai partai Islam *rahmatan lil ‘alamin* yang inklusif dan kolaboratif, mampu menembus sekat-sekat sosiologis Jawa Timur melalui diplomasi kemanusiaan dan pelayanan yang tulus. Target kemenangan dua digit bukan sekadar ambisi angka, melainkan sarana untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun Jawa Timur yang adil dan sejahtera.

Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun ekspansi dan presisi: bergerak serentak mengepung kota dari desa-desa, merebut hati pemilih muda dengan narasi yang segar, serta menjaga setiap jengkal wilayah dari godaan politik transaksional melalui ikatan emosional yang autentik dengan konstituen. Kemenangan yang kita jemput adalah kemenangan nilai dan peradaban—yang hanya dapat diraih jika kita tetap istiqamah dalam barisan yang solid, terorganisir, dan penuh semangat pengabdian. Dengan pertolongan Allah SWT dan militansi tanpa batas dari saudara-saudaraku semua, saya yakin PKS Jawa Timur akan tampil sebagai kekuatan utama yang tak terhentikan dalam

mewujudkan Indonesia Madani. Teruslah bergerak, teruslah melayani, karena kebahagiaan sejati terletak pada seberapa besar manfaat yang mampu kita hadirkan untuk sesama.

PROFIL KETUA DPW PKS JAWA TIMUR

**Bagus Prasetia Lelana:
Mengabdikan Melalui Pendidikan, Kemanusiaan,
dan Jalan Politik Bernilai Ibadah**

Jawa Timur adalah tanah yang melahirkan banyak pejuang senyap—mereka yang bekerja dalam diam, namun dampaknya menjalar jauh melampaui batas ruang dan waktu. Dari bumi Tulungagung, lahir seorang sosok yang memaknai hidup sebagai rangkaian pengabdian panjang dan berlapis: Bagus Prasetia Lelana, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur.

Sosok ayah yang dikaruniai 6 anak dan 2 cucu ini lahir pada 12 Agustus 1967, Bagus tumbuh dalam tradisi kesederhanaan dan ketekunan. Pendidikan formal ia tempuh hingga meraih gelar sarjana dari IKIP Negeri Surabaya. Namun bagi Bagus, pendidikan bukan sekadar latar akademik, melainkan jalan hidup yang membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan cara mengabdikan.

Sejak tahun 1994, ia terjun langsung sebagai praktisi pendidikan dengan mendirikan dan mengembangkan sebuah yayasan pendidikan di Tulungagung. Dari langkah awal yang sederhana, kini berdiri empat taman kanak-kanak, dua sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, serta Madrasah Aliyah yang terintegrasi dengan pesantren berbasis *digital marketing*. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk mencetak generasi Qurani—berkarakter, berjiwa wirausaha, dan hafiz Al-Qur'an.

Bagi Bagus, mencerdaskan kehidupan manusia adalah bentuk ibadah yang paling nyata: membangun manusia seutuhnya, bukan sekadar mendirikan institusi.

Di luar dunia pendidikan, jiwa kemanusiaannya menemukan medan pengabdian yang lebih luas. Ia dikenal sebagai pegiat kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketika bencana Tsunami Aceh mengguncang Indonesia, Bagus turun langsung sebagai relawan, begitu pula saat bencana besar melanda Yogyakarta. Pengalaman-pengalaman itu meneguhkan keyakinannya

bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keberanian untuk hadir di saat paling sulit.

Kiprah kemanusiaannya melampaui batas negara. Ia terlibat langsung dalam misi kemanusiaan ke Lebanon, serta ke wilayah selatan Turki ketika gempa besar mengguncang kawasan tersebut. Di ruang-ruang krisis itu, Bagus tidak hanya membawa bantuan logistik, tetapi juga membawa nama bangsa dan wajah kepedulian umat Islam Indonesia—sebuah peran kemanusiaan yang sekaligus bersifat diplomatik.

Selain itu, Bagus juga mengabdikan diri sebagai aktivis keumatan. Ia terlibat dalam pembangunan dan penguatan sarana-prasarana ibadah kaum muslimin, mulai dari masjid, musala, hingga pusat-pusat pembelajaran Al-Qur'an. Baginya, masjid bukan sekadar bangunan ritual, melainkan pusat peradaban—tempat iman, ilmu, dan kepedulian sosial bertemu dan bertumbuh.

Pengabdian panjang tersebut pada akhirnya membawanya ke dunia politik. Namun sejak awal, Bagus memaknai politik bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat pengabdian. Ia menapaki jalan politik dari akar rumput, mengemban amanah sebagai Ketua DPD PKS Tulungagung, hingga dipercaya memimpin sebagai Ketua DPW PKS Jawa Timur.

Saat ini, ia juga mengemban amanah strategis sebagai Anggota Majelis Syuro PKS, sebuah posisi yang menuntut kebijaksanaan, keteguhan nilai, serta pandangan jauh ke depan dalam menjaga arah perjuangan partai.

Di setiap peran yang ia jalani—sebagai pendidik, relawan kemanusiaan, aktivis keumatan, maupun politisi—terlihat satu benang merah yang konsisten: keberpihakan pada kemaslahatan umat dan keteguhan pada nilai. Ia hadir di ruang pendidikan, berdiri di tengah bencana, membangun masjid dan ruang belajar, serta merumuskan arah perjuangan politik dengan pijakan moral dan spiritual.

Pada akhirnya, Bagus Prasetya Lelana merepresentasikan sosok kepemimpinan yang utuh: seorang praktisi pendidikan, pegiat kemanusiaan nasional dan internasional, aktivis keumatan yang

membangun sarana ibadah dan pembelajaran, sekaligus politisi dan Anggota Majelis Syuro PKS yang memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan privilese.

Sebagaimana keyakinan yang ia pegang teguh:

“Berkhidmat untuk rakyat adalah panggilan. Karena kebahagiaan sejati terletak pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan untuk sesama.”

Sintesis Aktivistis Kemanusiaan dan Teknokrat Politik

Untuk menyelaraskan frekuensi gerak organisasi, seluruh struktur perlu mengenal secara mendalam siapa yang memegang kemudi. Bagus Prasetia Lelana—atau yang akrab disapa *Pak Bagus*—bukan sekadar administrator partai. Ia adalah representasi evolusi kader PKS yang memadukan militansi ideologis dengan kecakapan teknokratis serta sensitivitas kemanusiaan.

Profil kepemimpinannya dibentuk oleh rekam jejak panjang dalam dunia aktivisme dan pelayanan. Keterlibatannya yang intens dalam jejaring kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri, membentuk karakter kepemimpinan yang empatik, responsif terhadap krisis, dan hadir di tengah masyarakat. Latar belakang ini menjadi sangat relevan dalam politik modern, ketika pemilih semakin mendambakan pemimpin yang peduli dan membumi (*caring leadership*).

Dalam pidato dan wawancaranya, tampak jelas bahwa Bagus memiliki visi yang melampaui sekat-sekat politik tradisional. Ia mampu berbicara dengan fasih tentang transformasi digital, sinergi dengan pemerintah provinsi, hingga isu-isu makroekonomi. Namun di saat yang sama, ia tetap menjaga kedekatan dengan akar rumput melalui bahasa yang santun dan membumi, serta apresiasi terhadap kerja-kerja senyap para kader di lapangan. Karakter inilah yang memungkinkannya berperan sebagai *bridge-builder* yang efektif antara elit kebijakan dan basis massa.

Diplomasi Kemanusiaan sebagai Doktrin Politik

Salah satu pilar pemikiran Bagus Prasetia Lelana adalah konsep *Diplomasi Kemanusiaan*. Bagi Bagus, politik merupakan perluasan dari kerja-kerja kemanusiaan. Jika selama ini PKS dikenal melalui aksi tanggap bencana, di bawah kepemimpinannya, aksi tersebut diletakkan dalam kerangka diplomasi politik yang lebih luas dan strategis.

Diplomasi kemanusiaan bukan sekadar taktik pencitraan, melainkan strategi penetrasi kultural. Di Jawa Timur—daerah yang kuat dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial—pendekatan humanis terbukti jauh lebih efektif dibandingkan agitasi politik yang keras. Melalui jalur ini, PKS Jawa Timur di bawah kepemimpinan Bagus berupaya merebut hati *swing voters* dan masyarakat apolitis, sekaligus membuktikan bahwa PKS hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan nyata rakyat, mulai dari krisis kesehatan hingga bencana alam.

Visi Politik: Jalan Tengah dan Kolaborasi

Bagus Prasetia Lelana membawa PKS Jawa Timur menuju politik kolaborasi. Dukungan yang ia berikan kepada pemerintahan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak ditegaskan bukan sebagai sikap mengikuti secara pasif, melainkan sebagai kemitraan yang kritis dan konstruktif. Sikap ini mencerminkan kematangan politik: PKS Jawa Timur tidak memosisikan diri sebagai oposisi asal beda, melainkan sebagai mitra strategis demi kemaslahatan Jawa Timur.

Visi ini tercermin dalam tema Rapat Kerja Wilayah, “*Kolaborasi Membangun Jawa Timur*”. Bagus memahami bahwa membangun provinsi sebesar Jawa Timur tidak mungkin dilakukan sendirian. Diperlukan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, serta elemen pemerintahan. Karena itu, visi kolaboratif ini harus diturunkan hingga ke tingkat DPD dan DPC: jangan eksklusif, bukalah pintu komunikasi seluas-luasnya dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan camat sebagai simpul-simpul kepemimpinan lokal.